

**KAJIAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PREFERENSI PKL SERTA PERSEPSI
MASYARAKAT SEKITAR DI KOTA PEMALANG**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

ARI SULISTIYO BUDI
L4D004005



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

**KAJIAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA
BERDASARKAN PREFERENSI PKL SERTA PERSEPSI
MASYARAKAT SEKITAR DI KOTA PEMALANG**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :
ARI SULISTIYO BUDI
L4D 004 005

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 17 Maret 2006

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 17 Maret 2006

Pembimbing Utama,

DR. Syafrudin Budiningharto.

Mentor,

Co. Mentor,

Ir. Ragil Haryanto, MSP

Ir. Rina Kurniati, MT

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.

Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 17 Maret 2006

ARI SULISTIYO BUDI
NIM. L4D 004 005

*Hanya dengan rahmah & hidayah-Nya
aku bisa sampai di sini.....*

*Demi matahari dan cahayanya di pagi
hari,
dan bulan apabila mengiringi,
dan siang apabila menampakkannya,
dan malam apabila menutupinya,
dan langit serta binaannya,
dan bumi serta hamparannya,
dan jiwa serta penyempurnaannya,
Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa
itu (jalan) kefasikan & ketakwaan, dan
Sesungguhnya beruntunglah orang-orang
yang mensucikan jiwa, dan sesungguhnya
merugilah orang-orang yang mengotorinya.*

(Asy Syams : 1 – 10)

Karya ini kupersembahkan bagi :

*Istri & anakku serta keluarga besarku tercinta
yg selalu setia mendukung & mendorongku
dalam setiap langkahku
untuk menjadi orang yg lebih baik.....*

ABSTRAKSI

Perkembangan Kota Pemalang sejalan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal menyebabkan pertumbuhan sektor informal semakin pesat. Pertumbuhan PKL sebagai salah satu sektor informal sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang kaki Lima telah berupaya untuk mengatur pedagang kaki lima, yang antara lain dengan penetapan lokasi untuk para pedagang kaki lima, namun masih belum efektif. Yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan preferensi PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Dengan mempelajari perilaku dari PKL maka dapat dikenali ciri-ciri dan karakteristiknya sehingga dapat dibuat perencanaan dan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik PKL sehingga pengaturan tersebut dapat diimplementasikan

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis distribusi frekuensi, tabulasi silang dan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh temuan bahwa PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Pemalang yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan. Dari keenam lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, Lapangan Mulyoharjo merupakan lokasi yang belum tepat sebagai lokasi PKL karena tingkat kunjungan masyarakat masih rendah, sedangkan Alun-alun merupakan lokasi yang sangat diminati oleh masyarakat dan PKL. Kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL.

Rekomendasi yang dapat diajukan adalah pembinaan terhadap PKL, mengukur kemampuan suatu lokasi untuk dapat menampung jumlah PKL, memasukkan PKL dalam perencanaan tata ruang kota.

Kata kunci: PKL, Lokasi PKL, Persepsi dan Preferensi

ABSTRACT

The development of Pemalang town creates the growth of labor with the limited job opportunities in formal sector. This causes the increasing of labor in informal sector; such as street vendor (PKL). However, the street vendors have always been related to the dirtiness, nastiness, and the disorder of the location used by the street vendors. Despite the bad effects of the street vendors, their existence is certainly undeniable.

The government of Pemalang has regulated the street vendors by determining their location based on Perda number 28, 2002. However, it is still ineffective. It can be seen from the number of the violation done by the street vendors.

This research is aimed to know the behavior and the preference of the street vendors about the location determined by the government of Pemalang, and also the society's perceptions about the existence of informal sector activity. By understanding the street vendors behavior, the government is hoped to be able to establish the plan and regulation that can be implemented effectively.

This study uses descriptive approach; while the analysis uses qualitative description analysis, cross-tabulation, and frequency distribution analysis. The sample of the research covers the street vendors from six locations and the society who becomes the street vendors customers.

According to the result of the analysis, street vendors has become one of the main living for Pemalang community in informal sector. It can be seen from the characteristics of the street vendors, e.g. it is easily to do, high-educational background is not needed, big capital is not necessary, and the income can be higher than the formal one. The existence of street vendors is usually in groups and they prefer to sell food than any other products. From six locations determined by the Pemalang government for the street vendors, Mulyoharjo field is not suitable for street vendors' activities because of its customer is rarely; whereas Alun-alun becomes the most interesting place for street vendors and customers because of its strategic location. However, the street vendors have not been included in the city plan so that they do not get the appropriate facilities to support their activities.

For the better of the street vendors in the future, Pemalang government needs to give them restoration, the location that can accommodate them, and the inclusion of the street vendors in the city plan.

Keywords: Street vendors, street vendor location, preference and perception

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan hidayah-Nya, tesis dengan judul **“KAJIAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PREFERENSI PKL SERTA PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR KOTA PEMALANG”** yang merupakan tahap akhir dalam menyelesaikan program pasca sarjana pada Magister Pembangunan Wilayah dan Kota dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah melalui proses yang tidak mudah. Hanya dengan pertolongan dari Allah SWT serta dukungan dan bantuan dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pengelola Program Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas yang telah membantu membiayai kegiatan belajar.
2. Kepala Kanwil X DJPb Serang yang telah memberikan izin belajar kepada penulis.
3. Bapak Prof. DR. Ir. Soegiono Soetomo, DEA, selaku ketua Program Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
4. Bapak DR. Syafrudin Budiningharto, selaku Pembimbing Utama, yang memberi arahan.
5. Bapak Ir. Ragil Haryanto, MSP., selaku Mentor, yang banyak memberi masukan dan penyempurnaan materi.
6. Ibu Ir. Rina Kurniati, MT. selaku Co.Mentor, yang memberi bimbingan dan tuntunan selama proses penyusunan tesis tersebut.
7. Ibu Ir. Retno Susanti, MT selaku penguji 1 yang telah memberikan masukan dan saran bagi penyempurnaan tesis ini.
8. Ibu Ir. Nurini, MT selaku penguji 2 yang telah memberikan masukan dan saran bagi penyempurnaan tesis ini.
9. Istri dan anakku tersayang, yang selalu setia dalam memberi dukungan bagi penyelesaian tesis ini.
10. Segenap keluarga besarku atas dukungan yang diberikan.
11. Teman-teman kelas Bappenas atas dukungan dan kerja sama yang baik.
12. Teman-teman sekretariat MPWK atas bantuan dalam kelancaran studi.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik pengalaman maupun ilmu pengetahuan serta wawasan berpikir, sehingga meskipun tesis ini merupakan suatu karya ilmiah, namun di dalamnya masih terdapat berbagai kelemahan. Oleh karena itu segala bentuk saran dan koreksi penulis harapkan demi penyempurnaan lebih lanjut.

Penulis,

Ari Sulistiyo Budi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Sasaran Penelitian	7
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4.1 Ruang Lingkup Substansial	8
1.4.2 Ruang Lingkup Spasial	9
1.4.3 Posisi Penelitian	11
1.5 Kerangka Pemikiran	12
1.6 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian	15
1.6.1 Pendekatan Penelitian.....	15
1.6.2 Metode Pelaksanaan Penelitian	16
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data	17
1.6.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data	18
1.6.5 Teknik Sampling	19
1.6.6 Teknik Analisis	21
1.7 Sistematika Penulisan	26
 BAB II KARAKTERISTIK DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA SERTA PERSEPSI MASYARAKAT	 28
2.1 Konsep Sektor Informal	28
2.1.1 Pengertian Sektor Informal.....	28
2.1.2 Ciri-ciri sektor Informal.....	30
2.2 Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Kegiatan Ekonomi Sektor Informal	34
2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima	34

2.2.2	Karakteristik Aktivitas PKL	35
2.2.2.1	<u>Jenis Dagangan PKL</u>	35
2.2.2.2	<u>Bentuk Sarana Perdagangan PKL</u>	36
2.2.2.3	<u>Pola Penyebaran PKL</u>	38
2.2.2.4	<u>Pola Pelayanan Aktivitas PKL</u>	39
2.2.3	Karakteristik Lokasi PKL	43
2.3	Pengertian Persepsi dan Preferensi	49
2.4	Rangkuman Kajian Teori	49
2.5	Instrumen Penelitian	51

BAB III GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA

	PEMALANG	53
3.1	Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang	53
3.2	Kebijakan dan Strategi Pengembangan RUTR Kota Pemalang	56
3.3	Peran dan Fungsi Kota Pemalang	57
3.4	Fasilitas Perkotaan	61
3.5	Perkembangan Jumlah Penduduk	61
3.6	Pedagang Kaki Lima di Kota Pemalang	61
3.6.1	Perkembangan PKL di Kota Pemalang	61
3.6.2	Karakteristik Lokasi Penelitian	63
3.7	Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap PKL	70

BAB IV KAJIAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PREFERENSI PKL SERTA PERSEPSI MASYARAKAT

	SEKITAR DI KOTA PEMALANG	73
4.1	Analisis Karakteristik Umum PKL	74
4.1.1	Tingkat Usia	74
4.1.2	Tingkat Pendidikan	75
4.1.3	Asal Pedagang	76
4.1.4	Jumlah Pekerja	78
4.1.5	Lama Usaha	79
4.1.6	Modal	81
4.1.7	Pendapatan	82
4.2	Analisis Karakteristik Aktivitas PKL	84
4.2.1	Jenis Usaha	84
4.2.2	Sarana Dagang	89
4.2.3	Pola Penyebaran dan Pengelompokkan Pedagang Kaki Lima	94
4.2.4	Lama Waktu Aktivitas	97
4.3	Analisis Karakteristik Lokasi PKL	98
4.3.1	Ruang Aktivitas PKL	101
4.3.2	Luas Ruang Aktivitas PKL	102
4.3.3	Jarak Lokasi Usaha Dengan Tempat Tinggal	104
4.3.4	Perizinan	105
4.4	Analisis Kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Penataan PKL dengan Keadaan pada Lokasi PKL	107

4.5	Analisis Preferensi PKL	112
4.5.1	Preferensi Berkelompok	113
4.5.2	Preferensi Terhadap Pengaturan	114
4.5.3	Preferensi Kesesuaian Lokasi	118
4.6	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap PKL dan Lokasinya	119
4.6.1	Alasan Masyarakat Berbelanja di PKL	119
4.6.2	Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Keberadaan PKL	121
4.6.3	Persepsi Masyarakat Terhadap Gangguan Akibat Keberadaan PKL	122
4.6.4	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelompokan PKL dan Alasannya.....	123
4.6.5	Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan PKL	124
4.6.6	Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Lokasi	127
4.7	Analisis Hubungan Antara Preferensi PKL dan Persepsi Masyarakat	128
4.8	Temuan Studi	139
BAB V	PENUTUP	144
5.1	Kesimpulan	144
5.2	Rekomendasi	145
5.3	Usulan Studi Lanjut	146
DAFTAR PUSTAKA	148
LAMPIRAN	152

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I.1 : Posisi Penelitian	11
TABEL I.2 : Jumlah Populasi dan Sampel PKL	20
TABEL I.3 : Komponen Analisis Tabulasi Silang(Cross Tab)	22
TABEL I.4 : Sasaran, Analisis, Jenis Data, Sumber Data Dan Teknik Analisis	24
TABEL III.1 : Tempat dan Waktu Usaha menurut Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003	72
TABEL IV.1 : Jumlah Populasi dan Sampel	73
TABEL IV.2 : Usia Pedagang Kaki Lima	74
TABEL IV.3 : Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima	75
TABEL IV.4 : Daerah Asal Pedagang Kaki Lima	77
TABEL IV.5 : Jumlah Tenaga Kerja yang Dilibatkan	78
TABEL IV.6 : Lama Usaha Pedagang Kaki Lima	80
TABEL IV.7 : Modal Usaha	81
TABEL IV.8 : Pendapatan Pedagang Kaki Lima Rata-rata Per Hari	83
TABEL IV.9 : Jenis Usaha Pedagang Kaki Lima	85
TABEL IV.10 : Sarana Dagang PKL	89
TABEL IV.11 : Hubungan antara Jenis Dagangan dengan Sarana Dagang...	91
TABEL IV.12 : Pengelompokkan PKL	96
TABEL IV.13 : Lama Waktu Aktivitas PKL	97
TABEL IV.14 : Jumlah PKL	99
TABEL IV.15 : Alasan Pemilihan Lokasi	100
TABEL IV.16 : Ruang Aktivitas	101
TABEL IV.17 : Luas Ruang Aktivitas PKL	103
TABEL IV.18 : Hubungan antara Sarana Dagang dengan Luas Ruang PKL	103

TABEL IV.19	: Alamat tempat tinggal responden PKL	104
TABEL IV.20	: Jarak Lokasi Usaha dengan Tempat Tinggal	105
TABEL IV.21	: Izin Penggunaan Lokasi Usaha dari Pemerintah	106
TABEL IV.22	: Preferensi Berkelompok	113
TABEL IV.23	: Preferensi PKL Berkelompok dan Alasannya	113
TABEL IV.24	: Preferensi PKL Terhadap Pengaturan	115
TABEL IV.25	: Hal-hal Yang Perlu Diatur	115
TABEL IV.26	: Fasilitas Umum Yang Perlu Ditambah	116
TABEL IV.27	: Preferensi PKL Terhadap Kesesuaian Lokasi dan Alasannya	118
TABEL IV.28	: Jumlah Sampel Masyarakat	119
TABEL IV.29	: Alasan Masyarakat Berbelanja di PKL	120
TABEL IV.30	: Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Keberadaan PKL	121
TABEL IV.31	: Persepsi Masyarakat Terhadap Gangguan Akibat Keberadaan PKL	122
TABEL IV.32	: Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelompokkan PKL	123
TABEL IV.33	: Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan PKL	124
TABEL IV.34	: Hal-hal Yang Perlu Diatur	125
TABEL IV.35	: Fasilitas Umum Yang Perlu Ditambah	126
TABEL IV.36	: Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Lokasi PKL dan Alasannya	127
TABEL IV.36	: Hubungan Preferensi PKL dan Persepsi Masyarakat Pada Keenam Lokasi Penelitian	128

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
GAMBAR 1.1 : Lokasi Penelitian	10
GAMBAR 1.2 : Kerangka Pemikiran Studi	14
GAMBAR 2.1 : Berbagai Macam Bentuk dan Sarana Berdagang PKL	37
GAMBAR 2.2 : Pola Penyebaran Mengelompok (<i>Focus Agglomeration</i>)	38
GAMBAR 2.3 : Pola Penyebaran Memanjang (<i>Linier Consentration</i>)	39
GAMBAR 2.4 : Sifat Pelayanan PKL	41
GAMBAR 3.1 : BWK I Pemalang	55
GAMBAR 3.2 : Tata Guna Lahan BWK I Pemalang	60
GAMBAR 3.3 : Lokasi Penelitian	64
GAMBAR 3.4 : Lokasi Aktivitas PKL Di Jl. RE Martadinata, Alun-alun, Jl. Kenanga, Jl. Veteran, Lap. Mulyoharjo dan Lap. Sirandu	69
GAMBAR 4.1 : Jenis Usaha PKL Pada Keenam Lokasi	88
GAMBAR 4.2 : Sarana Dagang PKL Pada Keenam Lokasi	93
GAMBAR 4.3 : Pola Penyebaran PKL	95
GAMBAR 4.4 : Beberapa Ketidaksesuaian Aktivitas PKL dengan Kebijakan Pemerintah	112
GAMBAR 4.4 : Hubungan Preferensi PKL dan Persepsi Masyarakat	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner	152
Lampiran 2 : Hasil Perhitungan Tabulasi Silang	166
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup	170

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mobilitas penduduk menuju daerah perkotaan di Indonesia semakin meningkat dengan pesat, ditunjukkan oleh angka pertumbuhan penduduk kota yang sangat tinggi, utamanya terjadi pada periode tahun 1980-1990 (7,85 persen per tahun). Tingkat pertumbuhan penduduk kota turun tajam menjadi 2,01 pada periode 1990-2000, tetapi dilihat persentase penduduk yang tinggal di kota tampak semakin meningkat dengan pesat. Sensus Penduduk Indonesia menunjukkan, persentase penduduk kota di Indonesia pada tahun 1980 hanya sebesar 22,38 persen, angka tersebut telah meningkat menjadi 35,91 persen pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian (2000), persentase penduduk kota di Indonesia telah mencapai sebesar 42,43 (BPS, 1982, 1992 dan 2001) (Romdiati dan Noveria, 2004)

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal, maka kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kondisi tersebut di atas dikenal dengan teori faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*) dalam urbanisasi. Akan tetapi kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum migran. Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya ditampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya

formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Fakta yang dapat dilihat adalah adanya ketidakmampuan sektor formal dalam menampung tenaga kerja, serta adanya sektor informal yang bertindak sebagai pengaman antara pengangguran dan keterbatasan peluang kerja, sehingga dapat dikatakan adanya sektor informal dapat meredam kemungkinan keresahan sosial sebagai akibat langkanya peluang kerja (Noor Effendy, 2000:46).

Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima (PKL). Dengan adanya keterbatasan lapangan kerja di sektor formal, pedagang kaki lima menjadi pilihan yang termudah untuk bertahan hidup. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu mudah dimasuki, fleksibel dalam waktu dan tempat, bergantung pada sumber daya lokal dan skala usaha yang relatif kecil.

Kehadiran pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib. Hal ini ditunjukkan oleh penempatan sarana perdagangan yang tidak teratur dan tertata serta sering menempati tempat yang menjadi tempat umum.

Akan tetapi adanya kebutuhan terhadap pedagang kaki lima oleh masyarakat menjadikan keberadaan para pedagang kaki lima pun semakin banyak. Masyarakat terutama yang kelas bawah masih membutuhkan mereka untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau.

Dengan demikian, merebaknya jumlah PKL bukan semata-mata karena keinginan para pedagang tadi untuk memperoleh pendapatan (*push factors*), tetapi

lebih karena tuntutan pasar yang membutuhkan jasa PKL (*pull factors*). Disamping itu jenis usaha ini juga memberikan dampak ikutan yang menguntungkan (*positive spillovers*) seperti mengurangi beban pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja, membantu proses daur ulang beberapa jenis sampah, serta menjadi alternatif terbaik bagi kelompok berdaya beli rendah.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima mempunyai sisi positif, disamping sisi negatifnya. Hal ini merupakan dilema bagi pemerintah kota dalam mengatasi menjamurnya pedagang kaki lima. Disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal sehingga dapat mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi pengangguran.

Disisi lain, keberadaan pedagang kaki lima memberikan kesan kotor, kumuh dan tidak tertib terhadap lingkungan perkotaan yang tidak diinginkan oleh pemerintah kota dalam menata kotanya.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta saja, melainkan juga terjadi di kota Pemalang yang berada di Propinsi Jawa Tengah.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh peningkatan kebutuhan tenaga kerja di sektor formal juga menjadi salah satu sebab bertambahnya sektor informal. Semakin banyak para pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian kota menjadikan pemandangan kota bertambah tidak sedap dipandang lagi.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah berusaha menata PKL berdasarkan perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan pedagang kaki lima, namun pada kenyataannya pemerintah kabupaten belum menemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima yang telah dipindahkan dari Alun-alun kota mengeluh pendapatan mereka berkurang setelah menempati tempat baru karena di tempat yang baru yaitu Lapangan Mulyoharjo masih sepi dari pengunjung. Sehingga perda tersebut tidak memberikan solusi menyeluruh, kecuali hanya untuk keindahan dan ketertiban kota. (Suara Merdeka, 8 Juli 2004)

Berdasarkan SK Bupati No 14 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No. 28 Tahun 2002 yang mengatur PKL, tempat-tempat yang boleh digunakan untuk berjualan antara lain lapangan Mulyoharjo, Lapangan Sirandu, Jalan RE Martadinata, Jalan Veteran, Jalan Kenanga serta alun-alun pada saat tujuh hari sebelum dan sesudah lebaran, atau satu hari menjelang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Namun menurut pedagang yang dioperasi, tempat-tempat itu sudah dihuni oleh PKL lainnya, misalnya pada Jalan RE Martadinata, telah dipenuhi oleh pedagang makanan khas seperti grombyang dan lontong dekem, sehingga mereka tidak bisa masuk ke Jalan RE Martadinata karena tempatnya tidak cukup, sedangkan pada ruas jalan Veteran dan Jalan Kenanga tempatnya sepi. Adapun di lapangan Sirandu tempatnya jauh dan telah banyak dihuni oleh PKL warga desa lain. (Suara Merdeka, 17 Juli 2003)

Persoalan mengenai relokasi tersebut sebenarnya sudah terjadi beberapa tahun terakhir ini setelah dikeluarkan Perda mengenai lokasi yang diperbolehkan

untuk berdagang bagi PKL. Pedagang yang dipindahkan dari alun-alun merasa keberatan karena tempat tersebut merupakan tempat yang menjanjikan bagi penghasilan mereka. Alasan yang lain adalah tempat yang disediakan di Lapangan Mulyoharjo cukup jauh dan masih sepi. Walaupun Pemerintah Kabupaten telah mengupayakan dengan dilengkapi permainan anak-anak, tetap saja sepi. Sejumlah pedagang yang menempati tempat penampungan terpaksa menutup warungnya. (Suara Merdeka, 4 Desember 2004)

Perkembangan sosial ekonomi Kota Pematang Jaya sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan sektor informal saat ini membuat Pemda harus lebih memperhatikan sektor informal dalam perencanaan pembangunan daerahnya.

1.2 Rumusan Masalah

Adanya sisi positif dan sisi negatif dari menjamurnya pedagang kaki lima menjadi suatu dilema bagi pemerintah daerah. Disamping sebagai penyangga dalam perekonomian karena merupakan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal yang seharusnya disediakan oleh Pemerintah, tetapi juga menimbulkan masalah lain berupa kebersihan, kerapian dan ketertiban kota yang terganggu sebagai akibat adanya PKL yang sering dianggap kumuh, tidak tertib dan kotor. Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya melalui Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang kaki Lima telah berupaya untuk mengatur pedagang kaki lima, yang antara lain dengan penetapan lokasi untuk para pedagang kaki lima, namun masih belum efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya PKL pada tempat-tempat yang bukan

peruntukannya. Hal ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang tepat, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan karakteristik PKL. Pengaturan yang ada pada saat ini cenderung belum memberikan ruang dan tempat yang efektif kepada PKL sehingga mereka tidak dapat lebih leluasa menjalankan aktivitasnya.

Disadari atau tidak keberadaan pedagang kaki lima dalam masyarakat adalah diperlukan. Perkembangan PKL pada Kota Pemalang saat ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah. Dengan mempelajari perilaku dari PKL maka dapat dikenali ciri-ciri dan karakteristiknya sehingga dapat dibuat perencanaan dan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik PKL sehingga pengaturan tersebut dapat diimplementasikan.

Pemda melalui Perda nomor 28 Tahun 2002 telah menetapkan lokasi bagi PKL, namun lokasi tersebut masih belum efektif yang ditandai dengan PKL yang kembali pada tempat-tempat yang dilarang. Oleh karena itu perlu dikaji keinginan PKL melalui ciri-ciri karakteristik dan preferensi pedagang kaki lima pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemda.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan maksud memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penanganan pedagang kaki lima, maka peneliti melakukan studi terhadap lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Pemda. Sehingga *research question* dalam penelitian ini adalah :

”Bagaimana karakteristik dan preferensi pedagang kaki lima pada lokasi yang telah ditetapkan Pemerintah daerah serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL tersebut? ”.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan preferensi PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi karakteristik PKL yang meliputi karakteristik umum, aktivitas usaha dan lokasi serta preferensi pedagang kaki lima.
- b. Identifikasi persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL
- c. Analisis karakteristik PKL yang mencakup karakteristik umum, aktivitas usaha dan karakteristik lokasi
- d. Analisis kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL.
- e. Analisis preferensi PKL
- f. Analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.
- g. Analisis hubungan antara preferensi PKL dengan persepsi masyarakat.
- h. Membuat rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menentukan kebijakan dalam penataan PKL.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1.4.1 Ruang Lingkup Substansial

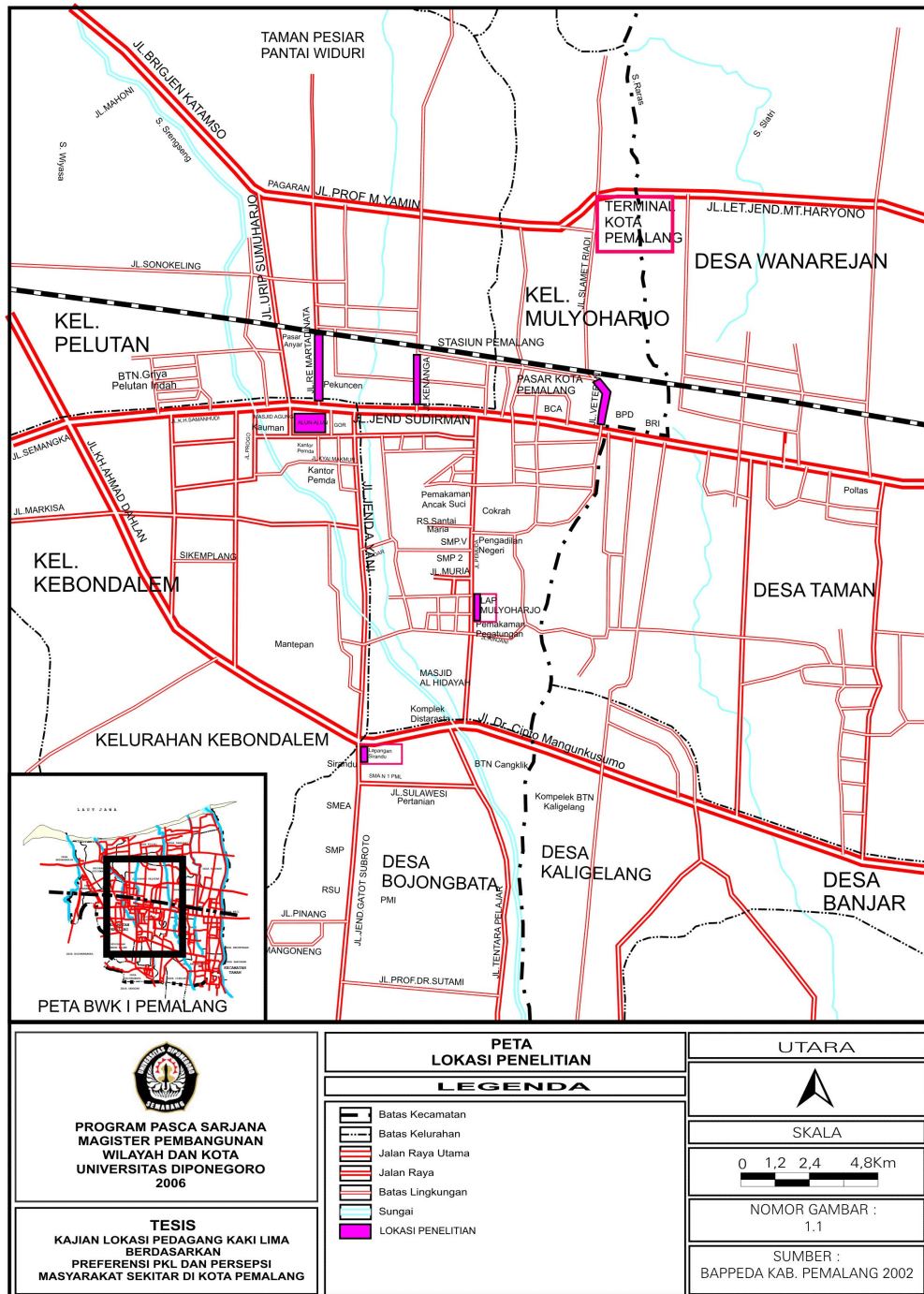
Dengan adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, serta sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini dibatasi pada kajian sebagai berikut :

1. Karakteristik pedagang kaki lima terdiri atas :
 - a. Karakteristik umum yang meliputi: umur, tingkat pendidikan, asal, jumlah pekerja, lama berdagang, modal, dan penghasilan.
 - b. Karakteristik usaha yang meliputi: jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran, pola pelayanan.
 - c. Karakteristik lokasi aktivitas yang meliputi lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang digunakan, luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi.
2. Preferensi PKL mengenai kondisi yang diinginkan dalam berdagang
3. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Masyarakat disini adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi aktivitas PKL, yang terdiri dari pemilik rumah/toko maupun pembeli bebas. Kajian ini meliputi persepsi mereka terhadap keberadaan PKL, apakah ada manfaat atau gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL, alasan berbelanja di PKL, pengelompokan PKL, perlu/tidaknya pengaturan PKL, kesesuaian lokasi PKL.
4. Analisis kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL

1.4.2 Ruang Lingkup Spasial

Wilayah yang menjadi obyek penelitian ini adalah Bagian Wilayah Kota I Kabupaten Pemalang khususnya Kecamatan Pemalang yang mempunyai sebaran pedagang kaki lima yang cukup besar.

Lokasi penelitian difokuskan pada lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Yaitu Alun-alun kota Pemalang, Jalan RE Martadinata, Jalan Kenanga, Jalan Veteran, lapangan Mulyoharjo serta lapangan Sirandu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



1.4.3 Posisi Penelitian

Berikut ini adalah posisi penelitian penulis diantara penelitian dengan tema pedagang kaki lima.

TABEL I.1
POSISI PENELITIAN

No.	Nama	Judul	Metode Penelitian
1	Ahmadi Widodo tahun 2000	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL	pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan analisis distribusi frekuensi dan analisis <i>chi square</i> .
2	Kukuh Sari Pamungkas tahun 2003	Evaluasi Kinerja Kebijakan Pengelolaan PKL di Kota Magelang	deskriptif kualitatif dan Analitic Hierarchy Process (AHP)
3	Joksen Thomas Tontey tahun 2003	Kajian Kebijakan Penataan Aktivitas PKL di Pusat Kota Manado	analisis deskriptif kuantitatif dan distribusi frekuensi serta analisis deskriptif kualitatif
4	Aulia Purnama Sari tahun 2003	Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram	analisis distribusi frekuensi dan analisis metode delphi
5	Agus Priono tahun 2004	kesediaan PKL untuk pindah ke lokasi taman di Tuk Buntung berdasarkan persepsi dan preferensi dari para pedagang kaki lima	analisis deskriptif kuantitatif dan distribusi frekuensi serta analisis deskriptif kualitatif
6	Penulis	Kajian Lokasi berdasarkan preferensi PKL dan persepsi masyarakat sekitar di Kota Pemalang	analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi, analisis tabulasi silang dengan chi kuadrat dan deskriptif kualitatif.

Sumber: Hasil Kajian, 2005

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik dan preferensi pedagang kaki lima serta persepsi masyarakat pada lokasi yang telah ditentukan oleh Pemda, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian survey dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi, analisis tabulasi silang dan deskriptif kualitatif.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan penduduk di perkotaan pada akhir-akhir ini meningkat dengan pesat. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan bertambahnya tenaga kerja, sedangkan lapangan kerja terutama sektor formal sangat terbatas. Karena terbatasnya lapangan kerja di sektor formal terbatas, maka sektor informal menjadi pilihan bagi penduduk untuk dapat mempertahankan kehidupannya. Salah satu sektor informal yang menjadi fenomena di perkotaan adalah pedagang kaki lima(PKL).

Kehadiran pedagang kaki lima menjadi dilema bagi pemerintah kota dalam menata kota. Di satu sisi pedagang kaki lima dapat menjadi pengurang beban pemerintah dalam mengurangi pengangguran, namun di sisi lain adanya pedagang kaki lima dapat menimbulkan berkurangnya ketertiban dan keindahan kota. Permasalahan tersebut hampir dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali pemerintah Kabupaten Pematang Jaya.

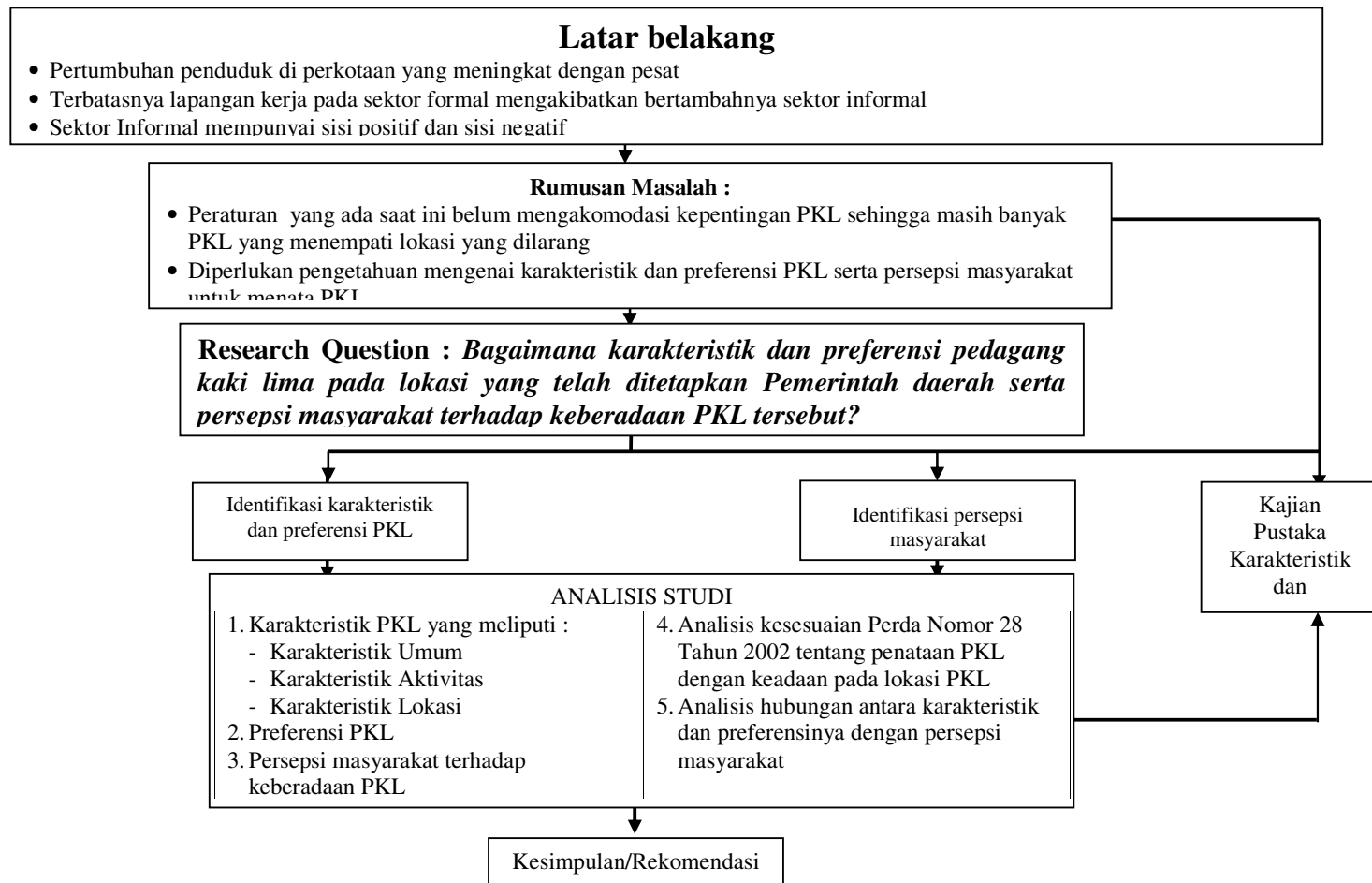
Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya sendiri telah mengadakan penataan terhadap para pedagang kaki lima, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Apabila para pedagang kaki lima tersebut direlokasi, maka seringkali hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pedagang kaki lima karena pendapatan mereka jauh berkurang.

Menurut Rachbini (1994:24) kebijaksanaan mengenai sektor informal harus diikuti pengetahuan yang baik mengenai keadaan mereka, baik motivasi maupun aspirasinya. Oleh karena itu untuk menghasilkan suatu kebijakan penataan lokasi pedagang kaki lima yang efektif perlu dilakukan studi mengenai pedagang kaki lima dengan mengetahui ciri-ciri karakteristik dan preferensi

pedagang kaki lima itu sendiri, serta persepsi masyarakat mengenai keberadaan para pedagang kaki lima.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik pedagang kaki lima serta preferensinya, dilanjutkan identifikasi persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai karakteristik PKL baik aktivitas maupun lokasinya serta preferensi dari PKL. Dilanjutkan analisis terhadap persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL. Kemudian analisis kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara preferensi PKL dengan persepsi masyarakat. Guna mendukung analisis, dilakukan kajian literatur yang berkaitan dengan karakteristik pedagang kaki lima.

Melalui pendekatan dan metode penelitian yang tepat diharapkan diakhir penelitian dapat ditemukan suatu jawaban terhadap *research question*, sehingga dapat dibuat kesimpulan dan rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam menangani penataan pedagang kaki lima. Adapun gambar kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber: Analisis Penulis, 2005

GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN STUDI

1.6 Pendekatan dan Metode Pelaksanaan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat dalam suatu kegiatan penelitian secara lebih terinci, menurut Nasir (1988: 51-52), metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Prosedur memberikan kepada peneliti urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian, sedangkan teknik penelitian memberikan alat-alat ukur apa yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian.

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan preferensi PKL pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemda, serta persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL.

Untuk mengetahui tujuan tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. (Arikunto, 2005: 234). Dalam penelitian deskriptif ditujukan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Perspektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden. (Nazir, 2003: 54-55).

Untuk lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, peneliti dapat melakukan kombinasi pendekatan kualitatif dengan kuantitatif (Singarimbun dan Effedi, 1995;9). Kedua pendekatan tersebut dapat dimanfaatkan apabila desainnya adalah memanfaatkan satu paradigma sedangkan paradigma lainnya hanya sebagai pelengkap. (Moleong, 1994;22).

1.6.2 Metode Pelaksanaan Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sistem untuk memecahkan suatu persoalan yang terdapat dalam suatu kegiatan penelitian, atau merupakan acuan pelaksanaan studi yang meliputi kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, dan teknik analisis yang digunakan.

Jenis Data

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data terhadap obyek yang diteliti dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan di kawasan penelitian. Data tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya/responden dengan cara menyebarkan kuesioner atau melakukan wawancara langsung dengan panduan kuesioner. Data-data yang ditanyakan berkaitan dengan sasaran dari penelitian ini, yaitu mengidentifikasi setiap karakteristik dari setiap obyek penelitian untuk mencapai tujuan penelitian.

Penyebaran kuesioner atau wawancara dilakukan terhadap sampel yang merupakan obyek dari penelitian, yaitu yang terdiri dari :

1. pedagang kaki lima yang beraktivitas di Kota Pemalang. Yang dimaksud pedagang kaki lima disini adalah pedagang kaki lima yang berjualan pada lokasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang,
2. masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat yang berada pada sekitar lokasi PKL baik itu pemilik rumah, pemilik toko maupun pembeli bebas.

Selain melalui kuesioner dan wawancara, pengumpulan data primer ini juga dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Dari observasi ini selain ditulis secara deskriptif mengenai aktivitas yang terjadi, juga direkam dengan kamera foto mengenai gambaran kondisi pedagang kaki lima di Kota Pemalang.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, misalnya dengan menyalin atau mengutip data dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran wilayah Kota Pemalang.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyebaran kuesioner atau wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang diajukan kepada responden. Pertanyaan dalam kuesioner

tersebut berupa pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka berisi pertanyaan yang dapat secara bebas dijawab oleh responden, sedangkan pertanyaan tertutup berisi pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan memilih alternatif jawaban yang telah disediakan.

2. Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui lokasi pedagang kaki lima. Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif juga direkam dengan kamera foto.
3. Dokumentasi, yaitu teknik untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan mencatat arsip-arsip atau data-data yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan, misalnya jumlah pedagang kaki lima, serta perundang-undangan yang mengatur pedagang kaki lima yang dapat diperoleh dari dinas atau instansi terkait.

1.6.4 Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data primer yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi atau pengamatan yang dilakukan masih merupakan data mentah. Agar data tersebut dapat lebih berguna bagi penelitian ini, diperlukan suatu pengolahan dan penyajian data sehingga dapat dilakukan analisis. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam teknik tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 *Editing*, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap data yang masuk, apakah terdapat kekeliruan dalam pengisian atau kurang lengkap, palsu, tidak sesuai dan sebagainya. *Editing* dilakukan dengan harapan akan diperoleh data yang benar-benar *valid* dan *reliable*, serta dapat dipertanggungjawabkan.

- 2 *Coding*, proses berikutnya setelah editing adalah pemberian kode. Kode diberikan pada catatan-catatan lapangan, hasil observasi, data dari dokumentasi dan jawaban pertanyaan yang diberikan responden. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan analisa, yaitu memungkinkan untuk menemukan dengan cepat dan menggolongkan seluruh bagian yang berhubungan dengan permasalahan tertentu, hipotesa, konsep maupun tema.
- 3 *Tabulating*, yang merupakan tahap memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka sehingga mudah menganalisanya. Penyajian data dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk data sekunder tidak diperlukan lagi pengolahan lebih lanjut, karena data tersebut telah disajikan secara sistematis dan untuk penyajiannya disesuaikan dengan analisis yang dilakukan.

1.6.5 Teknik Sampling

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka individu yang membentuk populasi yang akan diteliti tidak memungkinkan untuk dikenai secara keseluruhan. Oleh karena itu penelitian akan dilakukan terhadap sejumlah sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan.

Teknik sampling dan jumlah sampel yang digunakan untuk setiap obyek dalam penelitian ini adalah :

1. PKL

Untuk mengambil sampel PKL digunakan desain probabilitas dengan sampel stratifikasi, yaitu pengambilan sampel dengan cara pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu ke dalam beberapa strata (Kuncoro, 2003: 115).

Sampel diambil secara proportional yaitu sebesar 20% untuk setiap jenis dagangan pada tempat-tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sampel sebesar 20 % didasari oleh Gay dalam Umar (2001:79) yang berpendapat bahwa dalam penelitian studi deskriptif minimal membutuhkan sampel 10% dari populasi. Sedangkan menurut Arikunto (dalam Muhtar dan Widodo, 2000: 94) untuk pengambilan sampel yang cukup representatif, tergantung populasi. Jika populasi homogen, maka sampel yang diambil cukup 5 % saja, tetapi apabila populasinya heterogen, maka jumlah sampel harus dinaikkan, Donal Ary (dalam Muhtar dan Widodo 2000:94) menyarankan sejumlah 10-20%. Oleh karena penelitian ini dibatasi oleh waktu, tenaga serta biaya maka jumlah sampel PKL diambil sebanyak 20 % dari jumlah populasi yang diperkirakan 250 pada lokasi-lokasi yang ditentukan di Kota Pemalang, serta populasi yang ada dipilah menurut kategori jenis dagangannya yaitu makanan, non makanan serta jasa sehingga jumlah responden adalah sebesar 50 yang akan dirinci dengan mengacu pada lokasi studi.

TABEL I.2
JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL PKL

No	LOKASI	Jenis Usaha						Jumlah	
		Makanan		Non Makanan		Jasa			
		Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
1	Jalan Veteran	11	2	31	6	10	2	52	10
2	Lapangan Sirandu	20	4	5	1	4	1	29	6
3	Jalan R.E Martadinata	34	7	0	0	0	0	34	7
4	Lapangan Mulyoharjo	9	2	19	4	0	0	28	6
5	Alun-Alun	73	14	14	3	0	0	87	17
6	Jalan Kenanga	16	3	0	0	5	1	21	4
Jumlah		163	32	69	14	19	4	251	50

Sumber: Data primer diolah, 2005

2. Masyarakat

Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi PKL, baik pemilik rumah, pemilik toko maupun konsumen pengguna jasa PKL sebagai pembeli bebas. Jumlah sampel yang akan digunakan adalah 50 sampel. Penentuan jumlah ini didasari oleh pendapat Gay dan Diehl (dalam Kuncoro 2003:111) bahwa penelitian yang termasuk penelitian korelasional dengan tujuan untuk menguji ada atau tidak suatu hubungan maka jumlah sampel minimal yang digunakan adalah 30 sampel. Untuk lebih memudahkan diambil pembulatan menjadi 50 sampel.

Pengambilan sampel dilakukan dengan *accidental sampling*. Menurut Kusmayadi dan Sugiarto (2000:141) *accidental sampling* adalah metode pengambilan sampel tanpa perencanaan secara seksama, responden yang diminta informasi diperoleh secara kebetulan tanpa pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini masyarakat yang ditemui baik masyarakat yang sedang berbelanja pada pedagang kaki lima, maupun masyarakat yang berada di sekitar lokasi PKL.

1.6.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif* serta *deskriptif kualitatif*. Teknik *analisis kuantitatif* yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis tabulasi silang (*Cross Tabulation*). Teknik analisis yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Teknik Analisis Tabulasi Silang.

Analisis Tabulasi Silang (*cross tabulation*) dengan *chi square* untuk melihat keterkaitan antar komponen penelitian. Dalam penelitian deskriptif, analisis ini bukan semata menguji hipotesis tetapi lebih untuk menggambarkan dan bagaimana berusaha menemukan sesuatu sebagai alternatif dalam mengatasi sebuah masalah penelitian melalui prosedur ilmiah atau yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Mukhtar dan Widodo, 2000:16).

Hipotesis uji *Chi Square* yaitu :

⇒ H_o : Tidak ada hubungan antara baris dan kolom

⇒ H_i : Ada hubungan antara baris dan kolom.

Penentuan pengambilan keputusan berdasarkan :

Probabilitas (*Asymp. Sig*) :

⇒ Jika *Asymp. Sig* > 0,05 maka H_o diterima

⇒ Jika *Asymp. Sig* < 0,05 maka H_o ditolak

Coefficient Contingency untuk menghitung keeratan hubungan antar variabel, hubungan erat jika hasil hitung mendekati 1 dan lemah jika mendekati 0. (Santoso, 2002:192)

TABEL. I.3
KOMPONEN ANALISIS TABULASI SILANG(CROSS TAB)

Analisis	Komponen Terikat	Komponen Bebas
Hubungan antar karakteristik PKL	Lokasi usaha Lokasi usaha Lokasi usaha Jenis dagangan Bentuk sarana dagang	Penghasilan Ruang aktivitas Jenis usaha Bentuk sarana dagang Luas ruang

Sumber: Data primer diolah, 2005

B. Teknik Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis Deskriptif Kualitatif dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap sumber data terkait, bersifat deskriptif, yaitu menyusun dan menginterpretasikan data-data penelitian melalui uraian, penjelasan dan pengertian-pengertian

TABEL I.4
SASARAN, ANALISIS, JENIS DATA, SUMBER DATA, DAN TEKNIK ANALISIS

No	Sasaran	Analisis	Variabel data	Jenis Data	Sumber data	Teknik Analisis
1.	Mengetahui karakteristik PKL	• Analisis karakteristik umum PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Umur • Pendidikan • Asal • Jumlah Pekerja • Lama Berdagang • Modal • Penghasilan 	Data primer dengan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi lapangan • Responden PKL 	Deskriptif kuantitatif
		• Analisis karakteristik aktivitas usaha PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dagangan • Bentuk sarana dagang • Pola penyebaran • Pola Pelayanan 	Data primer dengan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi lapangan • Responden PKL 	Deskriptif kuantitatif
		• Analisis karakteristik lokasi aktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • lokasi aktivitas • Luas tempat usaha • Alasan pemilihan lokasi 	Data primer dengan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi lapangan • Responden PKL 	Deskriptif kuantitatif
		• Analisis keterkaitan antar karakteristik PKL	Lokasi usaha>< Penghasilan Lokasi usaha><Tempat jualan Lokasi usaha><Jenis dagangan Jenis dagangan><Bentuk sarana dagang Bentuk sarana dagang >< Luas ruang	Data primer dengan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Responden PKL 	Deskriptif kuantitatif dengan tabulasi silang

lanjutan:

No	Sasaran	Analisis	Variabel data	Jenis Data	Sumber data	Teknik Analisis
2.	Mengetahui preferensi PKL terhadap kondisi yang diinginkan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis preferensi PKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaturan PKL • Hal yang perlu diatur • Fasilitas umum yang perlu ditambah • Kesesuaian Lokasi PKL 	Data primer dengan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi lapangan • Responden PKL 	Deskriptif kuantitatif
3.	Mengetahui persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan berbelanja • Manfaat PKL • Gangguan yang ada • Pengelompokan PKL • Pengaturan PKL • Hal yang perlu diatur • Fasilitas umum yang perlu ditambah • Kesesuaian Lokasi PKL 	Data primer dengan kuesioner	<ul style="list-style-type: none"> • Responden masyarakat 	Deskriptif kuantitatif
4.	Mengetahui kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL 	<ul style="list-style-type: none"> • Perda No. 28 Tahun 2002 	Data sekunder Observasi lapangan		Deskriptif kualitatif
5.	Mengetahui hubungan antara preferensi PKL dan persepsi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis hubungan antara preferensi PKL dan persepsi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • preferensi PKL • persepsi masyarakat 			Deskriptif kualitatif

Sumber: Hasil analisis, 2006

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini , sistematika penulisan yang dipergunakan adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, sasaran penelitian, ruang lingkup substansial dan spasial, kerangka penelitian, pendekatan dan metodologi penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, kebutuhan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan penyajian data, teknik sampling dan teknik analisis data serta sistematika penelitian.

BAB II : KARAKTERISTIK DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA SERTA PERSEPSI MASYARAKAT

Merupakan studi literatur yang berisi kajian teori yang akan digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan studi yang menjadi pertanyaan penelitian. Yang antara lain berisi konsep sektor informal, pedagang kaki lima sebagai salah satu kegiatan ekonomi sektor informal, pengertian persepsi dan preferensi, rangkuman kajian teori serta instrumen penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEMALANG

Berisi kondisi geografis Kabupaten Pemalang, kebijakan dan strategi pengembangan RUTR kota Pemalang, Peran dan fungsi, fasilitas perkotaan, perkembangan jumlah penduduk, pedagang kaki lima di kota Pemalang serta kebijakan pemerintah kabupaten Pemalang terhadap PKL.

BAB IV : KAJIAN LOKASI PKL BERDASARKAN PRFERENSI PKL SERTA PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR DI KOTA PEMALANG

Pada bab ini berisi analisis mengenai karakteristik PKL, preferensi PKL terhadap lokasi serta persepsi masyarakat mengenai keberadaan PKL. Kemudian analisis mengenai kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL. Dilanjutkan dengan analisis mengenai hubungan antara karakteristik PKL dengan lokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Analisis didasarkan pada data hasil survai primer terhadap responden PKL dan responden masyarakat dan juga data sekunder dari pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini berisi temuan penelitian yang kemudian dibuat kesimpulan untuk menjawab *reseach question* yang dikemukakan sebelumnya. Dari kesimpulan tersebut dibuat rekomendasi yang ditujukan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang yang berupa saran-saran dalam menetapkan kebijakan-kebijakan tentang pengaturan PKL yang sesuai dengan karakteristik serta preferensi PKL dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL tersebut.

BAB II

KARAKTERISTIK DAN PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA SERTA PERSEPSI MASYARAKAT

2.1 Konsep Sektor Informal

2.1.1 Pengertian Sektor Informal

Gagasan sektor informal dilontarkan pertama kali oleh seorang antropolog asal Inggris yaitu Keith Hart, dalam tulisannya yang diterbitkan tahun 1971, setelah melakukan penelitian kegiatan penduduk di kota Accra dan Nima, Ghana. Istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan sejumlah aktivitas tenaga kerja yang berada diluar pasar tenaga kerja formal yang terorganisir. Dikatakan “diluar pasar” karena sektor ini termasuk kelompok yang tidak permanen atau tidak ada jaminan tentang keberlangsungan pekerjaan yang dimilikinya Kelompok informal menggunakan teknologi produksi yang sederhana dan padat karya, tingkat pendidikan dan ketrampilan terbatas dan dilakukan oleh anggota keluarga.

Istilah sektor informal semakin populer setelah ILO (*International Labour Organization*) melakukan penelitian di Kenya dan kemudian melanjutkan penelitiannya tersebut ke negara-negara berkembang lainnya. Pada penelitian tersebut istilah sektor informal dipergunakan sebagai pendekatan untuk membedakan tenaga kerja yang tergolong dalam dua kelompok yang berlainan sifatnya (Manning dan Effendi, 1996: 75).

Jan Bremen (dalam Manning dan Effendi, 1996: 138-140) memperjelas pengertian sektor informal dengan menyatakan bahwa sektor informal menunjukkan fenomena perbedaan dua kegiatan yang mempunyai ciri-ciri yang

berlawanan. Tenaga kerja formal adalah yang bergaji dalam suatu pekerjaan yang permanen. Sifat semacam ini biasanya dimiliki oleh kegiatan yang saling berhubungan dalam suatu sistem yang terjalin dengan organisasi yang baik. Pada umumnya mereka yang terikat dalam kontrak kerja kelompok ini mempunyai syarat-syarat bekerja yang dilindungi oleh hukum. Di lain pihak, mereka yang berada di luar kelompok ini dinamakan sektor informal.

Studi mendalam tentang sektor informal di Indonesia dilakukan oleh Hans Dieter-Evers, yang menganalogikan sektor ini sebagai bentuk ekonomi bayangan dengan negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai berbagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan ini merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsisten yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang ada di lingkungan sektor informal (Rachbini dan Hamid, 1994: 3).

Menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 2002: 24) pengertian sektor formal diberikan sebagai sektor yang terdiri dari unit usaha yang telah memperoleh berbagai proteksi ekonomi dari pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah unit-unit usaha yang tidak memperoleh proteksi pemerintah dan sektor yang belum mempergunakan bantuan atau fasilitas pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia. Kriteria adanya *accessibility* terhadap suatu fasilitas

yang disediakan pemerintah adalah yang dipakai sebagai ukuran untuk membedakan usaha sektor formal dan informal.

Sektor informal muncul ke permukaan karena sektor formal tidak memberikan ruang lingkup yang cukup sehingga kegiatan ekonomi berlangsung di luar sektor yang terorganisir. Sektor yang utamanya diisi oleh golongan yang kurang mampu ini terlihat makin menjamur di negara-negara sedang berkembang. Karena kegiatannya dipandang ilegal, maka para pengamat menamakan kegiatan ini sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah atau sering disebut *underground economy* (Rachbini dan Hamid, 1994: 25).

Dari beberapa penjelasan mengenai sektor informal diatas, dapat disimpulkan bahwa sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya bersifat sederhana dan menggunakan sistem kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah, dan dalam aktivitasnya tidak diperlukan ketrampilan khusus.

2.1.2 Ciri-ciri Sektor Informal

Menurut Todaro (2000: 351-352) ciri-ciri sektor informal disebutkan sebagai berikut:

1. Sebagian besar memiliki produksi yang berskala kecil, aktifitas-aktifitas jasa dimiliki oleh perorangan atau keluarga, dan dengan menggunakan teknologi yang sederhana.
2. Umumnya para pekerja bekerja sendiri dan sedikit yang memiliki pendidikan formal.

3. Produktifitas pekerja dan penghasilannya cenderung lebih rendah daripada di sektor formal.
4. Para pekerja di sektor informal tidak dapat menikmati perlindungan seperti yang didapat dari sektor formal dalam bentuk jaminan kelangsungan kerja, kondisi kerja yang layak dan jaminan pensiun.
5. Kebanyakan pekerja yang memasuki sektor informal adalah pendatang baru dari desa yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di sektor formal.
6. Motivasi mereka biasanya untuk mendapatkan penghasilan yang bertujuan hanya untuk dapat bertahan hidup dan bukannya untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya mengandalkan pada sumber daya yang ada pada mereka untuk menciptakan pekerjaan.
7. Mereka berupaya agar sebanyak mungkin anggota keluarga mereka ikut berperan serta dalam kegiatan yang mendatangkan penghasilan dan meskipun begitu mereka bekerja dengan waktu yang panjang.
8. Kebanyakan diantara mereka menempati gubuk-gubuk yang mereka buat sendiri di kawasan kumuh (*slum area*) dan permukiman liar (*schelter*) yang umumnya kurang tersentuh pelayanan jasa seperti listrik, air, transportasi serta jasa-jasa kesehatan dan pendidikan.

Mengenai sektor informal di Indonesia, menurut Hidayat (1978, dalam Widodo, 2002: 26) dari segi karakteristiknya sektor informal mempunyai ciri-ciri

sebagai berikut, yaitu:

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisir secara baik, karena timbulnya unit usaha tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal;
2. Pada umumnya tidak mempunyai izin;
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerja;
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
5. Satuan usaha yang mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lainnya;
6. Teknologi yang dipakai masih bersifat sangat sederhana;
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil sehingga skala operasinya juga kecil;
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
9. Pada umumnya satuan usaha termasuk dalam golongan *one man enterprises* dan kalau mengerjakan buruh biasanya berasal dari keluarga;
10. Sumber dan modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi;
11. Hasil produksi atas jasa tertentu dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota/desa yang berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah.

Menurut Wirosardjono (dalam Sari, 2003:27) ciri-ciri sektor informal disebutkan antara lain:

1. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaan.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kegiatannya sering dikatakan “liar”.
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
4. Tidak mempunyai tempat tetap.
5. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.
6. Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus, sehingga dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga.
7. Umumnya satuan usaha mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
8. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan, dan sebagainya.

Menurut Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 230) diantara berbagai usaha sektor informal adalah usaha PKL, tampaknya merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di kota. Kekhususan tersebut dikarenakan usaha ini relatif paling mudah dimasuki serta berhadapan langsung dengan kebijaksanaan perkotaan.

2.2 Pedagang Kaki Lima Sebagai Salah Satu Kegiatan Ekonomi Sektor Informal

2.2.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor informal (Dorodjatun Kuntjoro Jakti, 1986). Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota.

Dari pengertian tersebut, yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.

Istilah kaki lima berasal dari trotoar yang dahulu berukuran lebar 5 *feet* atau sama dengan kurang lebih 1,5 meter, sehingga dalam pengertian ini PKL adalah pedagang yang berjualan pada kaki lima, dan biasanya mengambil tempat atau lokasi di daerah keramaian umum seperti trotoar di depan pertokoan/kawasan perdagangan, pasar, sekolah dan gedung bioskop (Fakultas Ekonomi Unpar, 1980, dalam Widodo, 2000: 27).

Namun pengertian tentang pedagang kaki lima terus berkembang sehingga sekarang menjadi kabur artinya. Mereka tidak lagi berdagang di atas trotoar saja, tetapi disetiap jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang

terbuka, taman-taman, terminal bahkan di perempatan jalan dan berkeliling ke rumah-rumah penduduk (Fakultas Teknik Unpar, 1980, dalam Sari, 2003: 27).

Mc. Gee dan Yeung (1977: 25) memberikan pengertian pedagang kaki lima sama dengan *hawker*, yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar. Dalam pengertian ini termasuk juga orang yang menawarkan barang dan jasanya dari rumah ke rumah.

2.2.2 Karakteristik Aktivitas PKL

2.2.2.1 Jenis Dagangan PKL

Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83), jenis dagangan PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas yang ada di sekitar kawasan dimana pedagang tersebut beraktivitas. Misalnya di suatu kawasan perdagangan, maka jenis dagangan yang ditawarkan akan beranekaragam, bisa berupa makanan/minuman, barang kelontong, pakaian, dan lain-lain.

Adapun jenis dagangan yang ditawarkan oleh PKL dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok utama , yaitu:

1. Makanan yang tidak dan belum diproses, termasuk didalamnya makanan mentah, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran.
2. Makanan yang siap saji, seperti nasi dan lauk pauknya dan juga minuman.
3. Barang bukan makanan, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa, yang terdiri dari beragam aktivitas, misalnya tukang potong rambut dan lain sebagainya.

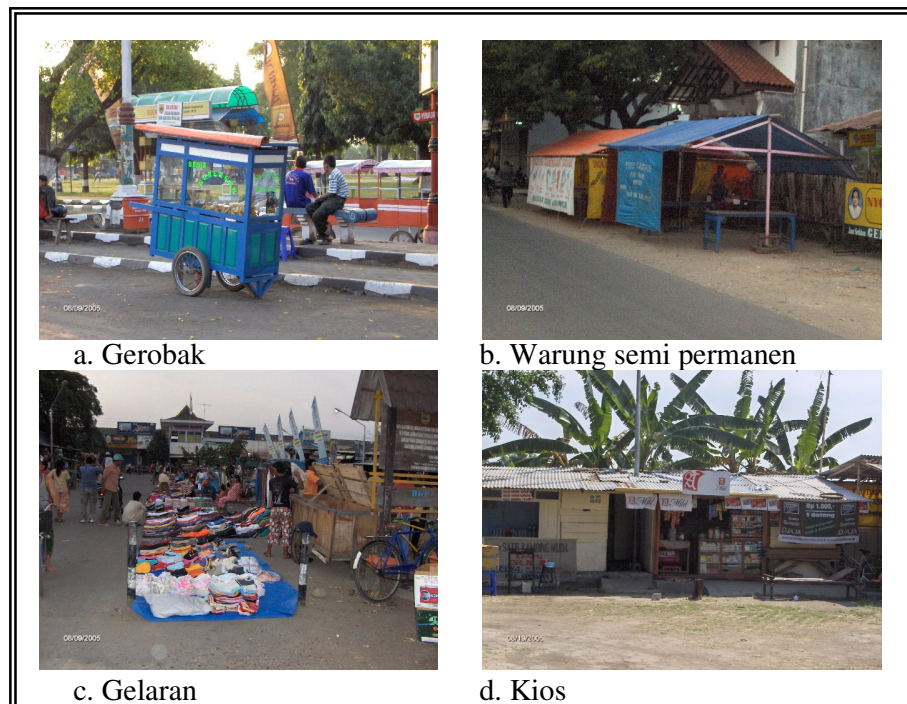
2.2.2.2 Bentuk Sarana Perdagangan PKL

Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para PKL dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gee dan Yeung (1977: 82-83) di kota-kota di Asia Tenggara diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh PKL menurut Waworoentoe (1973, dalam Widjajanti, 2000: 39-40) adalah sebagai berikut:

1. Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas PKL yang permanen (*static*) atau semi permanen (*semi static*), dan umumnya dijumpai pada PKL yang berjualan makanan, minuman, dan rokok.
2. Pikulan/keranjang, bentuk sarana perdagangan ini digunakan oleh PKL keliling (*mobile hawkers*) atau semi permanen (*semi static*), yang sering dijumpai pada PKL yang berjualan jenis barang dan minuman. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah dibawa atau dipindah tempat.
3. Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air.

Berdasarkan sarana usaha tersebut, PKL ini dapat dikategorikan pedagang permanen (*static*) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.

4. Kios, bentuk sarana PKL ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal di tempat tersebut. PKL ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (*static*).
5. Gelaran/alas, PKL menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (*semi static*). Umumnya dapat dijumpai pada PKL yang berjualan barang kelontong dan makanan.



Sumber: Hasil Observasi, 2005

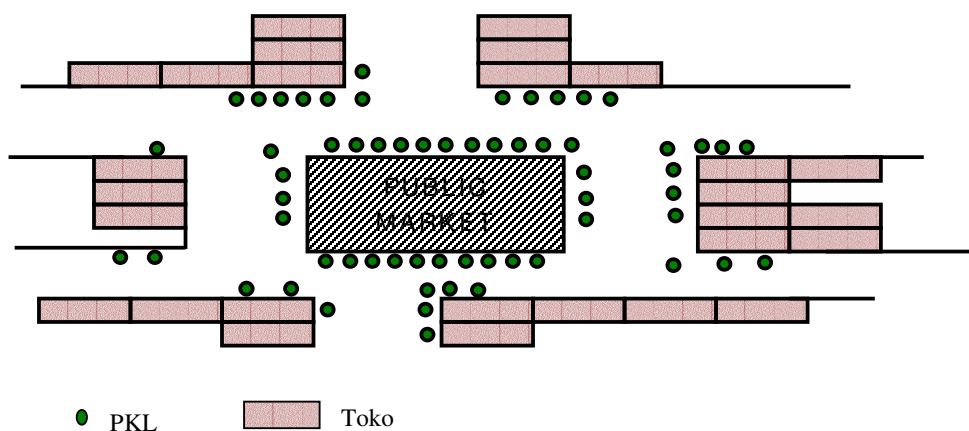
GAMBAR 2.1
BERBAGAI MACAM BENTUK DAN SARANA BERDAGANG PKL

2.2.2.3 Pola penyebaran PKL

Berdasarkan pola penyebarannya, aktivitas PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 36-37) dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) pola, yaitu:

1. Pola Penyebaran Mengelompok (*Focus Agglomeration*)

Pedagang informal pada tipe ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, taman-taman dan lain sebagainya merupakan lokasi-lokasi yang banyak diminati oleh sektor ini. Pola penyebaran seperti ini biasanya banyak dipengaruhi oleh adanya pertimbangan aglomerasi, yaitu suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang sejenis atau pedagang yang mempunyai sifat komoditas yang sama atau saling menunjang. Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.

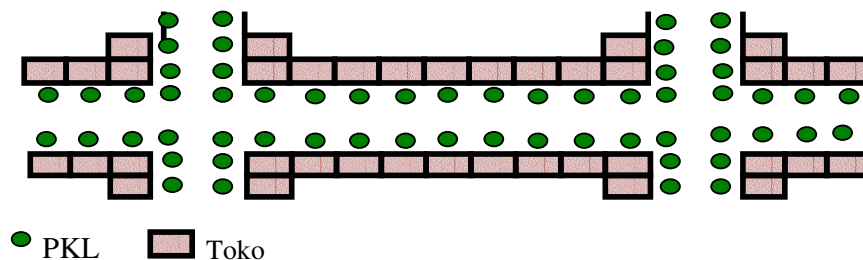


Sumber: Mc. Gee dan Yeung (1977: 37)

GAMBAR 2.2
POLA PENYEBARAN MENGELOMPOK (*FOCUS AGGLOMERATION*)

2. Pola Penyebaran Memanjang (*Linier Concentration*)

Pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi pedagang informal itu sendiri, hal ini sangat menguntungkan, sebab dengan menempati lokasi yang beraksesibilitas tinggi akan mempunyai kesempatan yang tinggi dalam meraih konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah pakaian, kelontong, jasa reparasi, buah-buahan, rokok/obat-obatan, dan lain-lain.



Sumber: Mc. Gee dan Yeung (1977: 37)

GAMBAR 2.3
POLA PENYEBARAN MEMANJANG (*LINIER CONCENTRATION*)

Dari pendapat Mc. Gee dan Yeung tersebut dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas.

2.2.2.4 Pola Pelayanan Aktivitas PKL

Pola pelayanan menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 76) adalah cara berlokasi aktivitas PKL dalam memanfaatkan ruang kegiatan sebagai tempat

usaha. Berdasarkan pola pelayanan ini, aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan, dan waktu pelayanan.

A. Sifat Pelayanan PKL.

Berdasarkan sifat pelayanannya, PKL menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 82) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pedagang menetap (*static*).

Pedagang menetap adalah suatu bentuk layanan yang mempunyai cara atau sifat menetap pada suatu lokasi tertentu. Dalam hal ini setiap pembeli atau konsumen harus datang sendiri ke tempat pedagang dimana ia berada. Sarana fisik berdagang dengan sifat seperti ini biasanya berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

2. Pedagang semi menetap (*semi static*).

Pedagang semi menetap merupakan suatu bentuk layanan pedagang yang mempunyai sifat menetap yang sementara, yaitu hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini PKL akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli yang cukup besar. Biasanya pada saat bubar bioskop, para pegawai masuk/keluar kantor atau saat ramainya pengunjung di pusat kota. Apabila tidak ada kemungkinan pembeli yang cukup besar, maka pedagang tersebut berkeliling. Dengan kata lain ciri utama PKL yang memilih pola pelayanan seperti ini adalah adanya pergerakan PKL yang menetap pada suatu lokasi pada periode tertentu, setelah waktu berjualan selesai (pada sore atau malam hari). Adapun sarana fisik yang dipergunakan untuk berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

3. Pedagang keliling (*mobile*).

Pedagang keliling yaitu suatu bentuk layanan pedagang yang dalam melayani konsumennya mempunyai sifat yang selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya pedagang yang mempunyai sifat ini adalah pedagang yang mempunyai volume dagangan yang kecil. Aktivitas PKL dalam kondisi ini ditunjukkan dengan sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa. Dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan mereka adalah kereta dorong dan pikulan/keranjang.



Sumber: Hasil Observasi dan KKL 2005

GAMBAR 2.4
SIFAT PELAYANAN PKL

B. Golongan Pengguna Jasa PKL

Golongan pengguna jasa yang dilayani oleh aktivitas jasa PKL pada umumnya terdiri dari golongan pendapatan menengah dan rendah. Hal ini disebabkan karena harga yang ditawarkan oleh pedagang sektor informal relatif lebih rendah sehingga terjangkau bagi golongan pendapatan rendah sekalipun. Sedangkan bagi golongan berpendapatan tinggi ada kecenderungan untuk tidak mengunjungi lokasi aktivitas PKL, terutama untuk jenis barang dagangan bukan makanan. Pertimbangannya adalah dari segi kualitas barang yang biasanya lebih rendah, adanya kemungkinan penipuan dalam hal kualitas barang, dan sebagainya, sehingga golongan ini lebih memilih untuk berbelanja di toko atau supermarket. Selain alasan tersebut, dari sisi psikologis ada kecenderungan gaya hidup masyarakat kota yang selalu ingin menjaga gengsi, sehingga mereka lebih percaya diri apabila berbelanja di tempat-tempat yang dapat mewakili status mereka. Walaupun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa masyarakat berpendapatan menengah ke atas mendatangi lokasi aktivitas perdagangan sektor informal, tetapi ini terjadi sekali waktu atau bersifat insidental.

Rachbini dan Hamid (1994: 92) menyatakan bahwa dari sekitar dua juta buruh atau pegawai sektor formal (swasta maupun negeri) di Jakarta kurang lebih satu setengah juta membeli makanan dari sektor informal. Hanya dengan cara ini mereka dapat bertahan dalam kondisi gaji di sektor formal yang rata-rata rendah. Kondisi ini juga menunjukkan adanya hubungan antara sektor formal dan informal.

C. Skala Pelayanan Aktivitas PKL

Skala pelayanan suatu aktivitas jasa pedagang sektor informal dapat diketahui dari asal pengguna jasa. Besar kecilnya skala pelayanan tergantung dari jauh dekatnya pengguna jasa tersebut. Semakin dekat asal pengguna, maka skala pelayanan semakin kecil, sebaliknya semakin jauh asal pengguna jasa tersebut, maka skala pelayanan semakin besar (Manning dan Effendi, 1996: 366-372).

D. Waktu Pelayanan Aktivitas PKL

Mc Gee dan Yeung (1977: 76) menyatakan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Temuan ini didasarkan pada penelitiannya terhadap “*hawkers*” di kota-kota Asia Tenggara.

Saat teramai pada suatu waktu pelayanan dipengaruhi oleh orientasi jasa terhadap pusat-pusat kegiatan disekitarnya. Saat teramai bagi aktivitas pedagang sektor informal di dekat pusat-pusat perbelanjaan akan berbeda dengan saat-saat teramai di dekat kawasan wisata, kawasan permukiman, kawasan perkantoran, dan sebagainya.

2.2.3 Karakteristik Lokasi PKL

Pembangunan suatu tempat bagi kegiatan perdagangan sangat tergantung pada lokasi. Begitu pula halnya dengan munculnya kegiatan perdagangan sektor

informal. Aktivitas sektor ini akan muncul mendekati lokasi-lokasi strategis, dimana terdapat tingkat kunjungan tinggi. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi dari pemasaran, yaitu mendekatkan komoditi pada konsumen (*place utility*). Oleh karena aktivitas kegiatan perdagangan sektor informal akan hadir di lokasi-lokasi keramaian seperti pada kawasan perdagangan, perkantoran, pendidikan, perumahan, dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 232) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai pedagang sektor informal di Cali, Colombo, bahwa para pedagang sektor informal dijumpai di semua sektor kota, terutama berpusat di tengah kota dan pusat-pusat hiburan lainnya ketika ada pertunjukkan, sehingga menarik sejumlah besar penduduk.

Adanya kecenderungan penggunaan ruang kota bagi aktivitas usaha PKL ini tidak lepas dari adanya keberadaan sektor formal di suatu lokasi. Atau dengan kata lain adalah ada interaksi ekonomi antara sektor formal (perkantoran dan pertokoan) dengan sektor informal (PKL). Rachbini dan Hamid (1994: 90-91) dalam observasinya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya menemukan adanya kecenderungan bahwa setiap berdirinya gedung bertingkat di Jalan Sudirman Jakarta dapat disaksikan sejumlah PKL berderet sepanjang jalan. Mereka melayani para karyawan atau pegawai bergaji rendah.

Mc. Gee dan Yeung (1977: 61) menyatakan bahwa pada umumnya PKL cenderung untuk berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas aktivitas yang tinggi, seperti pada simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang terbuka.

Shirvani (1985: 37) menyatakan bahwa aktivitas PKL di perkotaan merupakan pendukung aktivitas (*activity support*) dari aktivitas-aktivitas yang ada. Aktivitas-aktivitas tersebut timbul karena adanya aktivitas-aktivitas fungsional kota.

Berdasarkan pemanfaatan ruang, aktivitas sektor informal PKL pada umumnya menempati ruang umum dan ruang privat atau pribadi yang ada. Ruang umum merupakan jenis ruang yang dimiliki pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Contoh dari ruang umum adalah taman kota, trotoar, ruang terbuka, lapangan, dan sebagainya. Termasuk pula fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana yang terdapat di ruang umum tersebut, seperti halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya. Sedangkan ruang privat atau pribadi adalah jenis ruang yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Misalnya lahan pribadi yang dimiliki oleh pemilik pertokoan, perkantoran, dan sebagainya. Karena penggunaan ruang-ruang inilah yang akhirnya menimbulkan *conflict of interest*, karena lahan tersebut seharusnya dipergunakan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan, tidak saja bagi pelaku sektor informal.

Suatu studi yang dilakukan oleh Joedo (1977, dalam Widjajanti, 2000: 35) berkaitan dengan lokasi yang diminati aktivitas perdagangan sektor informal, diketahui beberapa ciri sebagai berikut:

1. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama sepanjang hari. Ciri ini bisa kita jumpai di lokasi-lokasi perdagangan, pendidikan, dan perkantoran.
2. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat kegiatan-kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering

dikunjungi dalam jumlah besar. Kondisi ini merupakan ciri dari suatu lokasi-lokasi wisata atau ruang-ruang rekreatif kota, seperti taman-taman kota dan lapangan olah raga yang biasa ramai di hari libur.

3. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit.
4. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Pilihan Ruang Aktivitas PKL

Sudah merupakan fenomena yang umum terjadi bila kita melihat trotoar dan bahu jalan, terutama di lokasi keramaian kota, dipenuhi oleh pelaku sektor informal PKL, yang menggunakannya sebagai tempat melakukan aktivitas usahanya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 236) terjadi karena PKL dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa yang dijual terlihat oleh pembeli. Oleh karena itu mereka akan memilih lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu lokasi yang merupakan lokasi aktivitas masyarakat. Sehingga dapat kita jumpai kehadiran PKL di sekitar lokasi aktivitas perdagangan, pendidikan, perkantoran, dan aktivitas sosial masyarakat lainnya. Dalam teori lokasi juga disebutkan bahwa bagi pedagang terdapat kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam menentukan lokasi tempat usaha (Djojodipuro, 1992: 30).

Ciri atau karakteristik tersebut diatas adalah bagian dari strategi pemasaran. Pemasaran menurut William J. Stanton (dalam Ambarwaty, 2003: 50)

merupakan suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Disamping faktor lokasi yang strategis dalam arti dekat dengan keramaian atau mudah dijangkau pembeli, PKL juga memperhitungkan faktor kedekatan (*proximity*). Dean Forbes (dalam Manning dan Effendi, 1996: 348), dari hasil penelitiannya mengenai PKL di Ujung Pandang, menyatakan bahwa ada variasi pemusatan-pemusatan ruang dalam PKL di kota Ujung Pandang yang disebabkan oleh hubungan yang kompleks antara suplai pekerja, keperluan produksi, perilaku pemasaran, dan sarana serta prasarana transportasi. Perlunya lokasi produksi dan pemasaran dekat dengan sumber bahan baku telah mendorong munculnya pemusatan sektor informal PKL.

Rachbini dan Hamid (1994: 101) berdasarkan hasil penelitiannya mengenai PKL di Jakarta dan Surabaya mengemukakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara tingkat mobilitas tempat usaha dengan mobilitas tempat tinggal. Artinya mobilitas tempat tinggal terjadi karena mobilitas tempat usaha dan bukan sebaliknya. Massa pedagang dan jasa informal harus mengikuti dan bertempat tinggal dimana saja dan kemana gerobak alat dagangannya itu akan dipangkalkan. Mereka harus dekat dengan tempat usahanya, jika tidak mereka akan dililit oleh masalah ongkos transportasi dan kesulitan-kesulitan lain yang menyangkut cara membawa dan menyimpan alat-alat usahanya.

Dalam teori lokasi yang mengemukakan tentang transportasi disebutkan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum (Djojodipuro, 1992: 30). Hal ini berkait pula dengan ketersediaan sarana transportasi, baik bagi PKL bersangkutan maupun bagi pembeli/konsumen. Aktivitas perekonomian kota umumnya merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku kegiatan.

Penempatan lokasi kegiatan ekonomi yang tidak mudah dijangkau, dalam arti sarana transportasi yang tersedia kurang/tidak memadai merupakan faktor penyebab kegagalan bagi pelaku yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu seringkali relokasi PKL yang dilakukan oleh Pemerintah kurang mendapat respon yang baik, karena tidak didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk sarana transportasi. Tempat baru tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai lokasi bagi aktivitas perdagangan. Akhirnya PKL yang diberi lokasi baru tersebut kembali ke lokasi yang lama (Kompas, 5 Juni 2001).

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan pilihan lokasi bagi aktivitas usahanya, para PKL akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya orientasi kepada konsentrasi konsumen, dalam arti PKL akan memilih lokasi sedekat mungkin dengan konsumennya.
2. Adanya pertimbangan terhadap faktor kedekatan lokasi, baik dengan pusat kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan baku, permukiman penduduk terdekat.
3. Adanya pertimbangan terhadap kemudahan transportasi.

2.3 Pengertian Persepsi dan Preferensi

Persepsi adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *perceive* yang berarti melihat atau mengamati (Wojowasito dalam Priono 2004:42), sedangkan menurut Mahyong (dalam Priono 2004:42) persepsi berasal dari kata dasar bahasa Inggris *perceive* yang dapat diartikan merasa, mengerti juga memahami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:863) persepsi diartikan sebagai proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. Selanjutnya dalam penelitian ini persepsi masyarakat dapat diartikan sebagai proses untuk mengetahui, merasa dan memahami PKL melalui hasil pengamatan pancainderanya.

Preferensi adalah istilah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris *preference* yang dapat diartikan sebagai lebih menyukai/memilih (Wojowasito dalam Priono 2004:42). Menurut kamus online (www.kamus-online.com) *preference* dapat diartikan sebagai simpati, pilihan dan sesuatu yang lebih disukai. Sehubungan dengan penelitian ini, maka preferensi dapat diartikan sebagai pilihan yang lebih disukai oleh subjek (PKL) terhadap suatu objek (aktivitas dan lokasi yang diinginkan PKL).

2.4 Rangkuman Kajian Teori

Berdasarkan beberapa kajian teori yang telah disampaikan, maka dapat dirangkum beberapa hal sebagai berikut:

1. Sektor informal merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil, tidak memiliki legalitas hukum, pola usahanya sederhana dan menggunakan sistem

kekeluargaan, dilakukan oleh dan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah dan tidak diperlukan ketrampilan khusus dalam aktivitasnya.

2. PKL merupakan salah satu usaha sektor informal yang merupakan pekerjaan khas dalam sektor informal perkotaan. Yang merupakan sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk dijual pada ruang publik, terutama di pinggir jalan dan trotoar
3. PKL memiliki karakteristik yang hampir sama dengan sektor informal pada umumnya
4. Yang merupakan karakteristik aktivitas PKL adalah:
 - a. Jenis Dagangan

Meliputi makanan yang belum/tidak diproses, makan siap saji, barang bukan makanan dan jasa.
 - b. Bentuk Dan Sarana Perdagangan PKL

Bentuk dan sarana perdagangan PKL yang digunakan adalah gerobak/kereta dorong, pikulan/keranjang, warung semi permanen, kios dan gelaran/alas.
 - c. Pola Penyebaran PKL

Menurut pola penyebarannya PKL dapat dikelompokkan menjadi PKL dengan pola penyebaran mengelompok dan PKL dengan pola penyebaran memanjang.
 - d. Pola Pelayanan

Berdasarkan pola pelayanan aktivitas PKL dapat ditinjau dari aspek sifat, golongan pengguna jasa, skala pelayanan dan waktu pelayanan.

5. PKL dalam memilih suatu lokasi biasanya akan memilih lokasi yang berada pada ruang-ruang kota yang cukup strategis dalam arti dekat dengan keramaian atau mudah dijangkau pembeli.
6. PKL dalam memilih suatu lokasi untuk aktivitasnya akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu: orientasi kepada konsentrasi konsumen, pertimbangan terhadap kedekatan lokasi baik dengan pusat kegiatan masyarakat, tempat tinggal, sumber bahan baku dan pemukiman penduduk serta adanya kemudahan dalam transportasi
7. Persepsi masyarakat adalah proses untuk mengetahui, merasa dan memahami PKL melalui hasil pengamatan pancainderanya
8. Preferensi PKL adalah pilihan yang lebih disukai oleh PKL terhadap aktivitas dan lokasi.

2.5 Instrumen Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka variabel-variabel yang digunakan sebagai instrumen penelitian adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik PKL yaitu:
 - d. Karakteristik umum yang meliputi: umur, tingkat pendidikan, asal, jumlah pekerja, lama berdagang, modal, dan penghasilan.
 - e. Karakteristik usaha yang meliputi: jenis dagangan, bentuk sarana dagang, pola penyebaran, pola pelayanan.
 - f. Karakteristik lokasi aktivitas yang meliputi lokasi aktivitas, status ruang aktivitas, jenis ruang yang digunakan, luas ruang yang digunakan, alasan pemilihan lokasi.

2. Preferensi PKL mengenai kondisi yang diinginkan dalam berdagang, meliputi pengelompokan PKL, pendapat perlu/tidaknya pengaturan PKL, hal apa yang perlu diatur dan fasilitas umum apa yang perlu ditambah..
3. Persepsi masyarakat terhadap keberadaan PKL, meliputi persepsi mereka terhadap keberadaan PKL, apakah ada manfaat atau gangguan yang ditimbulkan oleh keberadaan PKL, alasan berbelanja di PKL, pengelompokan PKL, pendapat perlu/tidaknya pengaturan PKL, apa saja yang diatur dan fasilitas umum apa yang perlu ditambah..

BAB III

GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEMALANG

3.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang terletak di bagian utara dan barat wilayah provinsi Jawa Tengah, luas kabupaten ini adalah 111.530 Ha. Secara geografis wilayah ini terletak pada $109^{\circ} 17' 30''$ BT– $109^{\circ} 40' 30''$ BT dan $8^{\circ} 52' 30''$ LS - $7^{\circ} 20' 11''$.

Kabupaten Pemalang, sebagaimana kota-kota di Pantai Utara Jawa mengalami pertumbuhan yang cepat. Hal ini didukung oleh faktor adanya jalur utara jawa, baik berupa jalan raya maupun jalur rel kereta api yang menghubungkan Kota Jakarta dengan Surabaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang tahun 2002-2012, kawasan yang tingkat pertumbuhannya cepat di Kabupaten Pemalang menurut kawasannya ada 2 (dua) yaitu Kota Pemalang di wilayah bagian utara dan Bantarbolang di wilayah bagian selatan. Keduanya tergolong memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat dibandingkan dengan kota-kota disekelilingnya, yang dapat dijadikan potensi pendorong/pemancing pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya. Kota Pemalang yang merupakan ibukota Kabupaten Pemalang adalah pusat koleksi dan distribusi segala kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Pemalang. Kota Pemalang juga merupakan pusat pelayanan masyarakat.

Berdasarkan RDTR Kota Pemalang BWK I, terbagai menjadi Wilayah Pengembangan BWK Ia, Wilayah Pengembangan BWK Ib dan Wilayah

Pengembangan BWK Ic, dengan fungsi ditetapkan sebagai berikut :

- **Wilayah Pengembangan BWK Ia**

Dengan luas area 1.497,227 Ha, wilayah ini direncanakan berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, permukiman dan pendidikan.

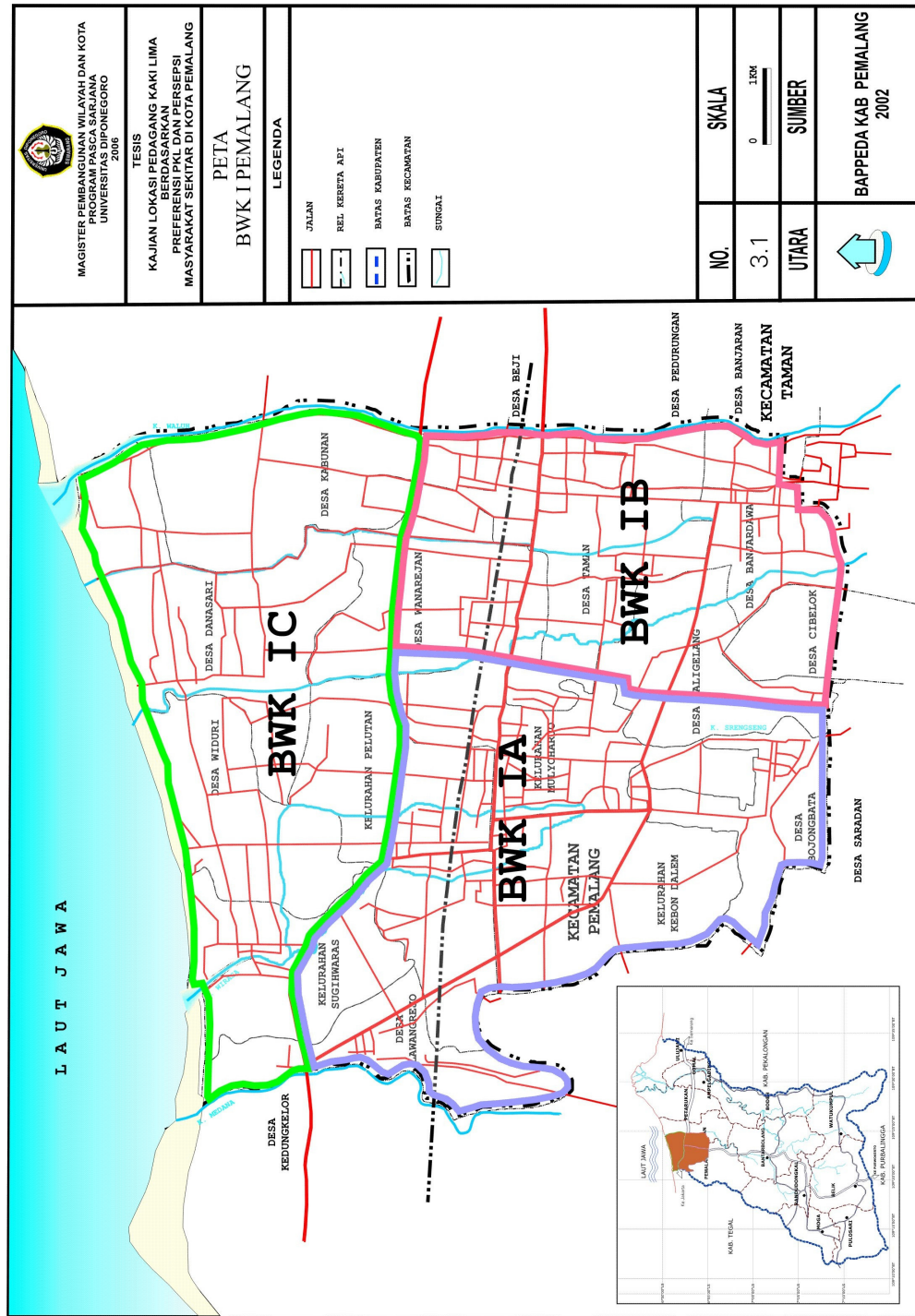
- **Wilayah Pengembangan BWK Ib**

Dengan luas area 969,790 Ha, wilayah ini direncanakan berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pendukung permukiman

- **Wilayah Pengembangan BWK Ic**

Dengan luas area 1.365,660 Ha, wilayah ini direncanakan berfungsi sebagai pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pendukung permukiman dan industri.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:



3.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan RUTR Kota Pemalang

Berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Pemalang, telah dirumuskan kebijakan skala pelayanan Kota Pemalang sebagai berikut :

a. Skala Pelayanan Regional

Kota Pemalang berfungsi sebagai ibukota kabupaten, sehingga pelayanan yang ada harus memiliki skala pelayanan tingkat kabupaten. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- Kantor Kabupaten
- Rumah Sakit Umum
- Masjid Agung
- Pasar Induk
- Gedung/Gelanggang Olah Raga

b. Skala Pelayanan Kecamatan

Kota Pemalang yang terdiri dari Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman, dengan sendirinya merupakan pusat kegiatan skala kecamatan, meliputi sebagai berikut :

- Kantor Kecamatan
- Puskesmas
- Kantor Komando Rayon Militer
- Kantor Kepolisian Sektor
- Kantor P dan K
- Kantor Urusan Agama
- Kantor PU Ranting

c. Skala Pelayanan Kota

Penduduk Kota Pemalang perlu dilayani fungsi-fungsi pelayanan skala kota sebagai berikut :

- Pasar kota/pusat perbelanjaan
- Puskesmas pembantu
- Lapangan Olah Raga
- Gedung

3.3 Peran dan Fungsi Kota Pemalang

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang, maka Kota Pemalang merupakan pusat pengembangan dari Sub Wilayah Pembangunan I (SWP I), yang meliputi wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, dan Petarukan. Sesuai dengan posisinya, maka SWP I memiliki arahan pengembangan sebagai berikut :

1. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Pemalang, dipusatkan di Kecamatan Pemalang;
2. Sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, baik skala regional maupun lokal, dipusatkan di Kecamatan Pemalang dan Taman;
3. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, skala pelayanan kabupaten dipusatkan di Kecamatan Pemalang;
4. Sebagai pusat kegiatan pariwisata yang dioientasikan pada wisata alam, dipusatkan di Kecamatan Pemalang;
5. Sebagai kawasan pertanian yang dialokasikan di Kecamatan Taman dan Petarukan.

Berdasarkan fungsi dan peran Kota Pemalang secara umum, maka fungsi wilayah perencanaan diarahkan sebagai berikut :

1. Pusat Pemerintahan Kabupaten

Fasilitas-fasilitas pemerintahan kabupaten tersebar secara merata, seperti Kantor Pertanahan dan Kantor Subdin PU Ciptakarya di Jalan Pemuda, Kantor subdin PU Bina Marga di Jl. Cipto Mangunkusumo, Kantor PDAM di Jl. Jend. Gatot Subroto.

2. Pusat Perdagangan dan Jasa

Di dalam Kawasan Perencanaan ini, fasilitas perdagangan terpusat di sepanjang Jl. Jend. Sudirman, Jl. Jend. A. Yani, dan saat ini telah dikembangkan pusat perbelanjaan di Perempatan antara Jl. A. Yani , Jl Cipto Mangunkusumo, Jl Jend Gatot Subroto dan Jl. KH. Wahid Hasyim dan diperkirakan kawasan ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Perencanaan.

3. Pusat Pelayanan Kesehatan

Didalam kawasan ini berkembang pelayanan kesehatan, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU) Kab. Pemalang yang terletak pada Jalan Gatot Subroto.

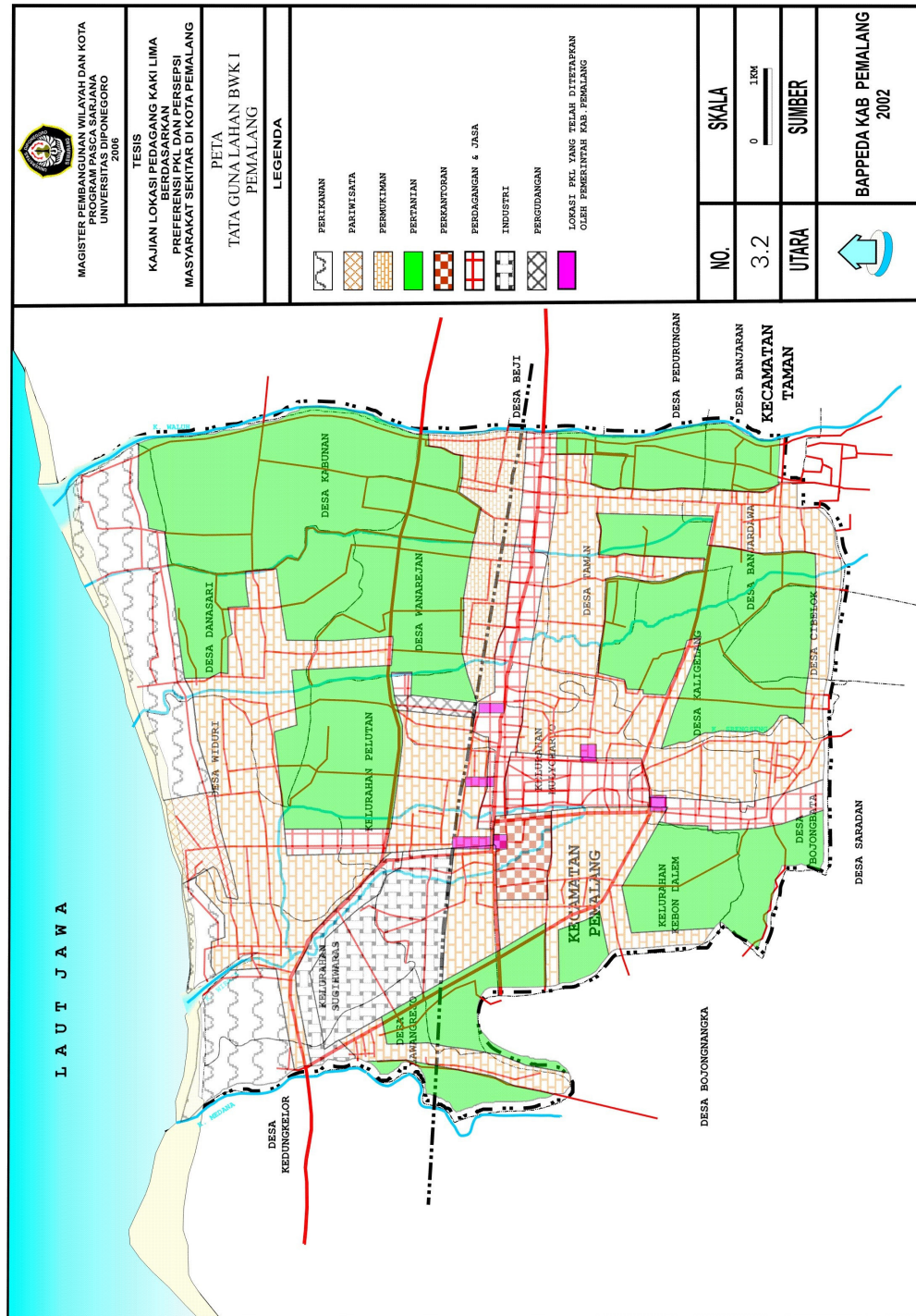
4. Pusat Pendidikan

Fungsi pendidikan yang berkembang di kawasan perencanaan RTRK BWK I Kota Pemalang, mulai dari pendidikan dasar sampai menengah (SLTP/SLTA) tersebar di Jl. Pemuda, Jl. Wahid Hasyim, Jl Tentara Pelajar, Jl. Jend. Gatot Subroto.

5. Sebagai Kawasan Pengembangan Permukiman

Fungsi ini didukung oleh cadangan lahan untuk permukiman, letak lokasi yang berdekatan dengan pusat kota yang mempunyai konsentrasi penduduk cukup tinggi, serta pengembangan wilayah perencanaan sebagai daerah campuran permukiman perdagangan. Selain itu wilayah perencanaan akan diarahkan bagi pengembangan pemukiman baru kepadatan sedang bagi penduduk Kota Pemalang. Kawasan pengembangan permukiman ini terletak di Bagian Timur dan Bagian Tenggara di Kawasan Perencanaan.

Untuk lebih jelasnya lihat gambar 3.2.



3.4 Fasilitas Perkotaan

Fasilitas pelayanan kota antara meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, Fasilitas peribadatan, fasilitas olah raga, dan fasilitas pemerintahan.

Ketersediaan fasilitas perkotaan yang cukup lengkap di Kota Pemalang menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan sektor informal PKL di Kota Pemalang. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas PKL berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dengan tingginya aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas sosial ekonomi, maka akan semakin menarik PKL untuk muncul.

3.5 Perkembangan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Pemalang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk sebesar 1.195.714 jiwa pada tahun 1997 menjadi sebesar 1.272.895 jiwa pada tahun 2001 sehingga dapat dihitung tingkat pertumbuhan kabupaten sebesar 1.31%.

Luas wilayah BWK I Kota Pemalang adalah 3.832,667 Ha dan jumlah penduduk pada BWK I Kota Pemalang tahun 2000 mencapai 203.481 jiwa.

3.6 Pedagang Kaki Lima Di Kota Pemalang

3.6.1 Perkembangan PKL Di Kota Pemalang

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Pemalang pada beberapa sisi telah memberi warna tersendiri bagi kota. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima tersebut juga telah mampu memberikan alternatif bagi warga masyarakat untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau.

Walaupun perkembangan pedagang kaki lima di Kota Pemalang belum seberapa jika dibandingkan dengan perkembangan pedagang kaki lima di Kota Jakarta, Surabaya, ataupun Semarang, namun upaya-upaya guna penataan lokasi mereka di beberapa tempat telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang. Meskipun lokasi tempat usaha pedagang kaki lima telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati, banyak juga dari pedagang ini yang masih menempati tempat-tempat diluar lokasi yang telah ditetapkan, terutama di tempat-tempat yang dekat dengan keramaian kota.

Adapun karakteristik pedagang kaki lima di Kota Pemalang bermacam-macam yang dapat dibedakan dari jenis dagangan, waktu melakukan usaha (siang dan atau malam hari), dan sarana prasarana yang digunakan.

Jenis dagangan pedagang kaki lima di Kota Pemalang hampir sama dari tahun ke tahun. Berbagai makanan “khas” Pemalang seperti Nasi Grombyang, Lontong Dekem dan Sate Loso memenuhi sepanjang jalan RE Martadinata. Namun berbagai jenis makanan lainnya juga menyebar di tiap pusat-pusat keramaian.

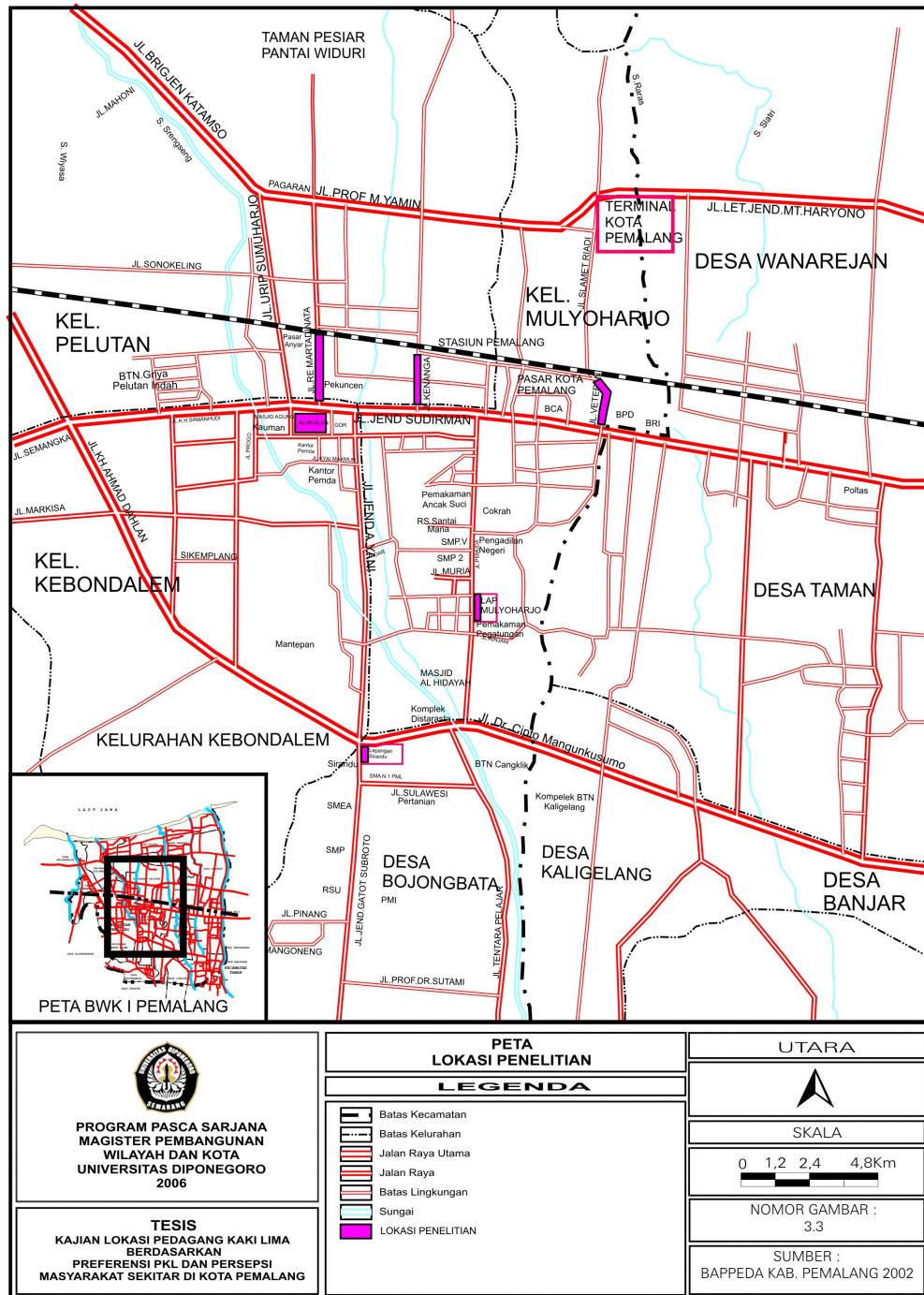
Selain makanan dan minuman, dagangan PKL juga mulai merambah jenis VCD, kerajinan tangan, poster dan buku-buku., kacamata, jam tangan serta mainan anak-anak.

Dari segi waktu jualan, ada PKL yang berjualan pada malam hari dengan sarana prasarana yang juga lebih bervariasi; bukan hanya mengandalkan alas/gelaran dan keranjang/pikulan, tetapi juga kios dan warung-warung semi permanen.

Pedagang kaki lima di Kota Pemalang saat ini berjumlah sekitar 500 (lima ratus) orang yang tersebar di berbagai ruas jalan dengan aneka jenis usaha. Jumlah pedagang ini bahkan lebih, mengingat angka resmi jumlah PKL belum pernah dicatat. Dari tahun ke tahun jumlah PKL semakin meningkat, hal ini diindikasikan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang tidak dapat terserap pada sektor formal.

3.6.2 Karakteristik Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pada enam lokasi yang telah ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Alun-alun Kota Pemalang, Jalan RE Martadinata, Jalan Kenanga, Jalan Veteran, Lapangan Mulyoharjo dan Lapangan Sirandu yang dapat dilihat pada gambar 3.3.



Sedangkan karakteristik keenam lokasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Alun-alun Kota Pemalang

Seperti halnya kota-kota di Pulau Jawa lainnya, Kota Pemalang memiliki “alun-alun” yang menjadi pusat pemerintahan, pusat peribadatan, sekaligus pusat kegiatan sosial. Hal ini dapat dilihat dari bangunan perkantoran di sebelah timur alun-alun yang merupakan pusat aktivitas pemerintahan Kabupaten Pemalang serta kantor-kantor lainnya (Kantor Departemen Agama, Kantor Kesbanglinmas, dan Rutan Pemalang). Disamping itu terdapat juga Masjid Agung yang terletak di sebelah barat alun-alun serta pemukiman penduduk yang telah menandai keberadaan alun-alun sebagai pusat peribadatan dan pusat kegiatan sosial.

Sebagai pusat kegiatan sosial, alun-alun Pemalang telah menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat. Suasana yang teduh dengan pohon-pohon disekelilingnya membuat mereka dapat melakukan aktivitas olah raga, seperti latihan karate, jogging, atau sekedar tempat beristirahat. Khusus hari sabtu malam tempat ini akan sangat ramai dikunjungi masyarakat Pemalang untuk bermalam mingguan dengan teman atau keluarga.

Bertambahnya keramaian di alun-alun telah menarik PKL untuk berjualan di lokasi tersebut. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima terdapat larangan untuk berjualan bagi PKL, hal tersebut tidak menjadi halangan.

Alun-alun Kota Pemalang memiliki 2 (dua) jalur jalan, yaitu jalur cepat dan jalur lambat yang bisa dilalui oleh pengguna jalan dalam kota maupun luar

kota (jalur pantura). Disekelilingnya terdapat trotoar yang pada umumnya mempunyai lebar 1,5 m.

Saat ini jumlah pedagang kaki lima yang berjualan adalah kurang lebih 87 pedagang dengan berbagai jenis usaha seperti mie ayam, bakso, sate, bubur ayam, rokok, dan minuman.

b. Jalan R.E. Martadinata

Ruas jalan R.E. Martadinata menghubungkan Alun-alun Kota Pemalang dengan pantai wisata Widuri. Pada jalan ini terdapat pasar “anyar” yang berkembang sebagai pusat aktivitas perdagangan. Selain pasar, terdapat juga toko-toko kelontong, toko penjualan HP dan swalayan Indomart.

Pada ruas jalan ini tidak dilalui oleh angkutan kota, tetapi terdapat becak-becak yang bisa mengantarkan penumpang ke atau dari pasar. Terdapat juga pemukiman penduduk yang berada di sebelah utara jalan ini. Para pedagang kaki lima menempati badan jalan hingga hampir separuh ruas jalan ini pada sore hingga malam hari sehingga menyebabkan jalan menjadi lebih sempit. Pedagang kaki lima yang berada pada lokasi ini kurang lebih 34 orang dengan jenis dagangan makanan khas kota Pemalang seperti grombyang, lontong dekem, klepon dan sop kaki kambing.

c. Jalan Veteran

Jalan Veteran ini merupakan jalur yang menghubungkan jalan Jendral Sudirman sebagai jalan protokol dengan terminal kota Pemalang. Disamping itu, keberadaan sub-terminal angkot dan Pasar Pagi Kota Pemalang menambah keramaian dan kepadatan jalan ini. Bus-bus mikro antar kota jurusan Pekalongan

dan Moga melewati jalan ini. Lokasi ini merupakan tempat yang strategis bagi PKL karena merupakan pusat perdagangan dan jalur angkutan umum. Saat ini jumlah pedagang kaki lima yang menempati ruas jalan ini sekitar 52 orang dengan menjual berbagai macam barang seperti vcd, pakaian, elektronik, makanan, minuman serta rokok.

d. Jalan Kenanga

Jalan ini menghubungkan jalan Jend. Sudirman dengan stasiun KA Pemalang. Pada ruas jalan ini terdapat bioskop Wijaya yang merupakan satu-satunya bioskop yang tersisa di Pemalang. Selain itu juga terdapat petak-petak pertokoan yang menjual bakso, jamu, dan warteg. Karena berhubungan langsung dengan jalan protokol (Jl. Jend. Sudirman) yang merupakan pusat pertokoan, seperti Toko Basa Putra, Toko Boyolali, Toko Neon, dan sebagainya, maka jalan ini cukup ramai dilewati. Pedagang kaki lima yang berada pada lokasi ini berdagang nasi goreng, rokok, tahu campur, jasa pembuatan stempel dan plat nomor kendaraan. Jumlahnya kurang lebih 21 pedagang.

e. Lapangan Sirandu

Lapangan Sirandu ini adalah lapangan sepak bola yang terletak tepat di depan Sirandu Mal yang dulunya merupakan terminal bus kota Pemalang. Bus-bus umum maupun bus antar kota masuk ke terminal ini. Meski telah beralih fungsi dari terminal menjadi pusat pertokoan, masih ada juga bus-bus antar kota yang memanfaatkan tempat ini untuk menaikkan/menurunkan penumpang. Terutama bus-bus jalur selatan, yaitu bus-bus jurusan Moga – Purwokerto.

Lapangan Sirandu sendiri terletak di jalan Gatot Subroto. Di jalan ini terdapat fasilitas pendidikan, seperti SMA N 1 Pemalang dan SMK N 1 Pemalang; dan fasilitas kesehatan dengan adanya RSUD Dr. M Ashari Pemalang. Disamping itu terdapat juga kompleks perkantoran seperti Kantor Catatan Sipil, PDAM dan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, serta kompleks perumahan. Sementara ini jumlah pedagang yang ada sekitar 29 pedagang dengan berjualan rokok, mie ayam, bubur, es dan tambal ban.

f. Lapangan Mulyoharjo

Lapangan ini terletak pada ruas jalan Pemuda. Pada ruas jalan ini terdapat perkantoran seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Pemalang dan BPN. Selain itu juga terdapat banyak fasilitas pendidikan, misalnya TK Adhyaksa, SD N 4, SD Pius, SMP N 2, SMP N 4, dan SMP N 7 Pemalang. Di bidang keagamaan, terdapat juga Gereja dan Kantor NU.

Lapangan Mulyoharjo berada di depan SMP N 2 Pemalang dan bersebelahan dengan Pemakaman Umum Pegatungan. Di tempat ini telah didirikan kios-kios dan tempat bermain anak. Kios-kios dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama masyarakat Pegatungan, untuk berjualan sampai sekarang. Saat ini jumlah PKL yang tercatat menurut paguyuban bumi sejahtera adalah sekitar 28 orang.

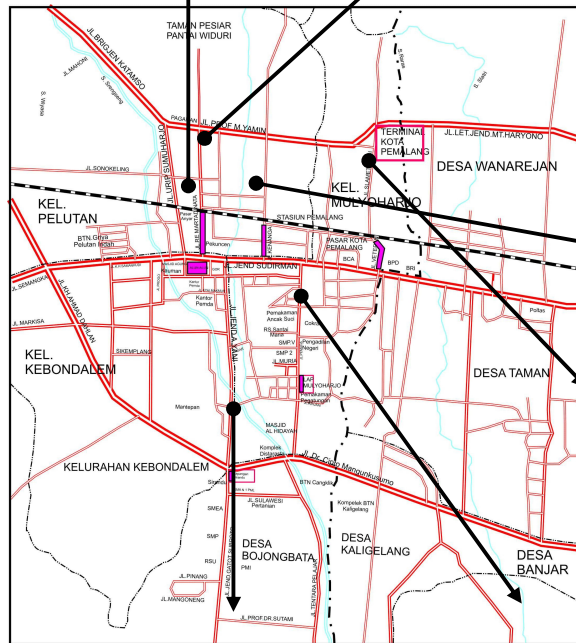
Untuk lebih jelasnya keadaan aktivitas PKL pada keenam lokasi dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut:



Alun-alun kota Pemalang



Jalan RE Martadinata



Jalan Kenanga



Jalan Veteran



Depan Lapangan Sirandu



Lapangan Mulyoharjo

Sumber: Hasil Observasi, 2005

GAMBAR 3. 4
LOKASI AKTIVITAS DI JL.REMARTADINATA, ALUN-ALUN,
JL.KENANGA, JL.VETERAN,LAPANGAN MULYOHARJO DAN
LAPANGAN SIRANDU

3.7 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang Terhadap PKL

Menurut Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima, yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang golongan ekonomi lemah yang dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta menggunakan tempat-tempat umum lainnya yang bukan peruntukkannya bagi tempat usaha secara tetap. Sedangkan tempat usaha PKL adalah tempat-tempat diluar lingkungan pasar yaitu tepi-tepi jalan umum, lapangan serta tempat lain di atas tanah negara yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat berjualan bagi PKL. Untuk mempergunakan tempat usaha dimaksud, PKL harus mendapatkan izin dari Bupati.

Menurut pasal 2 pada Pasal 7 disebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin **dilarang** untuk mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin, memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Bupati, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang ditetapkan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat, menggunakan tempat usahanya tidak sesuai izin peruntukkannya, menjual makanan/minuman keras yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menempati lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tidur pada tempat usaha, mendirikan bangunan permanen di lokasi yang ditentukan serta melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan.

Kemudian pada Pasal 6 memuat **kewajiban** yang harus dilaksanakan oleh setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh izin adalah membayar retribusi

berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, menjaga kebersihan, kesehatan dan keindahan serta ikut menertibkan suasana kota menjadi indah, komunikatif, hijau, lancar, aman dan sehat, mentaati ketentuan-ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Bupati, menempati tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya, menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kabupaten, serta melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Menurut Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima pada BAB III disebutkan alat-alat usaha PKL yang diperbolehkan sesuai dengan pasal 7 yaitu :

- a. peralatan yang mudah dibongkar pasang
- b. pemakaian spanduk harus bersih dan hindari ungkapan persaingan bisnis
- c. peralatan tidak boleh ditinggal di tempat
- d. tenda panjang maksimal 5 meter
- e. tiang pancang tinggi 275 cm
- f. tiang kemiringan tinggi 200 cm
- g. umpak pemberat tidak boleh dari batu kali.

Sedangkan tempat dan waktu usaha PKL pada Kecamatan Pernalang yang ditentukan menurut Keputusan Bupati ini adalah sebagai berikut :

TABEL III.1
TEMPAT DAN WAKTU USAHA PKL
MENURUT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2003

No.	Kecamatan	Tempat-tempat PKL	Waktu Kegiatan PKL	Keterangan
1	Pemalang	a. Alun-alun Pemalang b. Jalan RE Martadinata c. Jalan Veteran d. Jalan Kenanga e. Lapangan Mulyoharjo f. Lapangan Sirandu menghadap ke Barat	 16.00 - 01.00 WIB 06.00 - 01.00 WIB 06.00 - 01.00 WIB 06.00 - 01.00 WIB 16.00 - 01.00 WIB	7 Hari sebelum dan setelah Lebaran serta 1 hari menjelang pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji

Sumber: Keputusan Bupati Pemalang No. 14 Tahun 2003

BAB IV

KAJIAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PREFERENSI PKL SERTA PERSEPSI MASYARAKAT SEKITAR DI KOTA PEMALANG

Pada bab ini akan diuraikan analisis terhadap keenam lokasi pedagang kaki lima berdasarkan preferensi pedagang kaki lima dan persepsi masyarakat. Pertama akan diuraikan karakteristik PKL, selanjutnya analisis terhadap preferensi PKL dan kemudian persepsi masyarakat atas keberadaan PKL pada lokasi tersebut. Dari pengamatan yang ada pada lokasi ruas jalan Veteran, Lapangan Sirandu, ruas jalan RE Martadinata, Lapangan Mulyoharjo, Alun-alun dan ruas jalan Kenanga, diperoleh jumlah populasi dari pedagang kaki lima serta jumlah sampelnya.

TABEL IV.1
JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL

No	LOKASI	Jenis Usaha						Jumlah	
		Makanan		Non Makanan		Jasa			
		Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
1	Jalan Veteran	11	2	31	6	10	2	52	10
2	Lapangan Sirandu	20	4	5	1	4	1	29	6
3	Jalan R.E Martadinata	34	7	0	0	0	0	34	7
4	Lapangan Mulyoharjo	9	2	19	4	0	0	28	6
5	Alun-Alun	73	14	14	3	0	0	87	17
6	Jalan Kenanga	16	3	0	0	5	1	21	4
Jumlah		163	32	69	14	19	4	251	50

Sumber: Data primer diolah, 2005

4.1. Analisis Karakteristik Umum PKL

Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui karakteristik umum dari PKL. Analisis ini meliputi klasifikasi umur, tingkat pendidikan, asal pedagang, jumlah pekerja, lama berdagang, modal serta tingkat penghasilan per hari sebagai gambaran kondisi PKL pada keenam lokasi tersebut.

4.1.1 Tingkat Usia

Dari hasil pengamatan terhadap 50 orang pedagang kaki lima pada 6 lokasi yang ditetapkan oleh Pemda Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa pedagang kaki lima khususnya kelompok usia 31-40 tahun merupakan jumlah terbesar yakni 44%. Diikuti oleh kelompok usia 41-50 sebesar 26%, selanjutnya pedagang kaki lima yang berusia di atas 50 tahun tercatat sebesar 20%. Sedangkan kelompok usia pedagang kaki lima dibawah 30 tahun hanya 10%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:

TABEL IV.2
USIA PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI	Tingkat usia				Jumlah
	< 30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	> 50 Tahun	
Veteran	0	8	1	1	10
Sirandu	0	3	1	2	6
Re Martadinata	0	2	3	2	7
Mulyoharjo	3	1	2	0	6
Alun-Alun	0	6	6	5	17
Kenanga	2	2	0	0	4
Jumlah	5	22	13	10	50
Persentase	10	44	26	20	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelompok paling besar adalah kelompok usia 31-40 yang merupakan usia yang produktif dan yang termasuk penting dalam memperoleh kesempatan kerja. Pada usia tersebut pedagang telah cukup dewasa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan keluarga.

Sulitnya mencari pekerjaan dalam bidang formal dan motivasi untuk bertahan hidup mendorong mereka membuka lapangan kerja sendiri yaitu sebagai pedagang kaki lima. Hal tersebut sesuai yang dikatakan Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996: 230) sektor informal terutama PKL merupakan usaha yang paling mudah dimasuki sehingga secara tidak langsung mengurangi beban pemerintah dalam masalah pengangguran.

4.1.2 Tingkat Pendidikan

Berikut adalah hasil dari survai primer mengenai tingkat pendidikan para pedagang kaki lima.

TABEL IV.3
TINGKAT PENDIDIKAN PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI	Pendidikan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	PT	Tidak sekolah	
Veteran	2	3	1	0	4	10
Sirandu	4	1	1	0	0	6
Re Martadinata	3	0	2	0	2	7
Mulyoharjo	3	1	2	0	0	6
Alun-Alun	7	6	1	0	3	17
Kenanga	2	0	2	0	0	4
Jumlah	21	11	9	0	9	50
Persentase	42	22	18	0	18	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari hasil kuesioner yang telah disebar, tingkat pendidikan pedagang kaki lima terlihat paling banyak adalah SD yaitu sebanyak 42% diikuti pedagang yang berpendidikan SMP yaitu sebanyak 22% kemudian tingkat pendidikan SMA dan yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali sebanyak 18%. Sedangkan pedagang yang mempunyai pendidikan setingkat perguruan tinggi menurut hasil kuesioner adalah tidak ada.

Tingkat pendidikan yang hanya setingkat SD maupun SMP atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali adalah sesuai dengan ciri-ciri dari sektor informal yaitu salah satunya adalah berpendidikan rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menunjukkan bahwa usaha dalam sektor informal yang tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus (Wirosardjono dalam Sari, 2003:27).

Banyaknya pedagang yang berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam memahami peraturan pemerintah. Misalkan menempati lokasi berdagang yang seharusnya tidak diperbolehkan, berjualan diluar waktu yang telah ditentukan serta sarana berdagang yang lebarnya melebihi ketentuan yang diperbolehkan.

4.1.3 Asal Pedagang

Sementara dilihat dari daerah asal pedagang kaki lima yang menjadi amatan penelitian menunjukkan sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka berasal dari kota Pemalang (86 %). Sementara sisanya (14 %) pedagang kaki lima mengatakan berasal dari luar kota Pemalang. Pedagang kaki lima yang

berasal dari luar kota Pemalang berasal dari kecamatan yang berada di sekitar Kabupaten Pemalang. Namun juga ada beberapa pedagang yang mengaku berasal dari Kabupaten di luar Kabupaten Pemalang seperti Bandung, Lamongan, Pekalongan dan Tegal. Meskipun demikian, pedagang yang berasal dari luar kota Pemalang telah menetap di kota Pemalang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat asal pedagang pada tabel IV.3 berikut ini:

TABEL IV.4
DAERAH ASAL PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI	Asal Pedagang		Jumlah
	Dalam Kota	Luar Kota	
Veteran	10	0	10
Sirandu	5	1	6
Re Martadinata	5	2	7
Mulyoharjo	4	2	6
Alun-Alun	16	1	17
Kenanga	3	1	4
Jumlah	43	7	50
Persentase	86	14	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pada lokasi Jalan RE Martadinata, pedagang yang berasal dari luar kota telah menjadi penduduk kota Pemalang selama lebih dari belasan tahun. Sedangkan pada lokasi alun-alun pedagang yang berasal dari luar kota baru memulai usaha belum lama. Namun saat ini telah memiliki tempat tinggal yang dekat dengan tempat usahanya di Alun-alun. Pada lokasi Lapangan Sirandu PKL yang mengaku dari luar kota adalah dari Ulujami, setiap hari berangkat dari tempat tinggalnya dengan menggunakan kendaraan umum. Karena sebagian besar responden PKL berasal dari Kota Pemalang itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha

kaki lima merupakan salah satu alternatif pilihan bagi warga Kota Pemalang khususnya sebagai mata pencaharian utama.

4.1.4 Jumlah Pekerja

Kegiatan usaha kaki lima mampu memberikan lapangan pekerjaan tidak hanya bagi pedagang kaki lima sendiri tetapi juga tenaga kerja yang membantu kegiatan pedagang kaki lima. Pada umumnya pedagang kaki lima memiliki jumlah pekerja sekitar 1-2 orang (72 %), mereka adalah selain dirinya sendiri juga dibantu seorang pembantu, baik istri, suami, anak, saudara ataupun pekerja yang diupah. Pedagang kaki lima yang menggunakan tenaga kerja dengan jumlah 3-5 orang sebesar 24%. Sedangkan pedagang kaki lima yang menggunakan tenaga kerja lebih dari 5 orang sebesar 4%. Untuk pedagang yang memperkerjakan tenaga kerja lebih dari 5 orang adalah pedagang yang berada pada lokasi jalan RE Martadinata. Hal ini terjadi karena pada pedagang tersebut telah mempunyai omzet yang cukup besar dan membutuhkan banyak pekerja untuk membantu dagangannya.

TABEL IV.5
JUMLAH TENAGA KERJA YANG DILIBATKAN

LOKASI	Jumlah Pekerja			Jumlah
	<=2	3-5	>5	
Veteran	8	2	0	10
Sirandu	5	1	0	6
Re Martadinata	1	4	2	7
Mulyoharjo	4	2	0	6
Alun-Alun	16	1	0	17
Kenanga	2	2	0	4
Jumlah	36	12	2	50
Persentase	72	24	4	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Pada umumnya untuk jenis usaha yang melibatkan lebih dari 2 pekerja adalah jenis usaha berupa makanan olahan, kecuali pada lokasi Lapangan Mulyoharjo, ada 1 jenis usaha yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 2 orang yaitu jenis konveksi pakaian bekas. Tenaga kerja yang dipekerjakan oleh pedagang kaki lima tersebut seperti yang telah dikatakan merupakan tenaga kerja dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan dan berasal dari daerah yang sama. Sehingga sektor informal terutama pedagang kaki lima terbukti dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat mengurangi pengangguran.

4.1.5 Lama Usaha

Sementara dari faktor lama usaha, sebagian di antara pedagang kaki lima yang diwawancarai merupakan pedagang yang telah menggeluti usaha ini 3 tahun atau kurang yakni sebanyak 19 orang (38%). Sebanyak 14 orang (28%) pedagang kaki lima menyatakan bahwa mereka telah mulai membuka usaha kaki lima antara 4 sampai 6 tahun. Sedangkan pedagang kaki lima yang mempunyai lama usaha 7 sampai 9 tahun adalah 4 orang (8%). Pedagang kaki lima yang lama usahanya lebih dari 10 tahun sebanyak 13 orang (26%). Lamanya tahun mulai usaha menunjukkan bahwa kegiatan usaha kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian utama yang dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga.

TABEL IV.6
LAMA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI	Lama berusaha (dalam tahun)					Jumlah
	<=3	4-6	7-9	10-12	> 12	
Veteran	5	4	1	0	0	10
Sirandu	4	1	1	0	0	6
Re Martadinata	0	2	1	2	2	7
Mulyoharjo	6	0	0	0	0	6
Alun-Alun	3	5	1	5	3	17
Kenanga	1	2	0	0	1	4
Jumlah	19	14	4	7	6	50
Persentase	38	28	8	14	12	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel IV.5 diatas, dapat diketahui paling banyak pedagang yang mempunyai usaha selama 3 tahun atau kurang adalah paling besar yaitu sebanyak 38%. Pada lokasi Lapangan Mulyoharjo semua pedagang yang ada mengungkapkan bahwa mereka baru menjalani usaha berdagang kurang dari 3 tahun, karena lapangan tersebut diresmikan untuk pedagang kaki lima baru pada tahun 2003. Sedangkan pada lokasi Jalan RE Martadinata sebagian besar pedagangnya telah mulai berdagang lebih dari 5 tahun. Hal ini dikarenakan mereka adalah pedagang lama dan bisa dikatakan merupakan pedagang yang telah mapan. Lama usaha pedagang kaki lima yang menempati lokasi Alun-alun lebih beragam. Meskipun demikian pedagang kaki lima yang membuka usaha dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun relatif banyak, bahkan ada beberapa pedagang yang mengaku telah berdagang di Alun-alun lebih dari 30 tahun.

Pada lokasi Jalan Veteran, para pedagang mulai berdatangan dan berdagang di lokasi ini sejak dipindahkannya Terminal Kota Pemalang dari Sirandu ke Wanarejan yang membuat tingkat aksesibilitas pada ruas jalan ini semakin meningkat.

Semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir dimungkinkan karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan membawa dampak pada meningkatnya pengangguran karena pemutusan hubungan kerja akibat dari roda perekonomian yang tidak berjalan normal.

4.1.6 Modal

Dilihat dari modal usaha untuk mengawali usaha berdagang ini, sebagian besar pedagang mengaku mempunyai modal kurang dari 1 juta sebanyak 34 orang (68 %). Sedangkan yang lebih dari 1 juta adalah 16 orang (32 %). Pada umumnya mereka mengaku untuk modal sebesar itu belum termasuk modal sarana berdagang seperti gerobak, kios maupun tenda. Sebagian kecil pedagang mengaku mempunyai modal lebih dari 2 juta sebanyak 3 orang (6 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel IV.7 berikut:

**TABEL IV.7
MODAL USAHA**

LOKASI	Modal (dalam rupiah)					Jumlah
	<=500.000	500.001-1.000.000	1.000.001-1.500.000	1.500.001-2.000.000	> 2 Juta	
Veteran	2	6	1	1	0	10
Sirandu	3	2	1	0	0	6
Re Martadinata	1	2	1	1	2	7
Mulyoharjo	0	2	3	0	1	6
Alun-Alun	10	4	2	1	0	17
Kenanga	1	1	1	1	0	4
Jumlah	17	17	9	4	3	50
Persentase	34	34	18	8	6	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Pedagang yang mempunyai modal lebih dari 2 juta adalah pedagang pada lokasi ruas jalan RE Martadinata yang merupakan pedagang yang telah mapan dan telah lama berusaha di tempat ini serta pada lapangan Mulyoharjo pedagang yang mempunyai modal lebih dari 2 juta adalah pedagang konveksi yang menjual pakaian bekas. Hal ini dikarenakan pedagang tersebut adalah bukan dari dalam kota Pemalang dan sedang merintis usaha ini pada lokasi yang baru. Menurut pengakuannya, pedagang tersebut mengungkapkan bahwa disamping berjualan pada lapangan Mulyoharjo, dia juga berjualan pada tempat-tempat yang ada keramaian, misalnya pasar atau alun-alun pada hari Sabtu dan Minggu yang merupakan pusat keramaian.

Dari hasil survai tersebut dapat dilihat bahwa usaha pada sektor informal terutama pedagang kaki lima merupakan usaha dengan modal yang relatif kecil dan merupakan suatu unit usaha yang berskala kecil yang sesuai dengan karakteristik sektor informal pada umumnya.

4.1.7 Pendapatan

Tingkat pendapatan rata-rata per hari pedagang kaki lima tergantung pada waktu-waktu tertentu. Pada hari-hari biasa, tingkat pendapatan mereka sangat minim, tetapi pada waktu hari libur atau pada waktu ada keramaian, tingkat pendapatan mereka akan naik tajam. Dilihat dari pendapatan rata-rata per hari terungkap bahwa sebagian besar PKL mengaku bahwa pendapatan mereka rata-rata di bawah Rp. 50.000 per hari, yakni 80%. Sementara PKL yang menyatakan pendapatan rata-rata per hari berkisar antara Rp. 50.001-100.000 sebesar 8%. Sedangkan pedagang kaki lima yang memiliki pendapatan rata-rata per hari

berkisar antara Rp. 150.001-200.000 sebesar 4%, demikian pula pedagang kaki lima yang memiliki pendapatan rata-rata Rp. 200.001-250.000 per hari sebanyak 2%. Pedagang yang mengaku mempunyai pendapatan lebih dari Rp. 250.000 sebanyak 4%. Pedagang dengan pendapatan lebih dari Rp.150.000 berasal dari lokasi Jalan RE Martadinata. Bahkan ada 2 orang yang mengaku sehari berpenghasilan lebih dari Rp. 1 juta rupiah.

Ternyata sektor informal mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan sektor formal seperti pegawai biasa.

Berdasarkan pengamatan sebagian besar pedagang kaki lima berpendapatan kurang dari Rp. 50.000 per hari dan hanya memiliki satu lokasi usaha kaki lima. Meskipun ada beberapa pedagang kaki lima yang mengaku bahwa mereka memiliki usaha di lokasi lain, tapi tidak berlaku pada umumnya dan hanya sebagian kecil pedagang kaki lima.

Berikut hasil penghitungan *crosstab* antara lokasi dengan pendapatan pedagang kaki lima rata-rata perhari:

TABEL IV.8
PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA RATA-RATA PER HARI

LOKASI	Penghasilan(dalam rupiah)						Total
	<=50.000	50.001-100.000	100.001-150.000	150.001-200.000	200.001-250.000	>250.000	
Alun-alun	16	1					17
RE Martadinata	2		1	1	1	2	7
Veteran	10						10
Kenanga	2	1	1				4
Lap Mulyoharjo	5	1					6
Lap.Sirandu	5	1					6
Jumlah	40	4	2	1	1	2	50
Asymp. Sig	0,028	Kesimpulan :		Ada hubungan antara lokasi dengan penghasilan pedagang dan memiliki keterkaitan yang erat.			
Contingency Coefficient	0,667						

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari hasil perhitungan chi Kuadrat dan koefisien kontingensi (lihat tabel IV.8) diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara lokasi dengan penghasilan pedagang dan memiliki keterkaitan yang erat. Lokasi yang menjanjikan penghasilan yang lebih besar adalah pada ruas RE Martadinata yang merupakan tempat jajan dari masyarakat Pemalang. Lokasi yang berbeda membawa pengaruh pada penghasilan pedagang. Lokasi yang aksesibilitasnya tinggi akan menambah jumlah pelanggan yang secara langsung menaikkan penghasilan pedagang.

4.2. Analisis Karakteristik Aktivitas PKL

4.2.1 Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya, responden PKL dikelompokkan menjadi 3(tiga) kelompok, yaitu:

1. Makanan, baik berupa makanan yang belum diolah seperti sayur, buah-buahan, daging dan makanan yang sudah siap saji serta minuman.
2. Bukan Makanan, seperti rokok, koran/majalah/poster, VCD, kaset, mainan, pakaian dan lain-lain.
3. Jasa, seperti jasa pembuatan stempel, jasa tambal ban, jasa bikin kunci, perbaikan jam dan jasa lainnya

Berdasarkan kelompok tersebut, responden yang ada seperti tercantum pada tabel IV.9 berikut:

TABEL IV.9
JENIS USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

LOKASI	Jenis Usaha						Jumlah
	Makanan	Non Makanan				Jasa	
		rokok	konveksi	vcd	kelontong		
Veteran	2	2	1	1	2	2	10
Sirandu	4	1	0	0	0	1	6
Re Martadinata	7	0	0	0	0	0	7
Mulyoharjo	2	0	1	1	2	0	6
Alun-Alun	14	3	0	0	0	0	17
Kenanga	3	0	0	0	0	1	4
Jumlah	32	6	2	2	4	4	50
Persentase	64	12	4	4	8	8	100
Asymp. Sig	0,10	Kesimpulan :		Tidak ada hubungan antara lokasi dengan jenis usaha meskipun ada keterkaitan yang cukup erat.			
Contingency Coefficient	0,638						

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa bahwa pedagang kaki lima yang memilih jenis usaha makanan yakni 32 orang (64%). Pedagang kaki lima yang memilih jenis usaha bukan makanan yakni 14 orang (28%) yang terdiri dari rokok, konveksi, vcd serta kelontong. Sementara pedagang yang memilih jenis usaha jasa adalah sebanyak 4 orang (8%) antara lain memilih jenis usaha jasa seperti pembuatan kunci, stempel dan tambal ban.

Jenis usaha makanan adalah jenis usaha yang paling banyak dipilih pedagang kaki lima. Dari keenam lokasi yang menjadi obyek penelitian, jenis usaha makanan merupakan jenis usaha yang mendominasi, bahkan pada ruas jalan RE Martadinata semua respondennya (7 orang) memilih jenis usaha makanan. Pada ruas jalan ini merupakan pusat dari makanan tradisional khas Pemalang

mulai dari Nasi Grombyang, Lontong Dekem, Sop Kaki Kambing, Klepon dan makanan kecil lainnya serta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Pemalang.

Berbeda dengan ruas jalan RE Martadinata, pada Jalan Veteran jenis usaha yang paling banyak adalah non makanan yaitu sebanyak 6 orang yang terdiri dari pedagang rokok, vcd, pakaian serta kelontong. Sedangkan jenis usaha makanan dan jasa masing-masing 2 orang. Keberagaman jenis usaha pada ruas jalan Veteran dimungkinkan karena pada lokasi ini merupakan lokasi yang dekat dengan Pasar Kota Pemalang dan berada pada jalan yang dilewati angkutan umum dari dan menuju Terminal Kota Pemalang.

Pedagang kaki lima yang menempati lokasi usaha pada Alun-alun sebagian besar memilih jenis usaha makanan dan minuman, hanya terdapat 3 responden yang memilih usaha berjualan rokok.

Pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan usaha di Lapangan Mulyoharjo paling banyak adalah jenis usaha bukan makanan seperti kelontong, konveksi dan vcd. Saat ini dari 28 pedagang yang terdaftar pada paguyuban Bumi Sejahtera yang merupakan paguyuban pedagang kaki lima yang berada pada Lapangan Mulyoharjo tinggal 16 pedagang yang masih buka pada hari-hari biasa. Sementara jenis usaha yang tutup adalah kebanyakan jenis usaha makanan. Hal ini terjadi karena Lapangan Mulyoharjo belum menjadi tempat yang menarik bagi para pengunjung. Lokasinya pada ruas Jalan Pemuda masih belum cukup untuk menarik pengunjung. Menurut pengakuan pedagang yang masih buka, pedagang yang tutup mempunyai usaha di tempat lain dan hanya menggunakan tempat di

Lapangan Mulyoharjo apabila ada keramaian seperti pameran, pasar malam dan lainnya.

Pada Lapangan Sirandu jenis usaha yang dipilih oleh para pedagang kaki lima cukup beragam, meskipun jenis usaha makanan cukup mendominasi yaitu sebanyak 4 orang, yang terdiri dari jenis makanan siap saji seperti warung nasi, bubur kacang hijau, mie ayam serta tahu campur. Sedangkan jenis usaha non makanan yang ada berupa rokok, yang biasanya juga menjual minuman botol maupun kaleng. Jenis usaha jasa yang terdapat pada lokasi ini antara lain tambal ban, tukang bikin kunci serta bengkel motor. Hal ini dapat dijelaskan karena pada lokasi ini merupakan tempat mangkal bus-bus jurusan antar kota kearah Moga dan Purwokerto, sehingga merupakan tempat yang cukup ramai disinggahi oleh para calon penumpang. Juga pada ruas Jalan Gatot Subroto dimana Lapangan Sirandu ini berada, terdapat fasilitas pendidikan yaitu SMA N 1 Pemalang dan SMK N 1 Pemalang sehingga menambah keramaian pada lokasi ini.

Dari hasil perhitungan chi Kuadrat dan koefisien kontingensi diperoleh hasil bahwa terdapat tidak ada hubungan antara lokasi dengan jenis usaha pedagang. Karena saat ini hampir pada semua lokasi terdapat berbagai macam dagangan yang hampir sama jenisnya seperti makanan, minuman dan rokok. Hampir tidak dijumpai lokasi yang mempunyai jenis dagangan yang khusus kecuali pada ruas jalan RE Martadinata. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar 4.1 berikut ini.



Sumber : Hasil Penelitian, 2005

GAMBAR 4.1
JENIS USAHA PKL PADA KEENAM LOKASI

4.2.2 Sarana Dagang

Bentuk dan sarana dagang yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima yang berada pada keenam lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

TABEL IV.10
SARANA DAGANG PKL

LOKASI	Sarana Dagang						Jumlah
	Warung Tenda	Gerobak /kereta drg	Pikulan /keranjang	Gelaran/ dasaran	Kios	Meja	
Veteran	2	6	0	2	0	0	10
Sirandu	1	5	0	0	0	0	6
Re Martadinata	5	1	0	0	0	1	7
Mulyoharjo	1	0	0	0	5	0	6
Alun-Alun	0	15	0	2	0	0	17
Kenanga	3	1	0	0	0	0	4
Jumlah	12	28	0	4	5	1	50
Persentase	24	56	0	8	10	2	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel IV.10 diatas dapat dilihat bahwa bentuk sarana dagang yang paling banyak dipergunakan adalah bentuk gerobak/kereta dorong sebanyak 28 responden (56%). Bentuk sarana gerobak/kereta dorong merupakan bentuk yang paling mudah untuk dipindahkan, walaupun para pedagang yang memiliki sarana jenis ini cenderung untuk menetap. Bentuk gerobak memudahkan pedagang untuk membawa dagangannya dari rumah ke lokasi berjualan. Biasanya responden PKL yang menggunakan bentuk ini adalah PKL yang berjualan makanan/minuman siap saji seperti mie ayam, bakso, es kelapa muda serta bubur ayam dan soto.

Bentuk sarana dagang yang berupa warung tenda digunakan oleh 12 orang responden (24%). Sedangkan berikutnya sarana berupa gelaran sebanyak 4 responden (8%) dan kios sebanyak 5 responden (10%). Bentuk sarana dagang

lainnya sebanyak 1 orang (2%) yaitu berupa meja. Bentuk sarana pikulan/keranjang tidak ditemukan pada keenam lokasi pengamatan.

Pedagang kaki lima yang berada di alun-alun Kota Pemalang paling banyak menggunakan sarana dagang gerobak/kereta dorong yaitu sebanyak 15 responden. Hal ini dapat dimungkinkan karena menurut ketua paguyuban pedagang kaki lima, lokasi alun-alun sebenarnya tidak diperbolehkan untuk berjualan pada hari-hari biasa seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002, namun setelah beberapa kali melakukan pendekatan dengan para wakil rakyat dan Bupati Pemalang, akhirnya lokasi ini diperbolehkan untuk berjualan dengan beberapa syarat yang antara lain bentuk sarana dagang yang dipergunakan adalah berupa gerobak dan dilarang menggunakan warung tenda.

Pada ruas Jalan R E Martadinata bentuk sarana dagang paling banyak adalah warung tenda sebanyak 5 responden. Bentuk warung tenda paling banyak digunakan di lokasi ini dan menurut ketua paguyuban pedagang kaki lima jalan RE Martadinata yang bernama "Cinta Damai" telah dibuat seragam berupa kain yang bertuliskan nama warung dan jenis dagangan yang ditawarkan terutama pedagang yang mempunyai bentuk sarana warung tenda. Adanya keseragaman memperlihatkan kerapian bagi yang melihatnya. Kemudian bentuk kereta dorong 1 orang responden yang menjual lauk matang, setelah itu bentuk meja 1 responden menjual berbagai makanan khas jawa seperti klepon, gethuk, goreng-gorengan.

Bentuk sarana dagang pada lapangan Mulyoharjo yang dikhususkan menjadi lokasi bagi pedagang kaki lima adalah hampir sama. Bentuk sarana

dagang yang ada pada lokasi ini adalah kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah. Bentuk sarana dagang kios hanya dijumpai pada lokasi ini.

Sarana dagang yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima pada lokasi Lapangan Sirandu kebanyakan adalah gerobak/kereta dorong.

Pada lokasi ruas Jalan Kenanga bentuk/sarana dagang yang dipergunakan kebanyakan adalah warung/tenda yang menjual jenis makanan, sedangkan bentuk/sarana dagang yang berupa gerobak pada lokasi ini biasanya merupakan pedagang dengan jenis jasa baik jasa membuat stempel, plat nomor maupun afdruk photo.

Untuk lebih jelasnya bentuk sarana dagang yang dipergunakan oleh PKL pada keenam lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 4.2.

TABEL IV.11
HUBUNGAN ANTARA JENIS DAGANGAN
DENGAN SARANA DAGANG

Jenis dagangan	Sarana dagang					Total
	Warung Tenda	Gerobak/ Kereta Dorong	Gelaran/ dasaran	Kios	Meja	
Makanan	11	18	0	2	1	32
Rokok	0	4	2	0	0	6
Konveksi	1	0	1	0	0	2
elektronik, vcd,kaset	0	0	1	1	0	2
Jasa	0	4	0	0	0	4
Kelontong	0	2	0	2	0	4
Total	12	28	4	5	1	50
Asymp. Sig	0,008	Kesimpulan :	Ada hubungan antara lokasi dengan jenis usaha dan mempunyai keterkaitan yang cukup erat.			
Contingency Coefficient	0,658					

Sumber: Data primer diolah, 2005

Hasil tabulasi silang antara jenis dagangan dan sarana dagang membuktikan bahwa ada hubungan antara yang jenis dagangan dengan bentuk

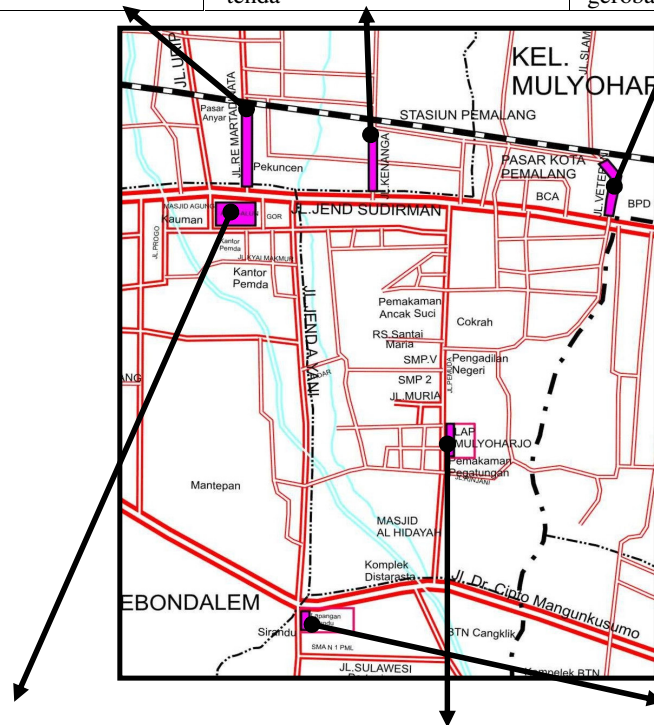
sarana dagang dan memiliki hubungan yang erat. Jenis usaha makanan menggunakan sarana berupa warung, gerobak dan lainnya. Sedangkan jenis usaha rokok menggunakan sarana gerobak dan dasaran. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa bentuk sarana dagang berhubungan dengan jenis dagangan yang dijual.



Sarana dagang paling banyak pada Ruas Jalan RE Martadinata adalah warung tenda

Sarana Dagang paling banyak pada Ruas jalan Kenanga adalah warung tenda

Pada ruas jalan Veteran sebagian besar PKL menggunakan sarana gerobak dan dasaran.



Sarana dagang paling banyak pada Alun-alun adalah gerobak.

Sarana dagang paling banyak pada Lapangan Mulyoharjo adalah kios.

Lapangan sirandu dipenuhi PKL dengan sarana dagang gerobak.

Sumber : Hasil Penelitian, 2005

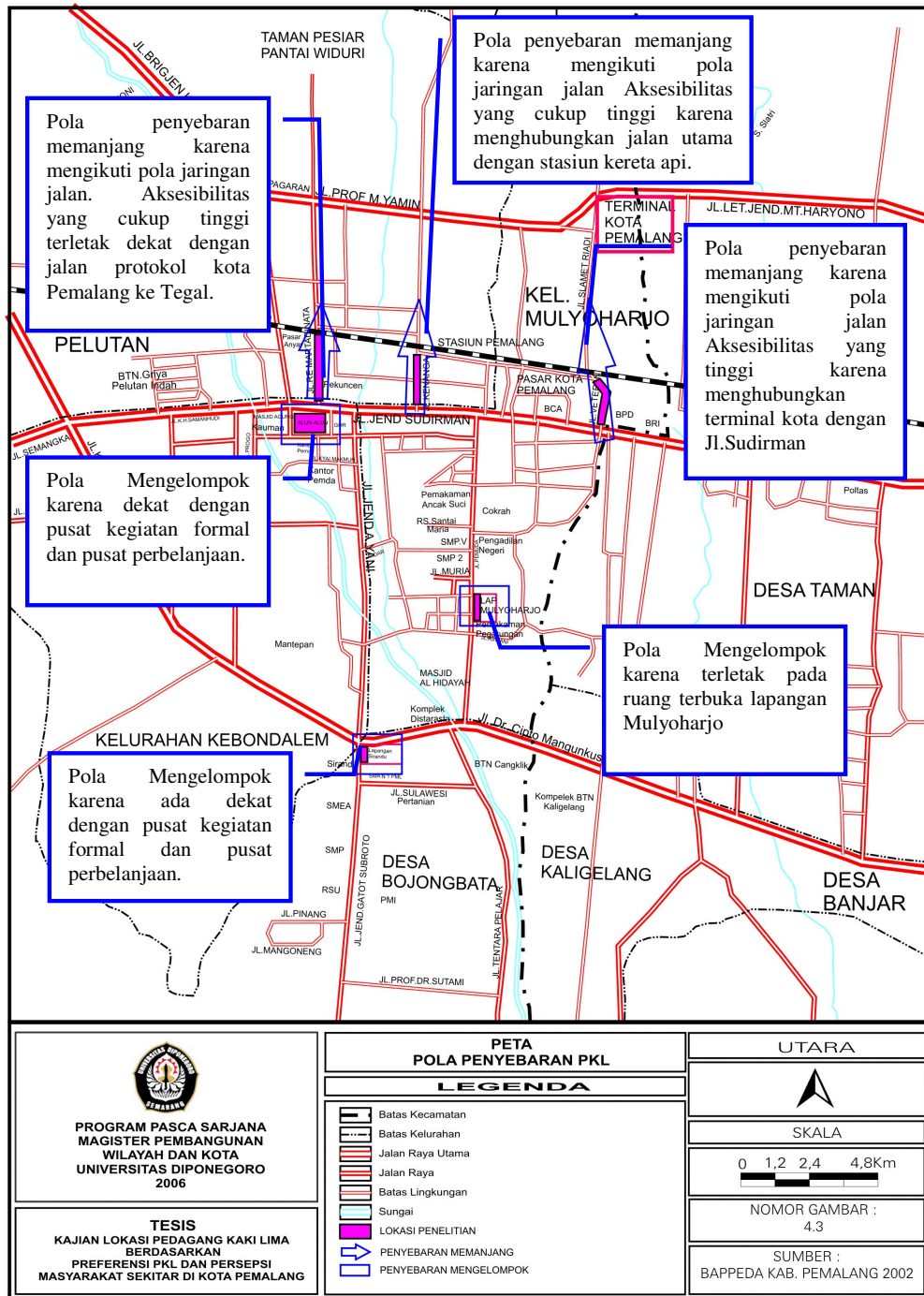
GAMBAR 4.2
SARANA DAGANG PKL PADA KEENAM LOKASI

4.2.3 Pola Peyebaran dan Pengelompokkan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, pola penyebaran pada keenam lokasi berbeda-beda.

Pada Lapangan Mulyoharjo, Lapangan Sirandu serta Alun-alun pola penyebarannya adalah mengelompok. Menurut Mc. Gee dan Yeung (1977: 36), pedagang pada lokasi ini pada umumnya selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Selain itu pada ujung jalan, ruang-ruang terbuka, sekeliling pasar, ruang-ruang parkir, dan taman-taman merupakan lokasi-lokasi yang banyak diminati oleh sektor ini.

Sedangkan pada lokasi ruas jalan RE Martadinata, Jalan Kenanga dan Jalan Veteran, pola penyebarannya adalah memanjang. Sesuai dengan pendapat Mc. Gee dan Yeung (1977: 37) pada umumnya pola penyebaran memanjang atau *linier concentration* terjadi di sepanjang atau di pinggir jalan utama (*main street*) atau pada jalan yang menghubungkan jalan utama. Dengan kata lain pola perdagangan ini ditentukan oleh pola jaringan jalan itu sendiri. Pola kegiatan linier lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan aksesibilitas yang tinggi pada lokasi yang bersangkutan. Pada ruas Jalan Kenanga dan ruas Jalan RE Martadinata mempunyai aksesibilitas yang cukup tinggi mengingat pada ruas jalan ini menghubungkan jalan utama yaitu Jalan Sudirman dengan Stasiun Kereta Api Pemalang. Demikian pula halnya dengan ruas Jalan Veteran yang menghubungkan Terminal Bus Pemalang dengan ruas Jalan Sudirman dan dilewati oleh banyak bus-bus mikro serta angkutan kota (lihat gambar 4.3).



Apabila dilihat dari pola pengelompokkan jenis dagangan, secara umum pedagang kaki lima pada saat ini memilih berkelompok dengan sejenisnya (54%) serta bercampur dengan PKL jenis lain (46%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut ini:

**TABEL IV.12
PENGELOMPOKKAN PKL**

Lokasi	Kelompok saat ini		Jumlah
	Sejenis	Bercampur	
Veteran	2	8	10
Sirandu	1	5	6
Re Martadinata	7	0	7
Mulyoharjo	0	6	6
Alun-Alun	13	4	17
Kenanga	4	0	4
Jumlah	27	23	50
Persentase	54	46	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Sejenis dalam tabel tersebut adalah jenis dagangan yang dijual seperti makanan dengan makanan tanpa membedakan makanannya. Meskipun demikian, para pedagang memilih untuk membedakan jenis dagangannya untuk menghindari persaingan. Misalnya pedagang nasi grombyang tidak berdekatan dengan pedagang nasi grombyang yang lain, tetapi diselingi oleh pedagang sop kambing. Disisi lain pedagang minuman biasanya bersebelahan dengan pedagang makanan seperti terjadi pada lokasi alun-alun. Pedagang yang berjualan makanan seperti mie ayam, soto, bakso dan bubur akan bersebelahan dengan pedagang minuman seperti es serut, minuman botol dan kelapa muda. Pengelompokkan ini terjadi dengan sendirinya karena para pedagang menyadari bahwa dagangan mereka merupakan barang komplementer atau barang yang saling melengkapi.

4.2.4 Lama Waktu Aktivitas

Kegiatan usaha pedagang kaki lima merupakan kegiatan yang tidak pernah terhenti. Dalam kurun waktu satu minggu sebagian besar pedagang kaki lima mengungkapkan bahwa mereka tidak mempunyai hari libur, bahkan di hari-hari libur mereka tetap menjalankan usahanya karena justru di hari-hari tersebut diharapkan mereka mampu menarik lebih banyak konsumen.

Dari hasil survai kepada responden PKL diperoleh data seperti pada tabel IV.13

TABEL IV.13
LAMA WAKTU AKTIVITAS PKL

Lokasi	Lama Aktivitas (dalam jam sehari)				Jumlah
	<= 4	5-8	9-11	> 11	
Veteran	0	5	3	2	10
Sirandu	1	1	4	0	6
Re Martadinata	0	7	0	0	7
Mulyoharjo	0	1	2	3	6
Alun-Alun	0	2	10	5	17
Kenanga	0	4	0	0	4
Jumlah	1	20	19	10	50
Persentase	2	40	38	20	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lama waktu aktivitas yang paling dominan adalah 5-8 jam sehari sebanyak 40%, lama aktivitas 9-11 jam sebanyak 38% dan yang lebih dari 11 jam sebanyak 20% serta aktivitas PKL selama 4 jam atau kurang hanya 2%.

Ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima merupakan pekerja keras dengan jam kerja per hari jauh di atas jam kerja normal yakni 40 jam seminggu,

seperti yang ditemukan dalam penelitian Dewan Riset Nasional (1995) maupun penelitian Evers (1993). Dalam penelitiannya Evers menemukan bahwa pedagang kaki lima biasanya bekerja tanpa libur dan bekerja seminggu penuh dengan jam kerja yang panjang. Berdasarkan pengamatan di lapangan tercatat bahwa pedagang kaki lima tidak selalu membuka dan menutup usaha kaki lima pada jam yang tepat setiap harinya. Ciri khas waktu usaha pedagang kaki lima adalah fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan, meskipun tetap memiliki regularitas waktu yang tetap. Dengan adanya perda No.28 tahun 2002 dari Pemerintah Kabupaten Pemalang berpengaruh terhadap waktu aktivitas para pedagang misalnya pada lokasi Jl. RE Martadinata waktu yang diperbolehkan adalah mulai pukul 16.00 sampai dengan 01.00, sehingga para pedagang pun memulai usaha pada lokasi ini pada sore hari.

4.3. Analisis Karakteristik Lokasi PKL

Seperti telah diketahui sebelumnya pemilihan lokasi penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002. Adapun jumlah PKL pada lokasi tersebut adalah seperti tercantum pada tabel IV.14 berikut:

TABEL IV.14
JUMLAH PKL

No	LOKASI	Jenis Usaha			Jumlah	
		Makanan	Non Makanan	Jasa		
		Populasi	Populasi	Populasi	Populasi	Persentase
1	Jalan Veteran	11	31	10	52	20,7
2	Lapangan Sirandu	20	5	4	29	11,6
3	Jalan R.E Martadinata	34	0	0	34	13,5
4	Lapangan Mulyoharjo	9	19	0	28	11,2
5	Alun-Alun	73	14	0	87	34,7
6	Jalan Kenanga	16	0	5	21	8,4
Jumlah		163	69	19	251	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel tersebut nampak bahwa jumlah PKL terbesar adalah pada lokasi Alun-alun Kota Pemalang yaitu 34,7%, kemudian Jalan Veteran sebesar 20,7%, Jalan RE Martadinata sebesar 13,5%, Lapangan Mulyoharjo dan Lapangan Sirandu masing-masing 11,2 dan 11,6 % dan Jalan Kenanga sebesar 8,4 %.

Bahwa alun-alun merupakan tempat yang paling diminati oleh PKL karena alun-alun adalah tempat yang menjadi pusat keramaian pada Kota Pemalang. Sebagaimana seperti kegiatan perdagangan yang lain, PKL juga mempertimbangkan lokasi. Para pedagang akan mendekatkan diri pada konsumen tujuan sehingga mereka akan beraktivitas pada lokasi-lokasi yang mempunyai tingkat kunjungan tinggi. Aktivitas PKL pada umumnya akan memilih lokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, seperti pada simpul-simpul transportasi atau lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar maupun ruang terbuka (Mc.Gee dan Yeung, 1997:61).

Berdasarkan hasil survai, responden PKL menyatakan bahwa alasan mereka menempati lokasi tersebut yang paling dominan adalah tempat tersebut merupakan tempat yang ramai dikunjungi masyarakat sebanyak 27 responden (54%). Kemudian alasan karena pendapatan yang memuaskan hanya sebanyak 4 responden (8%), sementara alasan karena dekat dengan tempat tinggal sebanyak 8 orang (16%) dan alasan lainnya sebanyak 11 orang (22%). Dari hasil wawancara, dengan responden PKL, alasan lainnya adalah antara lain lokasi tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah, lokasi tersebut merupakan tempat berjualan sejak dari orangtuanya dan lokasi tersebut belum banyak saingannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.15 berikut:

TABEL IV.15
ALASAN PEMILIHAN LOKASI

Luas	Alasan Pemilihan Lokasi				Jumlah
	Ramai	Pendapatan memuaskan	Transport murah/dekat rumah	Lainnya	
Veteran	6	2	0	2	10
Sirandu	4	0	1	1	6
Re Martadinata	5	0	0	2	7
Mulyoharjo	0	0	1	5	6
Alun-Alun	10	1	6	0	17
Kenanga	2	1	0	1	4
Jumlah	27	4	8	11	50
Persentase	54	8	16	22	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Ternyata dari hasil survai tersebut alasan utama PKL dalam memilih lokasi tempat berdagang adalah mendekatkan diri kepada keramaian atau pembeli seperti yang telah dinyatakan Bromley (dalam Manning dan Effendi, 1996:236) bahwa dalam memilih lokasi bagi aktivitas usahanya, PKL berusaha untuk

mendekati pasar atau pembeli. Maka dari itu mereka akan cenderung memilih lokasi yang dekat dengan pusat keramaian.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL pada keenam lokasi penelitian tersebut berkembang pada kawasan yang memiliki intensitas kunjungan tinggi yang sesuai dengan karakteristik PKL.

4.3.1 Ruang Aktivitas PKL

Aktivitas PKL cenderung menempati ruang publik yang tersedia misalnya trotoar, badan jalan serta lahan parkir. Tabel IV.16 berikut menunjukkan jumlah PKL menurut ruang aktivitasnya yang dipergunakan.

TABEL IV.16
RUANG AKTIVITAS

Lokasi	Ruang Aktivitas				Jumlah
	Trotoar	Lahan Parkir	Badan jalan	lainnya	
Veteran	10	0	0	0	10
Sirandu	1	5	0	0	6
Re Martadinata	0	0	7	0	7
Mulyoharjo	0	0	0	6	6
Alun-Alun	0	1	13	3	17
Kenanga	0	2	2	0	4
Jumlah	11	8	22	9	50
Persentase	22	16	44	18	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tiap lokasi ruang aktivitas yang dipergunakan adalah berbeda-beda. Pada ruas jalan Veteran seluruh responden PKL mempergunakan trotoar sebagai ruang aktivitasnya. Aksesibilitas yang tinggi menyebabkan para pedagang memanfaatkan trotoar untuk menawarkan dagangannya kepada konsumen. Trotoar merupakan tempat yang paling mudah dicapai/dilihat oleh konsumen.

Sementara pada lapangan Sirandu hampir semua responden (5 orang) menempati lahan parkir sebagai tempat untuk berjualan sedangkan 1 orang menempati trotoar. Menurut para pedagang, mereka telah ditempatkan pada lahan parkir oleh petugas satpol pamong praja

Pada ruas jalan RE Martadinata seluruh responden menempati badan jalan sebagai ruang aktivitasnya. Sekali lagi hal ini mereka lakukan adalah semata-mata telah mendapatkan izin dari pemerintah. Seluruh responden pada Lapangan Mulyoharjo menempati kios-kios yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pada ruas jalan Kenanga 2 orang responden menempati tempat parkir di depan pertokoan dan 2 orang lainnya menempati sebagian badan jalan. Pada ruas jalan ini penempatan yang ada terlihat belum rapi.

Responden yang berada pada alun-alun sebagian besar memilih badan jalan sebagai tempat aktivitas mereka, 3 orang memilih berada di tengah alun-alun sebagai tempat berjualan dan 1 orang memilih lahan parkir GOR Kridanggo yang berada di depan alun-alun. Responden yang memilih badan jalan ada yang berada pada jalur cepat yaitu pedagang yang berada di sebelah utara alun-alun, Namun yang paling besar adalah yang berada pada jalur lambat. Hal ini karena telah ada persetujuan yang tidak tertulis antara pemerintah daerah melalui satpol PP dengan para PKL yang berada pada kawasan ini.

4.3.2 Luas Ruang Aktivitas PKL

Dari hasil survai dan pengamatan di lapangan dapat diketahui bahwa pemanfaatan ruang publik untuk PKL cukup luas sehingga menurunkan fungsi

ruang publik yang ada. Tabel IV.17 berikut menunjukkan luas ruang yang dimanfaatkan oleh PKL

TABEL IV.17
LUAS RUANG AKTIVITAS PKL

Lokasi	Luas			Jumlah
	< 3 M2	3 - 5 M2	> 5 M2	
Veteran	4	4	2	10
Sirandu	2	3	1	6
Re Martadinata	0	1	6	7
Mulyoharjo	0	0	6	6
Alun-Alun	10	7	0	17
Kenanga	1	0	3	4
Jumlah	17	15	18	50
Persentase	34	30	36	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas terlihat bahwa pemanfaatan ruang oleh PKL cukup luas terbukti dari banyaknya pedagang yang menggunakan ruang lebih dari 5 M2.

TABEL IV.18
HUBUNGAN ANTARA SARANA DAGANG DENGAN LUAS RUANG AKTIVITAS PKL

Sarana Dagang	Luas tempat			Total
	< 3 M ²	3 - 5 M ²	> 5 M ²	
Warung Tenda	-	-	12	12
Gerobak/Kereta Dorong	14	14	-	28
Gelaran/dasaran	3	1	-	4
Kios	-	-	5	5
Lainnya	-	-	1	1
Total	17	15	18	50
Asymp. Sig	0,000	Kesimpulan :	Ada hubungan antara sarana dagang dengan luas ruang dan mempunyai keterkaitan yang erat.	
Contingency Coefficient	0,712			

Sumber: Data primer diolah, 2005

Hasil tabulasi silang antara sarana dagang dan luas tempat membuktikan bahwa ada hubungan antara bentuk sarana dagang yang dipergunakan dengan luas tempat usahanya dan memiliki keterkaitan yang erat.

Warung/tenda serta kios memiliki luas yang lebih dari 5 M², sedangkan bentuk gerobak dan gelaran memiliki luas ruang yang lebih kecil. Sehingga dalam peraturan daerah perlu diperhitungkan jenis sarana dagang dan luas tempat agar dapat dibatasi jumlah PKL yang dapat menempati suatu lokasi.

4.3.3 Jarak Lokasi Usaha Dengan Tempat Tinggal

Menurut pengakuan dari responden PKL, alamat tempat tinggal mereka saat ini adalah sebagai berikut :

TABEL IV.19
ALAMAT TEMPAT TINGGAL RESPONDEN PKL

LOKASI PKL	Alamat tempat tinggal	Jumlah
Veteran	wanarejan	6
	pekunden	4
Lap.Sirandu	bojongbata	4
	silarang	1
	ulujami	1
RE Martadinata	pelutan	4
	kebondalem	3
Lap Mulyoharjo	pegatungan	6
Alun-alun	kebondalem	12
	pelutan	5
Kenanga	cokrah	1
	pekunden	1
	pelutan	2
Jumlah		50

Sumber: Data primer diolah, 2005

Jarak lokasi tempat usaha dengan tempat tinggal responden PKL cenderung pada jarak < 1 kilometer (84%). PKL dengan jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal antara 1-2 kilometer sebanyak 14 %, serta dengan jarak lokasi lebih

dari 2 kilometer hanya 2%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.20 berikut:

TABEL IV.20
JARAK LOKASI USAHA DENGAN TEMPAT TINGGAL

Lokasi	Jarak lokasi dgn rumah			Jumlah
	<=1 Km	1-2 Km	> 2 Km	
Veteran	6	4	0	10
Sirandu	5	0	1	6
Re Martadinata	5	2	0	7
Mulyoharjo	6	0	0	6
Alun-Alun	17	0	0	17
Kenanga	3	1	0	4
Jumlah	42	7	1	50
Persentase	84	14	2	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas terbukti bahwa jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL cenderung dekat. Hal ini sesuai dengan teori lokasi yang dikemukakan oleh Djojodipuro(1992:30) yang menyatakan bahwa penting untuk menentukan lokasi sedemikian rupa sehingga diperoleh biaya angkutan yang minimum.

Menurut para pedagang dari keenam lokasi, rata-rata mereka hanya berjalan kaki menuju tempat usahanya. Mereka juga enggan apabila pemerintah menempatkan mereka pada lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya. Hal ini patut menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk penataan PKL.

4.3.4 Perizinan

Perizinan merupakan masalah yang cukup pelik bagi pedagang kaki lima. Setelah dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima perizinan menjadi syarat yang cukup penting bagi kelangsungan hidup usaha pedagang kaki lima. Peraturan

Daerah tersebut mewajibkan setiap pedagang kaki lima memiliki izin penggunaan tempat usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin penggunaan tempat usaha tersebut berlaku selama satu tahun dan kemudian dapat diperpanjang. Untuk mengajukan izin tersebut PKL harus melengkapinya dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari kepala Desa/Lurah setempat.

Namun dari hasil survai diketahui bahwa sebagian besar PKL yang berada pada keenam lokasi tersebut tidak mempunyai izin. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.21 berikut:

TABEL IV.21
IZIN PENGGUNAAN LOKASI USAHA DARI PEMERINTAH

Lokasi	Mempunyai Izin		Jumlah
	Ya	Tidak	
Veteran	0	10	10
Sirandu	4	2	6
Re Martadinata	7	0	7
Mulyoharjo	6	0	6
Alun-Alun	0	17	17
Kenanga	0	4	4
Jumlah	17	33	50
Persentase	34	66	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada lokasi ruas jalan Veteran, ruas jalan Kenanga dan Alun-alun semua responden PKL menyatakan belum mempunyai izin dari Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Pada lokasi ruas jalan Veteran dan jalan Kenanga mereka beralasan bahwa mereka telah ditempatkan oleh petugas Satpol PP sehingga merasa tidak perlu untuk meminta izin lagi. Responden alun-alun menyatakan bahwa sebenarnya mereka telah mengetahui lokasi usaha mereka saat ini adalah ilegal sehingga mereka tidak mengajukan izin

kepada pemerintah. Mereka hanya mendapat izin secara lisan dari kepala satpol PP saat itu.

Sementara pada ruas jalan RE Martadinata dan Lapangan Mulyoharjo semua responden menyatakan telah memiliki surat izin tersebut. Responden dari lapangan Sirandu sebanyak 4 orang menyatakan telah memiliki izin dan 2 orang belum memiliki izin.

Banyaknya PKL yang tidak mempunyai izin membuktikan kurang tegasnya petugas dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut sehingga semakin bertambah pedagang yang menempati tempat-tempat yang dilarang.

Sebenarnya dengan memiliki surat izin dimaksud, pedagang dapat merasa lebih aman dalam menjalankan usahanya dan tidak takut lagi terkena pengusuran.

Dari sisi pemerintah, apabila semua pedagang diberikan pengarahan agar mengajukan izin tersebut maka akan memudahkan petugas untuk menertibkan pedagang yang tidak memiliki izin pada lokasi yang telah ditetapkan dan kepada pedagang yang telah memiliki izin dapat diminta retribusi yang sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.

4.4. Analisis Kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pedagang kaki lima pada keenam lokasi penelitian dalam kegiatannya.

a. Jalan Veteran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang nomor 28 Tahun 2002 tidak dirinci secara jelas tempat untuk usaha PKL. Dari hasil observasi di lapangan, beberapa PKL menempati trotoar di depan toko-toko, ada juga yang menempati badan jalan veteran sebagai tempat usaha. Hal ini akan menambah sesak jalan Veteran yang telah penuh oleh angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat.

Dalam perda juga disebutkan para pedagang wajib mempunyai izin usaha, namun dari hasil survai menunjukkan semua responden menyatakan belum memiliki surat izin. Mereka hanya memperoleh izin secara lisan dari petugas satpol PP.

Waktu berusaha pada jalan Veteran adalah pukul 06.00 sampai dengan 01.00. Pada kenyataannya, hampir semua pedagang hanya berjualan sampai pukul 18.00. Hal ini karena PKL seperti juga sektor informal lainnya mengikuti aktivitas lingkungannya. Aktivitas pada ruas jalan ini adalah pasar pagi dan juga toko-toko yang berada pada ruas jalan ini pada umumnya tutup setelah pukul.18.00 sehingga ruas jalan veteran akan sepi pada malam hari.

Sarana dagang yang dipergunakan oleh PKL pada lokasi ini cukup beragam, namun dari hasil pengamatan nampak ketidak rapian karena tidak diatur secara lebih baik. Bahkan beberapa PKL meninggalkan peralatan/sarana dagang pada tempat usaha.

b. Lapangan Sirandu

Pada lokasi ini waktu usaha yang ditentukan adalah pukul 16.00 sampai dengan pukul 01.00, namun dari hasil pengamatan dan hasil survai primer, para pedagang umumnya memulai kegiatan mereka dari pagi hingga malam hari. Sarana dagang yang dipergunakan ditinggal setelah selesai beraktivitas. Disamping melanggar peraturan, sarana dagang tersebut akan mengurangi ketertiban dan keindahan pada lokasi ini.

Walaupun beberapa pedagang mengaku telah mempunyai izin dari pemerintah, namun masih ada beberapa pedagang yang tidak mempunyai izin. Selain sarana dagang ditinggal pada lokasi, pelanggaran lain yang dapat diamati adalah warung tenda dengan panjang tenda lebih dari 5 meter, padahal dalam peraturan disebutkan bahwa panjang tenda maksimal 5 meter. Ukuran luas sarana dagang akan mempengaruhi jumlah pedagang yang akan mengisi tempat ini.

c. Jalan R.E Martadinata

Pada ruas jalan RE Martadinata secara umum terlihat lebih rapi daripada keenam lokasi lainnya. Namun dari hasil pengamatan terlihat beberapa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya nomor 28 Tahun 2002. Sarana dagang yang dipergunakan berupa tiang-tiang pancang tenda, meja dan kursi masih banyak yang ditinggal pada lokasi ini setelah aktivitas mereka. Sedangkan dari waktu usaha dan perizinan, mereka telah menaati peraturan yang ada.

d. Lapangan Mulyoharjo

Karena lokasi ini diperuntukkan khusus untuk pedagang kaki lima, maka pada umumnya para pedagang telah mempunyai izin sejak mereka menempati lokasi ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima, pada Pasal 7 disebutkan bahwa setiap pedagang kaki lima yang telah memiliki izin **dilarang** untuk mengubah dan memperluas tempat usaha tanpa izin, memindahtangankan izin tempat usahanya kepada pihak lain tanpa izin Bupati, meninggalkan peralatan/barang dagangan di tempat jualan sebelum waktu yang ditetapkan, membakar sampah dan kotoran lain di sembarang tempat, menggunakan tempat usahanya tidak sesuai izin peruntukkannya, menjual makanan/minuman keras yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menempati lahan untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tidur pada tempat usaha, mendirikan bangunan permanen di lokasi yang ditentukan serta melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang ditentukan. Namun dari hasil pengamatan dapat dilihat bahwa pada lokasi ini petak-petak tersebut telah diubah menjadi kios-kios semi permanen dan peralatan dagang ditinggal ditempat serta para pedagang mempergunakan tempat ini untuk tidur untuk menjaga peralatan dagang mereka.

e. Alun-Alun

Alun-alun kota Pemalang hanya dibolehkan untuk berjualan pada 7 hari sebelum dan sesudah lebaran serta 1 hari menjelang pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Pada kenyataannya, setiap hari para pedagang berjualan pada lokasi ini. Bahkan jumlahnya meningkat pada hari Sabtu malam Minggu.

Pada Sabtu malam, merupakan hari yang paling ramai dimana masyarakat Pemalang banyak berkumpul di alun-alun untuk berjalan-jalan dan bersantai bersama keluarga. Sarana yang dipergunakan oleh pedagang yang berlokasi disini pada umumnya adalah gerobak yang dapat dipindah-pindahkan, namun ada juga yang pedagang yang menggunakan plastik selebar lebih dari 5 meter untuk menutup dagangannya.

f. Jalan Kenanga

Pada ruas jalan ini para pedagang belum mempunyai izin resmi dari pemerintah. Mereka beranggapan bahwa tempat mereka berjualan saat ini telah tepat karena telah ditempatkan oleh petugas satpol. Meskipun waktu usaha yang diperbolehkan adalah mulai pukul 06.00 sampai 01.00, tetapi banyak pedagang yang memulai pada sore hingga malam hari terutama pedagang yang menjual jenis makanan. Meskipun lokasi ini direncanakan sebagai pusat perdagangan dan jasa, tetapi masih ada beberapa perumahan penduduk yang berada pada ruas jalan Kenanga. Beberapa masyarakat yang kebetulan depan rumahnya menjadi tempat berjualan PKL sempat mengeluh karena lingkungan mereka menjadi kurang nyaman. Pada waktu pemerintah menetapkan lokasi ini menjadi tempat usaha para pkl, mereka tidak mengetahuinya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat beberapa contoh ketidaksesuaian aktivitas PKL dengan perda nomor 28 tahun 2002 pada gambar 4.4.



Sumber : Hasil Penelitian, 2005

GAMBAR 4.4 **BEBERAPA KETIDAKSESUAIAN AKTIVITAS PKL DENGAN** **KEBIJAKAN PEMERINTAH**

4.5. Analisis Preferensi PKL

Analisis berikut adalah untuk mengetahui preferensi PKL terhadap lokasi yang telah ditetapkan.

4.5.1 Preferensi berkelompok

Menurut responden PKL preferensi terhadap pengelompokkan dalam usaha berdagangnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.22
PREFERENSI BERKELOMPOK

LOKASI	Kelompok		Jumlah
	Sejenis	Bercampur	
Veteran	0	10	10
Sirandu	0	6	6
Re Martadinata	5	2	7
Mulyoharjo	1	5	6
Alun-Alun	7	10	17
Kenanga	0	4	4
Jumlah	13	37	50
Persentase	26	74	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

TABEL IV.23
PREFERENSI PKL BERKELOMPOK DAN ALASANNYA

Kelompok	Alasan			Total
	mengurangi persaingan	Memudahkan pilihan	mudah dicari konsumen	
Sejenis		4	9	13
Bercampur	26	11		37
Jumlah	26	15	9	50

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar pedagang (74%) memilih untuk menjajakan dagangannya secara bercampur dengan jenis dagangan yang lain dengan alasan untuk mengurangi persaingan antara pedagang itu sendiri dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melihat-lihat terlebih dahulu

sebelum menentukan pilihannya. Yang dimaksud bercampur dengan dagangan jenis lain yaitu misalnya pedagang rokok akan memilih berdagang pada lokasi yang bersebelahan dengan jenis dagangan selain rokok. Sementara itu pedagang yang memilih berjualan dengan jenis dagangan yang sama mengungkapkan bahwa alasan mereka adalah agar mudah dicari oleh konsumen. Karena lokasi tersebut telah dikenal sebagai tempat berjualan suatu barang.

4.5.2 Preferensi Terhadap Pengaturan

Dengan adanya perda Nomor 28 tahun 2002 tentang pengaturan Pedagang Kaki Lima sebenarnya telah ada alat hukum untuk mengatur dan menata para pedagang menjadi lebih tertib dan teratur. Namun demikian dari hasil survai di lapangan, ternyata preferensi para pedagang terhadap perlunya pengaturan adalah cukup besar. Sebagian besar responden (60%) PKL menganggap perlu diadakan pengaturan. Alasan utama mereka yang menginginkan pengaturan pada lokasi adalah sebagian besar (36%) agar lebih teratur rapi dan sebagian yang lain (24%) supaya dapat menarik konsumen sehingga akan meningkatkan pendapatan mereka. Para pedagang yang tidak menginginkan adanya pengaturan mengemukakan alasannya adalah bahwa tempat mereka telah rapi dan teratur dan sebagian lagi menganggap pengaturan akan memerlukan biaya dan tenaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.24 berikut:

TABEL IV.24
PREFERENSI PKL TERHADAP PENGATURAN

LOKASI	Perlu Pengaturan				Jumlah
	Alasan Ya		Alasan Tidak		
	Lebih Teratur	Menarik Konsumen	Sudah Rapi	Perlu biaya/tenaga	
VETERAN	3	4	0	3	10
SIRANDU	4	1	0	1	6
RE MARTADINATA	0	1	6	0	7
MULYOHARJO	0	3	2	1	6
ALUN-ALUN	8	3	2	4	17
KENANGA	3	0	0	1	4
Jumlah	18	12	10	10	50
Persentase	36	24	20	20	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Sedangkan menurut para pedagang, hal-hal yang perlu dilakukan pengaturan oleh pemerintah adalah seperti tercantum pada tabel IV.23 berikut:

TABEL IV.25
HAL-HAL YANG PERLU DIATUR

LOKASI	Yang perlu diatur				Jumlah
	Jenis Dagangan	Sarana Dagang	Waktu	Tempat	
VETERAN	0	4	0	6	10
SIRANDU	0	4	0	2	6
RE MARTADINATA	2	2	1	2	7
MULYOHARJO	0	2	2	2	6
ALUN-ALUN	3	5	3	6	17
KENANGA	0	2	1	1	4
Jumlah	5	19	7	19	50
Persentase	10	38	14	38	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Tabel diatas menunjukkan bahwa menurut para pedagang, hal yang perlu diatur adalah sarana dagang dan tempat usaha, kemudian waktu dan jenis dagangan. Bagi pedagang pengaturan sarana dagang, tempat usaha, waktu serta jenis dagangan akan dapat menarik konsumen. Pengaturan tersebut diharapkan juga dapat membatasi persaingan antar pedagang baru yang akan memasuki lokasi tersebut.

Meskipun telah ada Perda yang mengatur Pedagang Kaki Lima, namun seperti pada umumnya sektor informal, kegiatan PKL biasanya belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada belum mendukung kegiatannya. Misalnya adanya fasilitas dan utilitas umum seperti listrik, tempat parkir, air bersih, sampah untuk dapat memenuhi kebutuhan kegiatannya. Pada keenam lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima ternyata fasilitas umum tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan para pedagang, setidaknya dari hasil survei primer seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL IV.26
FASILITAS UMUM YANG PERLU DITAMBAH

LOKASI	Fasilitas umum yang perlu ditambah					Jumlah
	Listrik	Air bersih	Tempat Sampah	Parkir	Toilet	
VETERAN	0	3	2	2	3	10
SIRANDU	0	2	0	0	4	6
RE MARTADINATA	4	1	0	0	2	7
MULYO HARJO	0	4	2	0	0	6
ALUN-ALUN	2	6	0	7	2	17
KENANGA	3	0	0	0	1	4
Jumlah	9	16	4	9	12	50
Persentase	18	32	8	18	24	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Pada ruas jalan Veteran menurut responden PKL, fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih, tempat sampah, tempat parkir serta toilet. Pada saat ini para pedagang membawa air sendiri dari rumahnya untuk mencukupi kebutuhan cuci piring. Sedangkan pada Lapangan Sirandu fasilitas umum yang perlu

ditambah adalah air bersih, dan toilet, karena tempat parkir telah cukup tersedia serta tempat sampah telah ada dan tiap hari petugas Dinas Kebersihan telah mengangkut sampah yang ada.

Pada ruas jalan RE Martadinata sebagian besar responden menyatakan fasilitas yang perlu ditambah adalah jaringan listrik, begitu juga dengan responden pada ruas jalan Kenanga. Pada saat ini mereka hanya memanfaatkan lampu minyak atau lampu petromax sebagai penerangannya.

Menurut responden yang berada di Alun-alun kota Pemalang belum adanya sarana air bersih dan kekurangan tempat parkir merupakan kesulitan yang mereka hadapi. Setiap hari mereka membawa jerigen yang berisi air untuk mencuci piring dan gelas yang telah dipergunakan. Karena alun-alun merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat, maka tempat parkir yang memadai diperlukan untuk meletakkan kendaraan mereka.

Saat ini dari keenam lokasi yang ada, lapangan Mulyoharjo adalah lokasi yang telah memiliki sarana pendukung yang lebih lengkap. Jaringan listrik, tempat parkir, air bersih dan toilet telah ada. Namun menurut responden PKL, air bersih yang ada sering tidak mengalir sehingga para pedagang akhirnya membawa air dari tempat tinggalnya. Sementara itu tempat sampah yang ada masih belum cukup meskipun setiap hari petugas kebersihan telah membawa sampah dan membersihkan lokasi. Ketersediaan fasilitas umum akan menjadikan kenyamanan bagi pedagang untuk beraktivitas.

4.5.3 Preferensi Kesesuaian Lokasi

Berdasarkan survai primer yang dilakukan, sebagian besar (90%) reponden PKL mengungkapkan bahwa lokasi yang saat ini mereka tempati adalah sesuai pilihan mereka dan hanya sebagian kecil (10%) yang menyatakan bahwa lokasi tersebut tidak/belum sesuai pilihannya. Alasan utama lokasi tersebut sesuai adalah dekat keramaian (56%), transportasi mudah (22%) serta alasan yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel IV.27 berikut:

TABEL IV.27
PREFERENSI PKL TERHADAP KESESUAIAN LOKASI
DAN ALASANNYA

LOKASI	Lokasi sesuai pilihan						Jumlah
	Alasan Ya			Alasan Tidak			
	Dekat keramaian	Lokasi telah ditentukan	Transport Mudah	Masih sepi	Merasa Terganggu	Lainnya	
Veteran	6	0	2	0	0	2	10
Sirandu	5	0	0	0	0	1	6
Re Martadinata	5	0	2	0	0	0	7
Mulyoharjo	0	3	1	2	0	0	6
Alun-Alun	12	0	5	0	0	0	17
Kenanga	0	3	1	0	0	0	4
Jumlah	28	6	11	2	0	3	50
Persentase	56	12	22	4	0	6	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Responden PKL yang menjawab tidak sesuai memberikan alasan yaitu lokasi tersebut masih sepi(4%) adalah responden yang berada pada lokasi lapangan Mulyoharjo. Hal ini dapat dimengerti karena lokasi ini bukan merupakan jalur utama yang dilalui oleh angkutan kota kecuali ada keramaian khusus misalnya pameran, pasar malam dan acara olah raga, lapangan ini terasa sepi. Responden yang beralasan lainnya (6%) adalah pada saat ini mereka baru mulai

untuk berdagang dan belum tahu apakah nantinya akan menetap di lokasi mereka saat ini atau tidak.

4.6 Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap PKL dan Lokasinya

Selanjutnya akan dibahas persepsi masyarakat mengenai keberadaan PKL pada keenam lokasi penelitian. Karena keterbatasan penulis maka sampel yang diambil adalah disamakan dengan jumlah sampel PKL dari masing-masing lokasi. Berikut adalah tabel jumlah sampel dari masyarakat:

TABEL IV.28
JUMLAH SAMPEL MASYARAKAT

No	LOKASI	Jumlah sampel PKL	Jumlah sampel masy.
1	Jalan Veteran	10	10
2	Lapangan Sirandu	6	6
3	Jalan R.E Martadinata	7	7
4	Lapangan Mulyoharjo	6	6
5	Alun-Alun	17	17
6	Jalan Kenanga	4	4
Jumlah		50	50

Sumber: Data primer diolah, 2005

Pembahasan persepsi masyarakat mengenai keberadaan PKL dan lokasinya meliputi alasan berbelanja, manfaat dan gangguan adanya PKL, pola penyebaran/pengelompokan PKL, perlu tidaknya pengaturan lokasi PKL serta kesesuaian lokasi PKL.

4.6.1 Alasan Masyarakat Berbelanja di PKL

Tabel di bawah ini menunjukkan alasan masyarakat berbelanja di 6 lokasi PKL yang berbeda. Di Veteran, sebanyak 6 orang menyatakan mereka

berbelanja di PKL karena harga yang murah, kemudian 3 orang karena lokasinya yang dekat, dan 1 orang responden karena alasan lainnya.

Pada lapangan Sirandu 3 orang memilih PKL karena harga yang murah, 1 orang karena lokasi yang dekat, dan 1 orang karena alasan lainnya.

Lain halnya di RE Martadinata, 5 responden memilih PKL karena suasana yang santai, 1 orang karena harganya yang murah dan lokasi yang dekat. Untuk responden di Mulyoharjo, sebanyak 4 orang memilih PKL karena lokasi yang dekat dan 2 orang karena harga yang murah.

Di Alun-alun sebanyak 9 orang berbelanja di PKL alun-alun karena alasan suasana yang santai, sedangkan untuk alasan harga dan kedekatan lokasi hanya 6 dan 2 orang. Sedangkan di jalan Kenanga karena harga yang murah 2 orang, alasan kedekatan lokasi dan lainnya masing-masing 1 orang.

TABEL IV.29
ALASAN MASYARAKAT BERBELANJA DI PKL

Lokasi	Alasan				Jumlah
	Harga murah	Lokasi dekat	Suasana santai	Lainnya	
Veteran	6	3	0	1	10
Sirandu	3	2	0	1	6
RE Martadinata	1	1	5	0	7
Mulyoharjo	2	4	0	0	6
Alun-Alun	6	2	9	0	17
Kenanga	2	1	0	1	4
Jumlah	20	13	14	3	50
Persentase	40	26	28	6	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari hasil keseluruhan, maka sebagian besar responden memilih alasan harga yang murah jika berbelanja di PKL (40%), kemudian alasan suasana yang santai (28%), alasan kedekatan lokasi (26%) dan alasan lainnya (6%). Untuk

alasan lainnya, jawaban responden menyatakan berbelanja di PKL sekedar iseng-iseng atau untuk cuci mata.

4.6.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Manfaat Keberadaan PKL

Adapun persepsi masyarakat terhadap manfaat keberadaan PKL dapat dilihat pada tabel IV.30 berikut:

TABEL IV.30
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
MANFAAT KEBERADAAN PKL

Manfaat	Tidak Ada	Lokasi lebih ramai	Mudah mendapat kebutuhan	Lainnya	Jumlah
VETERAN	0	4	5	1	10
SIRANDU	0	4	2	0	6
RE MARTADINATA	0	4	2	1	7
MULYOHARJO	0	3	2	1	6
ALUN-ALUN	0	11	4	2	17
KENANGA	2	1	1	0	4
Jumlah	2	27	16	5	50
Persentase	4	54	32	10	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Pada tabel di atas responden yang menyatakan bahwa PKL tidak memiliki manfaat hampir tidak ada, kecuali di jalan Kenanga sebanyak 2 orang (4%). Hal ini dapat dijelaskan karena yang bersangkutan merasa keberatan dengan adanya PKL di jalan Kenanga dan mereka merasa terganggu dengan adanya PKL tersebut. Mereka merasa penetapan jalan Kenanga sebagai lokasi PKL tidak ada pemberitahuan dari pihak Pemerintah Daerah. Sebanyak 4 orang di Kenanga, Sirandu, dan RE Martadinata merasakan manfaat lokasi yang bertambah ramai karena PKL. Kemudian 1 orang di Kenanga, 3 orang di Mulyoharjo, dan 11 orang di Alun-alun merasakan hal yang sama. Sedangkan untuk manfaat mudah

mendapat kebutuhan sebanyak 5 orang di Veteran; 2 orang di Sirandu, Mulyoharjo, dan RE Martadinata; kemudian 4 orang di Alun-alun; dan 1 orang di Kenanga merasakan hal yang sama.

Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas PKL memiliki manfaat yang bervariasi bagi konsumennya. Namun intinya adalah adanya kemudahan yang diberikan oleh aktivitas PKL karena keberadaan mereka yang cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat.

4.6.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Gangguan Akibat Keberadaan PKL

Pada tabel IV.31 berikut memperlihatkan persepsi masyarakat atas gangguan yang ditimbulkan akibat adanya PKL.

TABEL IV.31
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN
AKIBAT KEBERADAAN PKL

Gangguan	Tidak ada	Trotoar sempit	Parkir sulit	Lingku ngan kotor	Jalanan sesak	Merasa tidak aman	Lainnya	Jumlah
Veteran	0	4	1	1	3	0	1	10
Sirandu	3	1	0	2	0	0	0	6
RE Martadinata	1	0	2	0	4	0	0	7
Mulyoharjo	2	0	0	1	0	0	3	6
Alun-Alun	3	3	1	5	2	1	2	17
Kenanga	0	1	1	1	0	1	0	4
Jumlah	9	9	5	10	9	2	6	50
Persentase	18	18	10	20	18	4	12	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Meskipun PKL telah memberikan manfaat yang tidak sedikit kepada masyarakat, tetapi PKL juga mempunyai dampak negatif berupa gangguan ketidaknyamanan pejalan kaki karena sempitnya trotoar (18%), parkir menjadi

sulit (10%), lingkungan kotor (10%), jalanan yang macet (18%), merasa tidak aman (4%), dan alasan lainnya (6%). Yang dimaksud dengan gangguan lainnya adalah gangguan secara visual yang ditunjukkan oleh tampilan PKL yang tidak teratur dan tidak tertib. Sedangkan 18% masyarakat menganggap bahwa kehadiran PKL tidak memberi gangguan yang berarti. Umumnya masyarakat yang berpendapat demikian adalah masyarakat yang lokasi aktivitasnya belum dipenuhi oleh aktivitas PKL sehingga mereka beranggapan bahwa aktivitas PKL yang ada belum terlalu mengganggu.

4.6.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelompokkan PKL dan Alasannya

Menurut responden Masyarakat terhadap pengelompokkan PKL dalam usaha berdagangnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.32
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOMPOKKAN PKL

LOKASI	Kelompok		Jumlah
	Sejenis	Bercampur	
Veteran	4	6	10
Sirandu	3	3	6
Re Martadinata	6	1	7
Mulyoharjo	2	4	6
Alun-Alun	3	14	17
Kenanga	1	3	4
Jumlah	19	31	50
Persentase	38	62	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat (62%) berpendapat bahwa penataan PKL sebaiknya bercampur dengan jenis dagangan yang lain dengan alasan untuk mengurangi persaingan antara pedagang itu sendiri dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melihat-lihat terlebih dahulu

sebelum menentukan pilihannya. Sementara itu masyarakat yang berpendapat PKL sebaiknya berjualan dengan jenis dagangan yang sama mengemukakan alasan agar mudah dicari oleh konsumen. Karena mungkin telah diketahui bahwa lokasi ini merupakan tempat berjualan suatu barang.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat cenderung berpendapat pengaturan PKL sebaiknya tidak dikelompokkan menurut jenis dagangannya, karena disamping akan mengurangi persaingan antar pedagang itu sendiri juga akan memudahkan masyarakat untuk melihat-lihat keberagaman dagangan PKL sebelum konsumen memutuskan untuk membelinya.

4.6.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan PKL

Dari hasil survai primer diketahui bahwa sebagian masyarakat berpendapat bahwa perlu diadakan pengaturan PKL pada keenam lokasi tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.33
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN PKL

LOKASI	Perlu Pengaturan				Jumlah
	Alasan Ya		Alasan Tidak		
	Lebih Teratur	Menarik Konsumen	Sudah Rapi	Perlu biaya/tenaga	
Veteran	7	2	0	1	10
Sirandu	4	1	0	1	6
Re Martadinata	2	2	3	0	7
Mulyoharjo	1	3	2	0	6
Alun-Alun	12	3	0	2	17
Kenanga	3	1	0	0	4
Jumlah	29	12	5	4	50
Persentase	58	24	10	8	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Dari tabel persepsi masyarakat tentang perlu tidaknya pengaturan kembali PKL, sebagian besar masyarakat 82% (41 responden) berpendapat perlu adanya pengaturan kembali para PKL dan hanya 18% (9 responden) yang menyatakan sebaliknya. Hampir pada keenam lokasi sebagian besar masyarakat berpendapat perlunya pengaturan aktivitas PKL. Sementara mengenai hal-hal yang perlu diatur dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL IV.34
HAL-HAL YANG PERLU DIATUR

LOKASI	Yang perlu diatur				Jumlah
	Jenis Dagangan	Sarana Dagang	Waktu	Tempat	
Veteran	0	6	0	4	10
Sirandu	0	4	0	2	6
Re Martadinata	0	1	3	3	7
Mulyoharjo	0	3	2	1	6
Alun-Alun	3	6	4	4	17
Kenanga	0	0	2	2	4
Jumlah	3	20	11	16	50
Persentase	6	40	22	32	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Menurut masyarakat, hal yang perlu diatur adalah sarana dagang, tempat usaha, kemudian waktu dan jenis dagangan.

Sedangkan sarana dan prasarana yang ada menurut masyarakat masih belum cukup. Seperti listrik, tempat parkir, air bersih, sampah pada keenam lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Bupati Nomor 14 Tahun 2003 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 belum dapat memenuhi kebutuhan kegiatan PKL, setidaknya dari hasil survai primer seperti terlihat pada tabel berikut:

TABEL IV.35
FASILITAS UMUM YANG PERLU DITAMBAH

LOKASI	Fasilitas umum yang perlu ditambah					Jumlah
	Listrik	Air bersih	Tempat Sampah	Parkir	Toilet	
VETERAN	1	2	2	5	0	10
SIRANDU	0	2	2	0	2	6
RE MARTADINATA	4	1	0	0	2	7
MULYOHARJO	0	2	2	0	2	6
ALUN-ALUN	2	2	2	7	4	17
KENANGA	2	1	0	0	1	4
Jumlah	9	10	8	12	11	50
Persentase	18	20	16	24	22	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Pada ruas jalan Veteran menurut persepsi masyarakat, fasilitas utama yang perlu ditambah adalah, tempat parkir. Hal ini dikarenakan pada ruas jalan Veteran sering dilalui oleh kendaraan umum dan tempat parkir yang sedianya disediakan di depan toko dan kios-kios telah diisi oleh pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya pada tempat tersebut. Sedangkan pada Lapangan Sirandu fasilitas umum yang perlu ditambah adalah air bersih, tempat sampah dan toilet.

Pada ruas jalan RE Martadinata sebagian besar responden menyatakan fasilitas yang perlu ditambah adalah jaringan listrik, begitu juga dengan responden pada ruas jalan Kenanga. Masyarakat juga menginginkan penerangan yang cukup pada lokasi PKL.

Menurut responden yang berada di Alun-alun kota Pemalang tempat parkir belum mencukupi sehingga apabila masyarakat berbelanja pada lokasi ini akan memarkir kendaraan pada jalan raya.

Saat ini dari keenam lokasi yang ada, lapangan Mulyoharjo adalah lokasi yang telah memiliki sarana pendukung yang lebih lengkap. Jaringan listrik, tempat

parkir, air bersih dan Toilet telah ada. Namun menurut beberapa responden, air bersih dan toilet tidak berfungsi dengan baik.

4.6.6 Persepsi Masyarakat Terhadap Kesesuaian Lokasi

Berdasarkan survai primer yang dilakukan, 82% reponden masyarakat mengungkapkan bahwa lokasi telah sesuai, sedangkan yang 18% menjawab tidak sesuai. Alasan utama lokasi tersebut sesuai adalah dekat keramaian (36%), transportasi mudah (26%) serta alasan yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 20%. Untuk lebih jelasnya lihat tabel IV.36 berikut:

TABEL IV.36
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESESUAIAN LOKASI PKL
DAN ALASANNYA

LOKASI	Lokasi sesuai pilihan						Jumlah
	Alasan Ya			Alasan Tidak			
	Dekat keramaian	Lokasi telah ditentukan	Transport Mudah	Masih sepi	Merasa Terganggu	Lainnya	
Veteran	3	1	4	0	2	0	10
Sirandu	2	2	2	0	0	0	6
Re Martadinata	3	2	2	0	0	0	7
Mulyoharjo	0	3	0	3	0	0	6
Alun-Alun	10	0	5	0	2	0	17
Kenanga	0	2	0	0	2	0	4
Jumlah	18	10	13	3	6	0	50
Persentase	36	20	26	6	12	0	100

Sumber: Data primer diolah, 2005

Responden masyarakat yang menjawab tidak sesuai memberikan alasan yaitu lokasi tersebut masih sepi (3%) adalah responden yang berada pada lokasi lapangan Mulyoharjo. Lokasi ini boleh dibilang masih sepi kecuali ada keramaian khusus misalnya pameran, pasar malam dan acara olah raga. Letak lapangan yang

bersebelahan dengan pemakaman umum Pegatungan juga menjadi alasan masyarakat enggan berbelanja pada lokasi ini apabila tidak ada kegiatan.

4.7 Analisis Hubungan Antara Preferensi PKL dan Persepsi Masyarakat

Pada bagian ini akan diuraikan hubungan antara preferensi PKL terhadap lokasi dengan persepsi masyarakat. Untuk mempermudah dibuat tabel sebagai berikut:

TABEL IV.37
HUBUNGAN PREFERENSI PKL DAN PERSEPSI MASYARAKAT
PADA KEENAM LOKASI PENELITIAN

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
V E T E R A N	Pola pengelompokan	- PKL pada lokasi ini lebih memilih untuk bercampur daripada ber-kelompok dengan alasan dapat mengurangi persaingan dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli.	- Menurut sebagian besar masyarakat, PKL pada lokasi ini sebaiknya bercampur sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dan melihat-lihat sebelum membeli.	Pola pengelompokan yang dipilih adalah bercampur karena dapat mengurangi persaingan antar pedagang dan dapat memudahkan masyarakat untuk melihat-lihat barang dagangan sebelum membeli.
	Pengaturan	- PKL pada lokasi ini ternyata meng-inginkan agar diadakan pengaturan dengan alasan untuk menarik konsumen dan lebih teratur	- Sebagian besar masyarakat menginginkan pengaturan pada lokasi ini dengan alasan supaya lebih teratur	Baik masyarakat maupun PKL menginginkan adanya pengaturan disebabkan kondisi yang ada pada saat ini masih belum teratur. Adanya pengaturan lebih lanjut akan menarik konsumen untuk datang dan berbelanja serta akan menjadikan pemandangan yang lebih tertib.
	Hal yang perlu diatur	- Hal yang perlu diatur menurut PKL pada lokasi ini adalah tempat dan sarana dagang	- Menurut masyarakat hal yang perlu diatur adalah sarana dagang dan tempat	PKL dan masyarakat menginginkan pengaturan pada sarana dagang dan tempat usaha. Pengaturan terhadap sarana dagang dapat dilakukan dengan menentukan jenis sarana dagang yang diperbolehkan pada lokasi ini, pengaturan tempat

lanjutan :

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
L A P A N G A N S I R A N D U	Fasilitas Umum yang perlu ditambah	- Menurut PKL fasilitas umum yang perlu dilengkapi pada lokasi ini adalah air bersih, Toilet parkir dan tempat sampah	- Sebagian besar masyarakat berpendapat fasilitas yang perlu ditambah pada lokasi ini adalah tempat parkir	usaha adalah pengaturan pada tempat dimana pedagang beraktivitas misalnya pada trotoar saja, atau bahu jalan sehingga tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan maupun trotoar Fasilitas umum yang ada pada lokasi ini belum dibuat khusus bagi PKL, air bersih, Toilet sangat diperlukan bagi aktivitas PKL kurangnya lahan parkir juga membuat ruas jalan ini menjadi lebih sesak dan sempit bagi masyarakat
	Kesesuaian Lokasi	- Sebagian besar PKL menyatakan bahwa lokasi ini cocok sebagai tempat berjualan dengan alasan dekat keramaian dan mudah transportasi	- Menurut sebagian besar masyarakat lokasi ini sesuai sebagai tempat berjualan PKL dengan alasan mudah transportasi, dekat keramaian	Ruas Jalan Veteran sangat sesuai untuk aktivitas PKL karena mempunyai aksesibilitas tinggi yang dilewati oleh angkutan umum baik dalam maupun luar kota.
	Pola pengelompokan	- PKL pada lokasi lebih memilih untuk bercampur daripada berkelompok dengan alasan dapat mengurangi persaingan dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli.	- Masyarakat pada lokasi ini mempunyai persepsi yang sama baik antara PKL yang berkelompok dengan sejenis maupun yang bercampur	Pola pengelompokan yang dipilih adalah bercampur karena dapat mengurangi persaingan antar pedagang dan dapat memudahkan masyarakat untuk melihat-lihat barang dagangan sebelum membeli.
	Pengaturan	- PKL pada lokasi ini juga menginginkan agar diadakan pengaturan dengan alasan lebih teratur dan untuk menarik konsumen	- Sebagian besar masyarakat menginginkan pengaturan pada lokasi ini dengan alasan supaya lebih teratur	Baik masyarakat maupun PKL menginginkan adanya pengaturan disebabkan kondisi yang ada pada saat ini masih belum teratur. Adanya pengaturan lebih lanjut akan menarik konsumen untuk datang dan berbelanja serta akan menjadikan pemandangan yang lebih nyaman dilihat.
	Hal yang perlu diatur	- Pada lokasi ini PKL menginginkan pengaturan pada sarana dagang dan tempat berdagang	- Menurut masyarakat hal yang perlu diatur adalah sarana dagang dan tempat berdagang	PKL dan masyarakat menginginkan pengaturan pada sarana dagang dan tempat usaha. Pengaturan terhadap sarana dagang

lanjutan :

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
	Fasilitas Umum yang perlu ditambah	- Pada lokasi ini menurut PKL fasilitas yang perlu ditambah adalah toilet dan air bersih	- Menurut masyarakat fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih, tempat sampah dan toilet	dapat dilakukan dengan menentukan jenis sarana dagang yang diperbolehkan pada lokasi ini, pengaturan tempat usaha adalah pengaturan pada tempat dimana pedagang beraktivitas misalnya pada lapangan parkir serta ukurannya agar seragam.
	Kesesuaian Lokasi	- Sebagian besar PKL merasa sesuai dengan lokasi ini dengan alasan dekat keramaian	- Seluruh responden masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai untuk PKL dengan alasan lokasi yang telah ditentukan, dekat keramaian dan transportasi mudah	Fasilitas umum yang belum ada pada lokasi ini adalah air bersih, toilet yang sangat diperlukan bagi aktivitas PKL dan bagi masyarakat pengunjung lokasi ini. Lapangan Sirandu sangat sesuai untuk aktivitas PKL karena mempunyai aksesibilitas tinggi yang dilewati oleh angkutan umum baik dalam maupun luar kota. Letaknya yang dekat dengan fasilitas pendidikan juga menambah keramaian lokasi ini.
R E M A R T A D I N A T A	Pola pengelompokan	- Pada lokasi ini PKL kebanyakan memilih berjualan dengan jenis dagangan yang sama dengan alasan agar mudah dicari konsumen karena telah menjadi tempat yang terkenal akan jajanan makanan khas kota Pemalang	- Pada lokasi ini kebanyakan masyarakat berpendapat sebaiknya PKL dikelompokkan sejenis sesuai dagangannya dengan alasan agar mudah dicari.	Baik PKL maupun masyarakat lebih menyukai pengelompokan yang sejenis pada lokasi ini karena merupakan tempat yang telah dikenal sebagai pusat makanan khas Pemalang, sehingga lebih mudah untuk mencarinya.
	Pengaturan	- Sedangkan pada lokasi ini kebanyakan PKL menyatakan tidak perlu diadakan pengaturan lagi dengan alasan telah rapi	- Lebih dari 50% masyarakat menginginkan pengaturan pada lokasi ini dengan alasan supaya lebih teratur dan menarik konsumen	Meskipun PKL tidak menginginkan adanya pengaturan, namun masyarakat menginginkan pengaturan karena pada saat ini lokasi yang ada menggunakan badan jalan sehingga lalu lintas menjadi sesak. Dengan pengaturan jalan yang satu arah akan mengurangi kesempitan yang ada pada saat ini.

lanjutan :

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
M U L Y O H A R J O	Hal yang perlu diatur	- Pada lokasi ini beberapa pedagang memilih jenis dagangan, sarana dagang dan tempat sebagai hal yang perlu diatur	- Masyarakat menginginkan pengaturan terhadap waktu dan tempat berdagang	PKL menginginkan pengaturan pada jenis dagang, sarana dagang dan tempat usaha. Sedangkan masyarakat menginginkan pengaturan terhadap waktu dan tempat berdagang. Dengan adanya pengaturan waktu diharapkan lokasi ini dapat digunakan oleh lebih banyak PKL secara bergantian.
	Fasilitas Umum yang perlu ditambah	- Menurut pkl fasilitas umum yang perlu ditambah adalah listrik, air bersih dan Toilet	- Menurut masyarakat fasilitas yang perlu ditambah adalah listrik dan Toilet	Fasilitas umum yang belum dibuat khusus bagi PKL adalah listrik, air bersih, Toilet.
	Kesesuaian Lokasi	- Seluruh responden PKL merasa lokasi ini sesuai untuk berdagang dengan alasan dekat keramaian dan transportasi mudah	- Seluruh responden masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai sebagai lokasi PKL	Ruas Jl RE Martadinata sangat sesuai untuk aktivitas PKL karena mempunyai tingkat kunjungan tinggi karena telah cukup dikenal dalam masyarakat.
	Pola pengelompokan	- PKL pada lokasi lebih memilih untuk bercampur daripada berkelompok dengan alasan dapat mengurangi persaingan dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli	- Menurut sebagian besar masyarakat, PKL pada lokasi ini sebaiknya bercampur sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dan melihat-lihat sebelum membeli dan juga dapat mengurangi persaingan antar PKL itu sendiri	Pengelompokkan PKL pada lokasi ini sebaiknya adalah bercampur dengan jenis lain karena akan menarik konsumen untuk melihat-lihat sebelum membeli dan akan mengurangi persaingan antar pedagang itu sendiri.
	Pengaturan	- PKL pada lokasi ini sebagian menyatakan perlu pengaturan dengan alasan untuk menarik konsumen dan sebagian lagi tidak perlu dengan alasan sudah rapi	- Sebagian besar masyarakat menginginkan pengaturan pada lokasi ini dengan alasan untuk menarik konsumen	Masih diperlukan pengaturan lebih lanjut pada lokasi ini karena akan menjadi penarik konsumen yang pada akhirnya pedagang tidak meninggalkan lokasi ini.
	Hal yang perlu diatur	- Pada lokasi ini PKL menginginkan sarana dagang, waktu dan tempat agar diatur oleh pemerintah	- Masyarakat pada lokasi ini menginginkan pengaturan terhadap sarana dagang, serta waktu penjualan	Meskipun telah disediakan los/tempat untuk berdagang, namun pada kenyataannya pedagang merubah tempat tersebut sehingga menjadi permanen. Sehingga perlu diadakan pengaturan agar pedagang lebih tertib.

lanjutan :

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
	<p>Fasilitas Umum yang perlu ditambah</p> <p>Kesesuaian Lokasi</p>	<p>- PKL menginginkan ditambahkan fasilitas air bersih dan tempat sampah</p> <p>- Sebagian PKL menyatakan lokasi ini sesuai sebagai lokasi PKL namun sebagian lagi menyatakan tidak sesuai dengan alasan masih sepi.</p>	<p>- Menurut masyarakat fasilitas yang perlu ditambah adalah tempat sampah, air bersih dan toilet</p> <p>- Sebagian masyarakat berpendapat lokasi ini sesuai karena telah ditentukan pemerintah, namun sebagian lagi menyatakan tidak sesuai dengan alasan masih sepi.</p>	<p>Fasilitas umum yang ada pada lokasi ini adalah listrik, toilet dan air bersih, namun saat ini fasilitas air bersih, tempat sampah dan toilet belum memadai.</p> <p>Lokasi ini belum dapat dikatakan sesuai karena bukan lokasi yang mempunyai tingkat kunjungan tinggi.</p>
A L U N - A L U N	Pola pengelompokan	- PKL pada lokasi lebih memilih untuk bercampur daripada berkelompok dengan alasan dapat mengurangi persaingan dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli	- Sebagian besar masyarakat menyatakan, PKL pada lokasi ini sebaiknya bercampur sehingga memudahkan konsumen untuk memilih dan melihat-lihat sebelum membeli dan juga dapat mengurangi persaingan antar PKL itu sendiri	PKL dan masyarakat menginginkan pengelompokan yang bercampur. Dengan bercampur maka masyarakat akan lebih mudah untuk melihat-lihat sebelum membeli dan bagi pedagang dapat mengurangi persaingan.
	Pengaturan	- Sebagian besar PKL alun-alun menyatakan perlu diadakan pengaturan dengan alasan agar lebih teratur dan menarik konsumen	- Sebagian besar masyarakat menginginkan pengaturan pada lokasi ini dengan alasan supaya lebih teratur	Meskipun menurut perda lokasi ini dilarang untuk berjualan pada hari biasa, namun masyarakat membutuhkan adanya PKL dengan syarat adanya pengaturan sehingga lokasi ini dapat lebih tertib dan nyaman dilihat.
	Hal yang perlu diatur	- PKL di alun-alun menginginkan pengaturan terhadap tempat berjualan dan sarana dagang yang dipergunakan	- Masyarakat pada lokasi ini menginginkan pengaturan pada sarana dagang, waktu berdagang serta tempat berdagang.	PKL dan masyarakat menginginkan pengaturan pada sarana dagang dan tempat usaha. Pengaturan terhadap sarana dagang dapat dilakukan dengan menentukan jenis sarana dagang yang diperbolehkan pada lokasi ini, pengaturan tempat usaha adalah pengaturan pada tempat dimana pedagang beraktivitas misalnya pada jalur lambat atau trotoar sehingga tidak mengganggu masyarakat pengguna jalan.

lanjutan :

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
	Fasilitas Umum yang perlu ditambah	- PKL menginginkan tempat parkir, air bersih Toilet dan listrik pada lokasi ini	- Sebagian masyarakat menginginkan penambahan fasilitas parkir pada lokasi ini	Fasilitas umum yang ada pada lokasi ini belum ada, karena lokasi ini tidak direncanakan sebagai lokasi PKL. Fasilitas Umum yang diperlukan adalah tempat parkir, air bersih dan toilet.
	Kesesuaian Lokasi	- Seluruh responden menyatakan lokasi ini sangat sesuai untuk berdagang dengan alasan dekat keramaian dan transportasi mudah	- Sebagian besar masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai untuk PKL dengan alasan dekat keramaian dan transportasi mudah	Alun-alun merupakan lokasi yang paling sesuai untuk aktivitas PKL karena merupakan lokasi yang mempunyai tingkat kunjungan tinggi.
K E N A N G A	Pola pengelompokan	- PKL pada lokasi lebih memilih untuk bercampur daripada berkelompok dengan alasan dapat mengurangi persaingan dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihan sebelum membeli	- Sebagian besar masyarakat menganggap sebaiknya PKL pada lokasi ini bercampur sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih dan melihat-lihat sebelum membeli dan juga dapat mengurangi persaingan antar PKL itu sendiri	Dengan pengelompokkan secara bercampur akan mengurangi persaingan antar pedagang dan akan memudahkan konsumen untuk memilih sebelum membeli.
	Pengaturan	- Sebagian besar PKL pada lokasi ini menyatakan perlu diadakan pengaturan agar lebih teratur.	- Sebagian besar masyarakat menginginkan pengaturan pada lokasi ini dengan alasan supaya lebih teratur	Baik masyarakat maupun PKL menginginkan adanya pengaturan disebabkan kondisi yang ada pada saat ini masih belum teratur. Adanya pengaturan lebih lanjut akan menarik konsumen untuk datang dan berbelanja serta akan menjadikan pemandangan yang lebih tertib.
	Hal yang perlu diatur	- Pada lokasi ini PKL menginginkan pengaturan pada sarana dagang, waktu dan tempat penjualan	- Masyarakat pada lokasi ini menginginkan pengaturan tempat dan waktu dagang.	PKL dan masyarakat menginginkan pengaturan pada sarana dagang, waktu dan tempat usaha. Dengan pengaturan tersebut diharapkan dapat membuat lokasi ini lebih tertib dan rapi.
	Fasilitas Umum yang perlu ditambah	- Listrik merupakan fasilitas yang paling banyak diinginkan oleh pkl pada lokasi ini	- Menurut masyarakat fasilitas yang perlu dilengkapi pada lokasi ini adalah listrik, air bersih dan Toilet	Belum ada fasilitas umum pada lokasi ini bagi PKL, air bersih, Toiletsangat diperlukan bagi aktivitas PKL

lanjutan :

Lokasi	Komponen	Preferensi PKL	Persepsi Masyarakat	Hasil Kajian
	Kesesuaian Lokasi	- Seluruh responden pkl menyatakan lokasi ini sesuai untuk PKL dengan alasan telah ditentukan oleh pemerintah dan transportasi mudah.;	- Sebagian masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai untuk PKL karena telah ditetapkan pemerintah dan sebagian lagi tidak sesuai dengan alasan merasa terganggu	Ruas Jalan Kenanga sesuai untuk aktivitas PKL karena pada lokasi ini merupakan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis 2006

Dari hasil tabel hubungan antara preferensi PKL dan persepsi masyarakat diatas dapat diperoleh kesimpulan pada masing-masing lokasi sebagai berikut:

Jalan Veteran

Ruas jalan Veteran merupakan lokasi yang sesuai untuk PKL karena merupakan jalan dengan tingkat aksesibilitas tinggi dan merupakan jalan yang cukup ramai sesuai dengan karakteristik aktivitas PKL yang pada umumnya akan memilih lokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat aktivitas tinggi, seperti pada simpul-simpul transportasi atau lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar maupun ruang terbuka (Mc.Gee dan Yeung, 1997:61). Dari preferensi PKL dan persepsi masyarakat diketahui bahwa pengaturan yang diperlukan adalah pengaturan sarana dagang serta pengaturan tempat usaha sehingga dapat menjadi lebih rapi. Meskipun telah ditetapkan menjadi lokasi usaha PKL, namun pada kenyataannya fasilitas pendukung aktivitas PKL masih belum memadai, terlihat dari preferensi PKL dan persepsi masyarakat yang menginginkan fasilitas umum seperti air bersih, toilet dan tempat parkir.

Lapangan Sirandu

Lapangan Sirandu juga merupakan lokasi yang berada pada simpul transportasi sehingga merupakan lokasi yang sesuai untuk PKL, namun kondisi yang ada pada saat ini memerlukan pengaturan sehingga akan menjadikan lokasi ini lebih tertib dan rapi. Pengaturan yang diinginkan oleh pedagang dan masyarakat adalah pengaturan tentang sarana dagang yang dipergunakan serta tempat usaha dengan melengkapi fasilitas umum seperti air bersih, toilet dan tempat parkir dan memerlukan pengaturan pada sarana dagang serta tempat dagang. Seperti telah diuraikan sebelumnya hubungan antara sarana dagang dan luas tempat adalah sangat erat sehingga diperlukan pengaturan agar lapangan sirandu dapat lebih tertata dan lebih rapi. Seperti halnya dengan jalan veteran, sarana pendukung aktivitas PKL yang ada pada saat ini dirasa masih belum memadai. Menurut PKL dan masyarakat, fasilitas yang perlu ditambah adalah fasilitas listrik, air bersih, toilet dan tempat parkir.

Jalan RE Martadinata

Ruas Jalan RE Martadinata merupakan lokasi PKL yang telah kelihatan rapi dan lebih teratur, namun para pedagang dan masyarakat merasa masih memerlukan adanya penambahan fasilitas umum seperti listrik, air bersih, toilet dan tempat parkir. Meskipun sebagian besar pedagang menyatakan tidak perlu pengaturan karena tempat ini telah rapi, namun masih diperlukan pengaturan pada sarana dagang, waktu usaha. Pengaturan tersebut menurut masyarakat adalah untuk lebih menarik konsumen, disamping itu ruas jalan RE Martadinata lebih lapang dan tidak berdesak-desakkan.

Lapangan Mulyoharjo

Lapangan Mulyoharjo merupakan lokasi yang sejak awalnya adalah lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai lokasi usaha PKL. Jadi bukan merupakan lokasi hasil aglomerasi pedagang yang datang karena adanya suatu aktivitas masyarakat. Sebagian PKL dan masyarakat menganggap lokasi ini masih sepi sehingga tidak sesuai untuk lokasi PKL. Walaupun beberapa PKL dan masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai, namun dari jumlah pedagang yang tutup menjadikan lokasi ini bertambah sepi. Beberapa fasilitas umum yang dirasa masih belum memenuhi seperti air bersih dan tempat sampah. Untuk menjadikan lokasi ini lebih hidup, perlu dibuka jalur transportasi yaitu kendaraan angkutan kota yang melalui jalan Pemuda.

Alun-alun

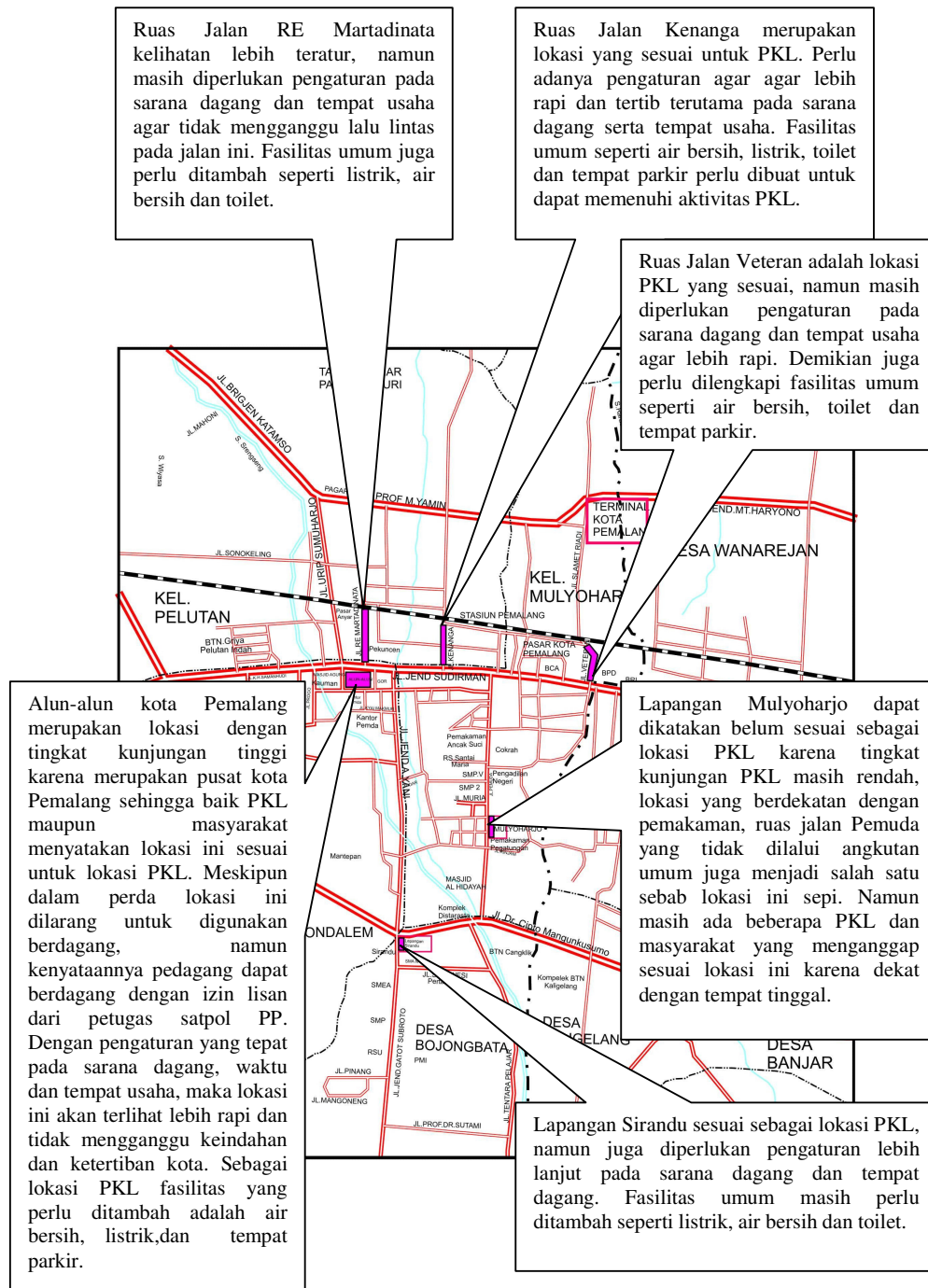
Meskipun menurut perda lokasi ini adalah dilarang pada hari biasa dan hanya boleh untuk berdagang pada waktu 7 hari sebelum dan setelah Lebaran dan menjelang pemberangkatan dan kedatangan jamaah haji, namun baik PKL maupun masyarakat menyatakan tempat ini sesuai bagi lokasi PKL karena merupakan lokasi dengan intensitas kunjungan masyarakat yang tinggi. Masyarakat juga membutuhkan adanya PKL untuk tempat berbelanja, atau makan dan minum sambil bersantai. Bagi PKL adanya aktivitas masyarakat merupakan salah satu alasan mereka dalam memilih lokasi berdagang. Bagi Pemerintah keberadaan PKL pada lokasi ini pada hari-hari biasa dinilai mengganggu ketertiban dan keindahan, namun apabila PKL yang ada diatur dengan lebih baik

dengan cara pengaturan terhadap sarana dagang, waktu dan tempat, maka akan terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu keindahan dan ketertiban kota.

Jalan Kenanga

Baik PKL maupun masyarakat berpendapat bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang sesuai untuk PKL. Walaupun demikian, ada beberapa orang yang merasa keberatan dengan adanya pedagang, terutama masyarakat yang halaman depan rumahnya ditempati oleh pedagang. Pedagang dan masyarakat pada lokasi ini juga menginginkan pengaturan agar agar lebih rapi dan tertib terutama pada sarana dagang serta tempat usaha. Disamping itu lokasi ini masih memerlukan fasilitas umum seperti air bersih, listrik, toilet dan tempat parkir untuk dapat memenuhi aktivitas PKL.

Untuk lebih jelasnya hasil dari analisis tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut.



Sumber : Hasil Analisis, 2006

GAMBAR 4.5
HUBUNGAN PREFERENSI PKL
DAN PERSEPSI MASYARAKAT

4.8 Temuan Studi

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

Karakteristik Umum PKL :

1. Mayoritas pedagang kaki lima adalah kelompok usia 31 – 40 tahun yang merupakan usia produktif dalam memperoleh kesempatan kerja.
2. Sebagian besar berpendidikan rendah setingkat SD. Banyaknya pedagang yang berpendidikan rendah menyebabkan terjadinya banyak penyimpangan dalam memahami peraturan pemerintah.
3. Kegiatan PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Pemalang.
4. Kegiatan PKL dapat memberikan lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam mengatasi pengangguran.
5. Jumlah PKL meningkat selama sepuluh tahun terakhir yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang membawa dampak pada meningkatnya pengangguran karena PHK.
6. Pedagang kaki lima hanya memerlukan modal yang relatif kecil.
7. Penghasilan PKL mampu melebihi penghasilan aktivitas formal. Selain itu lokasi juga berpengaruh pada pendapatan PKL.

Karakteristik Aktivitas PKL

1. Dari keenam lokasi penelitian, jenis dagangan yang berupa makanan banyak dipilih oleh pedagang kaki lima.

2. Sarana dagang yang paling banyak dipergunakan oleh PKL di enam lokasi penelitian adalah gerobak. Jenis dagangan dan sarana dagang mempunyai hubungan yang cukup signifikan.
3. Berdasarkan pola penyebarannya, PKL pada keenam lokasi berbeda-beda. Dari pola pengelompokan jenis dagangan, sebagian besar PKL saat ini cenderung berkelompok dengan sejenisnya.
4. Pedagang kaki lima merupakan pekerja keras dengan jam kerja per hari jauh di atas jam kerja normal.

Karakteristik lokasi PKL:

1. PKL menempati ruang publik yang tersedia misalnya trotoar, badan jalan serta lahan parkir.
2. Sarana dagang dan luas tempat yang dipergunakan mempunyai hubungan yang cukup signifikan dan erat.
3. Jarak lokasi usaha dengan tempat tinggal PKL cenderung dekat.
4. Sebagian besar PKL yang ada pada lokasi penelitian belum memiliki izin tertulis dari pemerintah.

Kesesuaian Perda Nomor 28 Tahun 2002 tentang penataan PKL dengan keadaan pada lokasi PKL:

Masih banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang pada keenam lokasi penelitian antara lain belum memiliki izin usaha, sarana dagang yang ditinggalkan, sarana dagang yang melebihi 5 meter panjangnya, tempat usaha yang berubah menjadi tempat tinggal membuktikan kurang tegasnya petugas dalam melaksanakan peraturan daerah Nomor 28 tahun 2002 tentang

penataan PKL. Disamping itu peraturan tersebut belum dapat mengakomodasi keinginan dari PKL.

Preferensi PKL:

1. Sebagian besar PKL lebih memilih bercampur dengan jenis lain, meskipun saat ini mereka lebih banyak berkelompok dengan jenis usaha yang sama.
2. Sebagian besar PKL menyatakan perlu pengaturan lebih lanjut pada lokasi mereka saat ini.
3. Hal yang perlu diatur meliputi sarana dagang, tempat usaha, waktu usaha dan jenis dagangan
4. Fasilitas umum yang ada pada lokasi perlu ditambah antara lain: Listrik, Air bersih, Tempat sampah, Parkir dan toilet.
5. Lokasi PKL pada saat ini adalah sesuai dengan keinginan mereka.

Persepsi Masyarakat Terhadap PKL dan Lokasinya:

1. Alasan masyarakat berbelanja pada PKL adalah sebagian besar karena harga yang murah.
2. Aktivitas PKL memiliki manfaat yang bervariasi bagi konsumennya. Namun intinya adalah adanya kemudahan yang diberikan oleh aktivitas PKL karena keberadaan mereka yang cenderung dekat dengan aktivitas masyarakat.
3. Dampak negatif PKL menurut masyarakat lingkungan kotor, trotoar sempit, jalanan sesak dan kurang aman.
4. Sebagian besar masyarakat lebih menyukai PKL yang bercampur dengan jenis lain karena akan memudahkan konsumen untuk melihat-lihat sebelum membeli.

5. Sebagian besar masyarakat menyatakan perlu diadakan pengaturan PKL.
6. Hal yang perlu diatur meliputi sarana dagang, tempat usaha, waktu usaha dan jenis dagangan
7. Fasilitas umum yang ada pada lokasi perlu ditambah antara lain: Listrik, Air bersih, Tempat sampah, Parkir dan toilet.
8. Lokasi PKL pada saat ini adalah sesuai karena dekat keramaian, transportasi mudah dan telah ditetapkan pemerintah.

Hubungan antara preferensi PKL dan persepsi masyarakat

1. Ruas Jalan Veteran adalah lokasi PKL yang sesuai, namun masih diperlukan pengaturan pada sarana dagang dan tempat usaha agar lebih rapi. Demikian juga perlu dilengkapi fasilitas umum seperti air bersih, toilet dan tempat parkir.
2. Lapangan Sirandu sesuai sebagai lokasi PKL, namun juga diperlukan pengaturan lebih lanjut pada sarana dagang dan tempat dagang. Fasilitas umum masih perlu ditambah seperti listrik, air bersih dan toilet.
3. Ruas Jalan RE Martadinata kelihatan lebih teratur, namun masih diperlukan pengaturan pada sarana dagang dan tempat usaha agar tidak mengganggu lalu lintas pada jalan ini. Fasilitas umum juga perlu ditambah seperti listrik, air bersih dan toilet.
4. Lapangan Mulyoharjo dapat dikatakan belum sesuai sebagai lokasi PKL karena tingkat kunjungan masyarakat masih rendah, lokasi yang berdekatan dengan pemakaman, ruas jalan Pemuda yang tidak dilalui angkutan umum juga menjadi salah satu sebab lokasi ini sepi. Namun masih ada beberapa

PKL dan masyarakat yang menganggap sesuai lokasi ini karena dekat dengan tempat tinggal. Untuk menghidupkan lokasi ini perlu dibuka jalur angkutan umum yang melewati jalan Pemuda.

5. Alun-alun kota Pemalang merupakan lokasi dengan tingkat kunjungan tinggi karena merupakan pusat kota Pemalang sehingga baik PKL maupun masyarakat menyatakan lokasi ini sesuai untuk lokasi PKL. Meskipun dalam perda lokasi ini dilarang untuk digunakan berdagang, namun kenyataannya pedagang dapat berdagang dengan izin lisan dari petugas satpol PP. Dengan pengaturan yang tepat pada sarana dagang, waktu dan tempat usaha, maka lokasi ini akan terlihat lebih rapi dan tidak mengganggu keindahan dan ketertiban kota. Sebagai lokasi PKL fasilitas yang perlu ditambah adalah air bersih, listrik, dan tempat parkir.
6. Ruas Jalan Kenanga merupakan lokasi yang sesuai untuk PKL. Walaupun ada beberapa orang yang merasa keberatan dengan adanya pedagang, terutama masyarakat yang halaman depan rumahnya ditempati oleh pedagang. Perlu adanya pengaturan agar agar lebih rapi dan tertib terutama pada sarana dagang serta tempat usaha. Fasilitas umum seperti air bersih, listrik, toilet dan tempat parkir perlu dibuat untuk dapat memenuhi aktivitas PKL.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian bagian akhir bab ini akan disampaikan beberapa rekomendasi dan usulan bagi studi lanjutan.

5.1 Kesimpulan

Dari hasil-hasil observasi di lapangan dan analisis data serta temuan studi, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Aktivitas PKL merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi warga kota Pemalang yang tidak dapat memasuki sektor formal karena mempunyai ciri-ciri mudah dimasuki, tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal.
- Lokasi PKL yang telah ditentukan oleh Pemda menyebabkan pola penyebaran yang berbeda-beda, sedangkan saat ini PKL cenderung mengelompok dengan sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan.
- Lokasi yang dipilih oleh PKL mempunyai ciri-ciri dekat dengan tempat tinggal PKL, ramai dan dekat dengan aktivitas masyarakat meskipun pada lokasi tersebut PKL tidak memiliki izin tertulis dari Pemerintah Daerah.
- Dari keenam lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang, Lapangan Mulyoharjo merupakan lokasi yang belum tepat sebagai

lokasi PKL karena tingkat kunjungan masyarakat masih rendah, sedangkan Alun-alun merupakan lokasi yang sangat diminati oleh masyarakat dan PKL.

- Meskipun telah dibuat peraturan tentang penataan PKL namun baik PKL atau masyarakat menganggap perlu diadakan pengaturan yang lebih lanjut karena pada beberapa lokasi masih kelihatan semrawut dan kurang tertib. Sementara kegiatan PKL sebagai salah satu sektor informal belum terantisipasi dalam perencanaan tata ruang kota sehingga sarana dan prasarana yang ada biasanya kurang mendukung kegiatan PKL. Misalkan fasilitas dan utilitas umum seperti jaringan listrik, air bersih, toilet, sampah dan tempat parkir belum memenuhi kebutuhan kegiatannya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya untuk menata dan mengatur Pedagang Kaki Lima. Adapun masukan-masukan atau rekomendasi tersebut adalah:

- Sebagai sektor yang dapat menampung tenaga kerja yang besar, seharusnya PKL tidak dapat dianggap remeh. Oleh karena itu pembinaan terhadap PKL seyogyanya dilakukan dengan cara yang lebih baik dengan mengundang perwakilan dari paguyuban PKL dan tidak menggusur dengan semena-mena.
- Dalam menentukan lokasi bagi PKL perlu dipertimbangkan jarak lokasi dengan tempat tinggal PKL

- Menentukan besaran ukuran yang lebih spesifik bagi ruang kegiatan PKL agar sesuai dengan karakteristiknya seperti jenis dagangan(makanan,non makanan dan jasa), sarana fisik yang dipergunakan(warung/tenda, gerobak, gelaran, kios dsb) serta memperhitungkan kebutuhan ruang bagi masyarakat.
- Lokasi PKL pada Alun-alun kota Pemalang merupakan lokasi yang diminati oleh pedagang dan juga masyarakat, oleh karena itu seharusnya lokasi ini dapat dilegalkan untuk menjadi lokasi PKL dengan beberapa syarat seperti jenis sarana dagang yang diperbolehkan, jumlah PKL yang diperbolehkan serta luas tempat yang diperbolehkan.
- Untuk menghidupkan Lapangan Mulyoharjo sebagai lokasi PKL, maka jalur angkutan umum yang melalui Jalan Pemuda perlu dibuka.
- Dalam penetapan lokasi aktivitas PKL, sarana pendukung kegiatan PKL seperti lahan parkir, jaringan listrik, air bersih, sanitasi, sampah dan sarana umum lainnya perlu disediakan juga sebagai salah satu alat untuk mengendalikan PKL.

5.3 Usulan Studi Lanjut

Mengingat penelitian ini yang jauh dari sempurna dan keterbatasan penulis, maka diharapkan dapat dilakukan studi lanjut yang berkaitan dengan penataan PKL. Sehingga akan menjadikan suatu sumbangan yang berharga dalam menangani permasalahan PKL baik di Kabupaten Pemalang khususnya, maupun di perkotaan pada umumnya. Studi lanjut yang dapat dilakukan adalah:

- Kajian mengenai kemampuan suatu lokasi dalam menampung PKL

- Kajian mengenai sektor formal yang mempengaruhi keberadaan PKL pada suatu lokasi
- Kajian mengenai rencana tata ruang yang ada dengan memasukkan kegiatan sektor informal PKL sebagai bagian dari perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agung Ridlo, Mohammad, 2001, *Kemiskinan di Perkotaan*, Semarang, Unissula Press
- Bintarto, 1989. *Interaksi Desa Kota*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Budihardjo, Eko, ed., 1997, *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Jakarta, Djambatan.
- Car , Stephen, 1995, *Public Space*, Australia : Cambridge University Press
- Daldjoeni, 1998, *Geografi Desa Dan Kota*, Jakarta, Alumni.
- Danim, Sudarwan, Prof,Dr., *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, Pustaka Setia, 2002
- Darmawan Edy, 2003, *Teori dan Kajian Ruang Publik Kota*, Semarang, BP UNDIP,
- Dewan Riset Nasional dan Bappenas (1995). *Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki lima di Perkotaan*, Dewan Riset Nasional dan Bappenas bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Djakti, Dorodjatun Kuntjoro. 1986. *Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Effendi, Tadjuddin Noer, 1993, *Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan*, Yogyakarta, Tiara Wacana
- Evers, Hans Dieter dan Rudiger Korff (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan Kekuasaan dalam Ruang-Ruang Sosial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hakim, Rustam, 1993, *Unsur Perancangan Dalam Arsitektur Lansekap*, Jakarta , Bumi Aksara.
- Jhingan, M.L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada,2003

- Ibrahim, Jabal Tarik, 2003, *Sosiologi Pedesaan*, Malang, UMM Press
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy J, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya
- Nasir M, 1988, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Poerwadarminta, WJS. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rachbini, Didik, J dan Abdul Hamid. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta : LP3ES
- Santoso, Slamet, 2004, *Dinamika Kelompok*, Jakarta, Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : Pustaka LP3ES.
- Todaro, Michael P., 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh, terjemahan*, Jakarta, Penerbit Erlangga
- Wiryomartono, A. Bagoes R, 1995, *Seni Bangunan dan Seni Binakota Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

ARTIKEL

- Pikiran Rakyat, 2003, *PKL Pemalang Datangi Satpol PP*, Senin 14 Juli 2003
- Suara Merdeka, 2004, *Larangan akan dikaji ulang*, Kamis, 8 Juli 2004
- Suara Merdeka, 2004, *PKL Alun-alun sesalkan Sikap Satpol*, Sabtu, 4 Desember 2004

INTERNET

- <http://www.solopos.net/index2.asp?>, *Kios PKL di Jurug dibongkar*, 13 Agustus 2005
- <http://www.pemalangikhlhas.com/comments.php?>, *Didenda Rp 25.000 PKL Tetap Jualan*, Kamis, 17 Juli 2003

<http://www.pemalang.go.id/>, *PKL Ingin Lokasi yang Strategis*, Kamis, 17 Juli 2003

<http://www.kamus-online.com>

SKRIPSI / THESIS

Ambarwaty. Srie Hany. 2003. *Studi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Dalam Pemanfaatan Ruang di Kota Salatiga*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang

Apriliyana, Dian, 2003, *Arahan Penataan Kawasan Simpang Lima Semarang*, Tugas Akhir tidak diterbitkan, Jurusan Perencanaan wilayah dan Kota , Universitas Diponegoro , Semarang.

Widodo, Ahmadi. 2000. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL, Studi Kasus Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Program Pascasarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang.

Widjajanti, Retno, 2000, *Penataan Fisik Kegiatan PKL Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus : Simpang Lima Semarang)* Tesis tidak diterbitkan. Bidang Khusus Perencanaan Kota, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota , ITB, Bandung,

BUKU DATA / LAPORAN

BPS Kab. Pemalang. *PDRB Kabupaten Pemalang tahun 2002* Pemalang 2003.

BPS Kab. Pemalang. *Kabupaten Pemalang dalam angka tahun 2002* Pemalang 2003.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2003-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, 2002

Rencana Teknik Ruang Kota BWK I Kota Pemalang Tahun 2003-2012, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang, 2002

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28 Tahun
2002 Tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
Jl. Hayam Wuruk 5-7 lantai III Semarang 50241 Telp.024-8413880, 8454380

Kepada
Bapak/Ibu/Saudara Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya penelitian kami tentang ” **Kajian Lokasi Pedagang Kaki Lima Yang Ditetapkan Pemda Berdasarkan Preferensi PKL Serta Persepsi Masyarakat Sekitar Di Kota Pemalang**”, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan jawaban dari angket yang kami berikan ini (terlampir).

Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah yang akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Tesis dalam rangka penyelesaian studi pada Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Penyebaran angket ini telah mendapat ijin dari pihak berwenang.

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan jawaban dengan sungguh-sungguh (*benar dan jujur*), sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kesediaan tersebut merupakan bantuan yang sangat besar bagi tercapainya tujuan penelitian ini. Kami sangat menghargai setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dalam mengisi angket ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ari Sulistiyo Budi

NO. SURVAI	:	<input type="text"/>	(Diisi petugas)
LOKASI	:	<input type="text"/>	
HARI/TGL SURVAI :		<input type="text"/>	

KUESIONER UNTUK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

PETUNJUK PENGISIAN

- Baca dan simaklah pertanyaan dengan teliti.
- Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda \surd pada kotak jawaban yang disediakan.
- Jika tidak ada jawaban yang sesuai, mohon jawaban ditulis pada “Lainnya
- Untuk pertanyaan yang berupa isian, mohon diisi dengan jawaban yang singkat dan jelas.

LATAR BELAKANG RESPONDEN

Nama :(jika keberatan tidak perlu diisi)
 Umur : tahun.
 Alamat :

KARAKTERISTIK UMUM

1. Pendidikan terakhir anda ?
 - ☐ A. SD.
 - ☐ B. SMP
 - ☐ C. SMA
 - ☐ D. S1
 - ☐ E. Lainnya, Sebutkan
2. Anda berasal dari :
 - ☐ A. Dalam Kota Pemalang
 - ☐ B. Luar Kota Pemalang
3. Berapa jumlah pekerja yang anda miliki dalam menjalankan usaha anda ?
 - ☐ A. ≤ 2
 - ☐ B. 3-5
 - ☐ C. > 5
4. Berapa lama anda berdagang disini ?
 - ☐ A. ≤ 3 Tahun
 - ☐ B. 4-6 Tahun
 - ☐ C. 7-9
 - ☐ D. 10-12
 - ☐ E. > 12 Tahun, Sebutkan.

5. Berapakah modal anda ?
☐ Sebutkan
6. Berapakah penghasilan anda rata-rata per hari ?
☐ Sebutkan

KARAKTERISTIK AKTIVITAS USAHA

1. Apa jenis dagangan Anda ?
☐ A. Makanan / minuman siap saji (makanan matang).
☐ B. Rokok
☐ C. Konveksi.
☐ D. Barang elektronik seperti kaset, VCD, dll.
☐ E. Mainan anak-anak.
☐ F. Buku, poster, dll.
☐ G. Barang-barang kerajinan tangan.
☐ H. Jasa seperti tukang cukur, penjahit, dll .
☐ I. Lainnya, sebutkan
2. Jenis sarana usaha yang anda gunakan
☐ A. Warung Tenda
☐ B. Gerobak/kereta dorong
☐ C. Pikulan/keranjang
☐ D. Gelaran/dasaran
☐ E. Kios
☐ F. Lainnya, sebutkan
3. Apakah pengelompokan dagangan anda saat ini
☐ A. Berkelompok dengan sejenis
☐ B. Bercampur dengan jenis lain
4. Waktu berjualan mulai pukul s.d. pukul

KARAKTERISTIK LOKASI

1. Lokasi berjualan saat ini :
☐ A. Alun-alun Pemalang
☐ B. Jalan RE Martadinata
☐ C. Jalan Veteran
☐ D. Jalan Kenanga
☐ E. Lapangan Mulyoharjo
☐ F. Lapangan Sirandu

2. Tempat berjualan :
 - ☐ A. Trotoir
 - ☐ B. Lahan Parkir
 - ☐ C. Badan Jalan
 - ☐ D. Lainnya, sebutkan.....
3. Berapa luas tempat yang Anda gunakan untuk berdagang?
 - ☐ A. $< 3 \text{ M}^2$
 - ☐ B. $3 - 5 \text{ M}^2$
 - ☐ C. $> 5 \text{ M}^2$
4. Apakah alasan Anda untuk memilih lokasi ini sebagai tempat berdagang ?
 - ☐ A. Ramai / sering dikunjungi pembeli.
 - ☐ B. Tingkat pendapatan memuaskan.
 - ☐ C. Biaya transportasi murah/Dekat tempat tinggal
 - ☐ D. Lainnya, sebutkan
5. Berapa jarak lokasi ini dengan tempat tinggal
 - ☐ A. $< 1 \text{ km}$
 - ☐ B. $1 - 2 \text{ km}$
 - ☐ C. $> 2 \text{ km}$
6. Apakah Anda telah memiliki ijin untuk berdagang dari Pemerintah Daerah ?
 - ☐ A. Ya
 - ☐ B. Tidak

PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA

1. Mana yang lebih baik menurut Anda apakah :
 - ☐ A. Berdagang dengan penjual yang sejenis.
 - ☐ B. Berdagang dengan penjual berbagai macam jenis dagangan (bercampur)

Alasan

2. Menurut Anda apakah lokasi ini perlu ada pengaturan lagi?
 - ☐ Ya
 - ☐ Tidak

Alasan

3. Hal apakah yang perlu diatur?
 - ☐ Jenis Dagangan
 - ☐ Sarana Dagang
 - ☐ Waktu

☐ Tempat Usaha

4. Menurut Anda apakah fasilitas umum apa yang perlu ditambah ?

☐ Listrik

☐ Air Bersih

☐ Tempat Sampah

☐ Parkir

☐ MCK/TOILET

5. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda?

☐ A. Ya

☐ B. Tidak

Alasan

KUESIONER UNTUK MASYARAKAT

PETUNJUK PENGISIAN

- Baca dan simaklah pertanyaan dengan teliti.
- Jawablah pertanyaan dengan memberi tanda √ pada kotak jawaban yang disediakan.
- Jika tidak ada jawaban yang sesuai, mohon jawaban ditulis pada “Lainnya
- Untuk pertanyaan yang berupa isian, mohon diisi dengan jawaban yang singkat dan jelas.

LATAR BELAKANG RESPONDEN

Nama Pengisi :(jika keberatan tidak perlu diisi)
 Umur : tahun.
 Profesi :
 Alamat :

PERSEPSI TERHADAP PKL DAN LOKASINYA

1. Apa alasan anda memilih berbelanja/makan di lokasi PKL ?
 - ☐ A. Harganya lebih murah dibanding yang lain.
 - ☐ B. Lokasinya dekat.
 - ☐ C. Suasana lebih santai.
 - ☐ C. Lainnya, sebutkan
2. Manfaat apa yang anda rasakan dengan adanya aktivitas PKL di sekitar anda ?
 - ☐ A. Tidak Ada
 - ☐ B. Lokasi menjadi lebih ramai
 - ☐ C. Mudah mendapatkan kebutuhan
 - ☐ D. Lainnya, sebutkan
3. Gangguan apa yang anda rasakan dengan adanya aktivitas PKL
 - ☐ A. Tidak Ada
 - ☐ B. Trotoir menjadi sempit sehingga merasa tidak nyaman untuk berjalan
 - ☐ C. Parkir menjadi sulit
 - ☐ D. Lingkungan menjadi kotor
 - ☐ E. Jalanan menjadi sesak dan macet
 - ☐ F. Merasa kurang aman
 - ☐ G. Lainnya, sebutkan.....
4. Mana yang lebih anda sukai Anda apakah :
 - ☐ A. Pedagang dengan penjual yang sejenis.
 - ☐ B. Pedagang dengan penjual berbagai macam jenis dagangan (bercampur)

Alasan

5. Menurut Anda apakah lokasi ini perlu ada pengaturan lagi?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Alasan

6. Hal apakah yang perlu diatur?

- ☐ Jenis Dagangan
- ☐ Sarana Dagang
- ☐ Waktu
- ☐ Tempat Usaha

7. Menurut Anda apakah fasilitas umum apa yang perlu ditambah ?

- ☐ Listrik
- ☐ Air Bersih
- ☐ Tempat Sampah
- ☐ Parkir
- ☐ MCK/TOILET

8. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda?

- ☐ A. Ya
- ☐ B. Tidak

Alasan

PENGKODEAN JAWABAN QUESTIONER

1. PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

KARAKTERISTIK UMUM

1. Usia:
 - ☐ <30 1
 - ☐ 31-40 2
 - ☐ 41-50 3
 - ☐ >50 4
2. Pendidikan
 - ☐ SD 1
 - ☐ SMP 2
 - ☐ SMA 3
 - ☐ S1 4
 - ☐ Lainnya 5
3. Asal:
 - ☐ Dalam Kota Pemalang 1
 - ☐ Luar Kota Pemalang 2
4. Jumlah pekerja:
 - ☐ < = 2 1
 - ☐ 3-5 2
 - ☐ > 5 3
5. Lama Usaha
 - ☐ < =3 Tahun 1
 - ☐ 4-6 Tahun 2
 - ☐ 7-9 3
 - ☐ 10-12 4
 - ☐ > 12 Tahun 5
6. Jumlah Modal:
 - ☐ <=500Ribu 1
 - ☐ 500Ribu-1 Juta 2
 - ☐ 1 Juta-1,5 Juta 3
 - ☐ 1,5 Juta-2 Juta 4
 - ☐ > 2 Juta 5
7. Berapakah penghasilan anda rata-rata per hari ?
 - ☐ <=50ribu 1
 - ☐ 50ribu-100ribu 2
 - ☐ 100ribu-150ribu 3
 - ☐ 150ribu-200ribu 4

- ☐ 200ribu-250ribu.....5
- ☐ >250ribu.....6

KARAKTERISTIK AKTIVITAS USAHA

1. Apa jenis dagangan Anda ?
 - ☐ Makanan1
 - ☐ Non Makanan.....2
 - ☐ Jasa.....3
2. Jenis sarana usaha yang anda gunakan
 - ☐ Warung Tenda.....1
 - ☐ Gerobak/kereta dorong2
 - ☐ Pikulan/keranjang.....3
 - ☐ Gelaran/dasaran.....4
 - ☐ Kios.....5
 - ☐ Lainnya6
3. Apakah pengelompokan dagangan anda saat ini
 - ☐ Berkelompok dengan sejenis.....1
 - ☐ Bercampur dengan jenis lain.....2
4. Waktu aktivitas
 - ☐ <=4 Jam.....1
 - ☐ 5-8 Jam.....2
 - ☐ 9-11 Jam.....3
 - ☐ >11 Jam.....4

KARAKTERISTIK LOKASI

1. Lokasi berjualan saat ini :
 - ☐ Alun-alun Pemalang1
 - ☐ Jalan RE Martadinata.....2
 - ☐ Jalan Veteran.....3
 - ☐ Jalan Kenanga4
 - ☐ Lapangan Mulyoharjo.....5
 - ☐ Lapangan Sirandu.....6
2. Tempat berjualan :
 - ☐ Trotoir1
 - ☐ Lahan Parkir.....2
 - ☐ Badan Jalan3
 - ☐ Lainnya, sebutkan.....4

3. Luas tempat:
 - ☐ $< 3 \text{ M}^2$ 1
 - ☐ $3 - 5 \text{ M}^2$ 2
 - ☐ $> 5 \text{ M}^2$ 3
4. Alasan memilih lokasi sebagai tempat berdagang ?
 - ☐ Ramai / sering dikunjungi pembeli..... 1
 - ☐ Tingkat pendapatan memuaskan 2
 - ☐ Biaya transportasi murah/Dekat tempat tinggal 3
 - ☐ Lainnya, sebutkan..... 4
5. Jarak lokasi ini dengan tempat tinggal
 - ☐ $< 1 \text{ km}$ 1
 - ☐ $1 - 2 \text{ km}$ 2
 - ☐ $> 2 \text{ km}$ 3
6. Izin dari Pemerintah Daerah:
 - ☐ Ya 1
 - ☐ Tidak 2

PREFERENSI PEDAGANG KAKI LIMA

1. Kelompok :
 - ☐ Sejenis..... 1
 - ☐ Bercampur 2
- Alasan :
 - ☐ Mengurangi persaingan..... 1
 - ☐ Memudahkan pilihan 2
 - ☐ Mudah dicari konsumen..... 3
2. Perlu pengaturan:
 - ☐ Ya
 - ☐ Tidak
- Alasan:
 - ☐ Lebih Teratur..... 1
 - ☐ Menarik Konsumen 2
 - ☐ Sudah Rapi 3
 - ☐ Perlu Biaya/Tenaga..... 4
3. Hal yang perlu diatur:
 - ☐ Jenis Dagangan..... 1
 - ☐ Sarana Dagang..... 2
 - ☐ Waktu..... 3
 - ☐ Tempat Usaha..... 4

4. Fasilitas umum yang perlu ditambah :

- ☐ Listrik.....1
- ☐ Air Bersih.....2
- ☐ Tempat Sampah.....3
- ☐ Parkir.....4
- ☐ MCK/TOILET.....5

5. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda?

- ☐ Ya1
- ☐ Tidak.....2

Alasan:

- ☐ Dekat Keramaian.....1
- ☐ Lokasi telah ditentukan.....2
- ☐ Transportasi Mudah.....3
- ☐ Masih Sepi.....4
- ☐ Merasa Terganggu.....5
- ☐ Lainnya6

**PENGKODEAN JAWABAN QUESTIONER
UNTUK MASYARAKAT
PERSEPSI TERHADAP PKL DAN LOKASINYA**

1. Alasan memilih berbelanja/makan di lokasi PKL :
 - ☐ Harganya lebih murah dibanding yang lain. 1
 - ☐ Lokasinya dekat..... 2
 - ☐ Suasana lebih santai..... 3
 - ☐ Lainnya, 4
2. Manfaat aktivitas PKL di sekitar anda :
 - ☐ Tidak Ada..... 1
 - ☐ Lokasi menjadi lebih ramai..... 2
 - ☐ Mudah mendapatkan kebutuhan..... 3
 - ☐ Lainnya, 4
3. Gangguan apa yang anda rasakan dengan adanya aktivitas PKL
 - ☐ Tidak Ada..... 1
 - ☐ Trotoir menjadi sempit sehingga merasa tidak nyaman untuk berjalan .. 2
 - ☐ Parkir menjadi sulit..... 3
 - ☐ Lingkungan menjadi kotor..... 4
 - ☐ Jalanan menjadi sesak dan macet 5
 - ☐ Merasa kurang aman..... 6
 - ☐ Lainnya, sebutkan..... 7
4. Kelompok :
 - ☐ Sejenis..... 1
 - ☐ Bercampur 2
- Alasan :
 - ☐ Mengurangi persaingan..... 1
 - ☐ Memudahkan pilihan 2
 - ☐ Mudah dicari konsumen..... 3
5. Perlu pengaturan:
 - ☐ Ya
 - ☐ Tidak
- Alasan:
 - ☐ Lebih Teratur..... 1
 - ☐ Menarik Konsumen 2
 - ☐ Sudah Rapi 3
 - ☐ Perlu Biaya/Tenaga..... 4
6. Hal yang perlu diatur:
 - ☐ Jenis Dagangan..... 1

- ☐ Sarana Dagang.....2
 - ☐ Waktu.....3
 - ☐ Tempat Usaha.....4
7. Fasilitas umum yang perlu ditambah :
- ☐ Listrik.....1
 - ☐ Air Bersih.....2
 - ☐ Tempat Sampah.....3
 - ☐ Parkir.....4
 - ☐ MCK/TOILET.....5
8. Menurut Anda apakah lokasi saat ini telah sesuai dengan keinginan Anda?
- ☐ Ya1
 - ☐ Tidak.....2

Alasan:

- ☐ Dekat Keramaian1
- ☐ Lokasi telah ditentukan.....2
- ☐ Transportasi Mudah.....3
- ☐ Masih Sepi.....4
- ☐ Merasa Terganggu5
- ☐ Lainnya6

PKL**Crosstabs****Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
LOKASI PKL * Penghasilan	50	100,0%	0	,0%	50	100,0%

LOKASI PKL * Penghasilan Crosstabulation

Count		Penghasilan						Total
		<=50.000	50.001-100.000	100.001-150.000	150.001-200.000	200.001-250.000	>250.000	
LOKASI PKL	Alun-alun	16	1					17
	RE Martadinata	2		1	1	1	2	7
	Veteran	10						10
	Kenanga	2	1	1				4
	Lap Mulyoharjo	5	1					6
	Lap.Sirandu	5	1					6
Total		40	4	2	1	1	2	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	40,124 ^a	25	,028
Likelihood Ratio	31,021	25	,188
Linear-by-Linear Association	,380	1	,537
N of Valid Cases	50		

a. 33 cells (91,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,08.

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	,667			,028
Interval by Interval Pearson's R	-,088	,073	-,613	,543 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	,053	,120	,366	,716 ^c
N of Valid Cases	50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstabs**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
LOKASI PKL * ruang aktivitas	50	100,0%	0	,0%	50	100,0%

LOKASI PKL * ruang aktivitas Crosstabulation

Count

		ruang aktivitas				Total
		Trottoir	Lahan Parkir	Badan Jalan	Lainnya	
LOKASI PKL	Alun-alun		1	13	3	17
	RE Martadinata			7		7
	Veteran	10				10
	Kenanga		2	2		4
	Lap Mulyoharjo				6	6
	Lap.Sirandu	1	5			6
Total		11	8	22	9	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	105,921 ^a	15	,000
Likelihood Ratio	95,621	15	,000
Linear-by-Linear Association	1,937	1	,164
N of Valid Cases	50		

a. 23 cells (95,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,64.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,824			,000
Interval by Interval	Pearson's R	-,199	,123	-1,406	,166 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,264	,155	-1,897	,064 ^c
N of Valid Cases		50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstabs**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
LOKASI PKL * jenis dagangan	50	100,0%	0	,0%	50	100,0%

LOKASI PKL * jenis dagangan Crosstabulation

Count

		jenis dagangan						Total
		makanan	rokok	konveksi	elektronik, vcd,kaset	jasa	kelontong	
LOKASI PKL	Alun-alun	14	3					17
	RE Martadinata	7						7
	Veteran	2	2	1	1	2	2	10
	Kenanga	3				1		4
	Lap Mulyoharjo	2		1	1		2	6
	Lap.Sirandu	4	1			1		6
Total		32	6	2	2	4	4	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	34,310 ^a	25	,101
Likelihood Ratio	38,498	25	,041
Linear-by-Linear Association	5,138	1	,023
N of Valid Cases	50		

a. 34 cells (94,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,16.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,638			,101
Interval by Interval	Pearson's R	,324	,108	2,371	,022 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	,347	,120	2,567	,013 ^c
N of Valid Cases		50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstabs**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jenis dagangan * sarana dagang	50	100,0%	0	,0%	50	100,0%

jenis dagangan * sarana dagang Crosstabulation

Count

		sarana dagang					Total
		Warung Tenda	Gerobak/Kereta Dorong	Gelaran/dasaran	Kios	Lainnya	
jenis dagangan	makanan	11	18		2	1	32
	rokok		4	2			6
	konveksi	1		1			2
	elektronik,vcd,kaset			1	1		2
	jasa		4				4
	kelontong		2		2		4
Total		12	28	4	5	1	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	38,255 ^a	20	,008
Likelihood Ratio	36,820	20	,012
Linear-by-Linear Association	3,359	1	,067
N of Valid Cases	50		

a. 28 cells (93,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,04.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,658			,008
Interval by Interval	Pearson's R	,262	,142	1,880	,066 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	,397	,114	2,999	,004 ^c
N of Valid Cases		50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
sarana dagang * luas tempat	50	100,0%	0	,0%	50	100,0%

sarana dagang * luas tempat Crosstabulation

Count

		luas tempat			Total
		< 3 M2	3 - 5 M2	> 5 M2	
sarana dagang	Warung Tenda			12	12
	Gerobak/Kereta Dorong	14	14		28
	Gelaran/dasaran	3	1		4
	Kios			5	5
	Lainnya			1	1
Total		17	15	18	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	51,373 ^a	8	,000
Likelihood Ratio	66,263	8	,000
Linear-by-Linear Association	,008	1	,928
N of Valid Cases	50		

a. 12 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,30.

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	,712			,000
Interval by Interval	Pearson's R	,013	,162	,089	,929 ^c
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	-,297	,184	-2,158	,036 ^c
N of Valid Cases		50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ari Sulistiyo Budi, lahir di Pemalang pada tanggal 28 Januari 1976 putra pertama dari pasangan Sulistyو dan Muryaningsih.

Pada saat menyelesaikan studi bertempat tinggal di Jl. Lamongan Barat XII/25 Semarang Jawa Tengah.

Riwayat pendidikan penulis yang dilalui dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan S2 (Pascasarjana) adalah SD Kebondalem I Pemalang lulus tahun 1988 dilanjutkan pada SMP Negeri 02 Pemalang lulus tahun 1991, kemudian SMA Negeri 01 Pemalang lulus tahun 1994. Setelah lulus SMA melanjutkan pendidikan ke Program Diploma III Keuangan lulus tahun 1997. Meneruskan ke jenjang sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Terbuka dan lulus tahun 2002. Pada tahun 2004 mendapat kesempatan untuk mengikuti program pasca sarjana dengan beasiswa dari Bappenas pada Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang dan lulus pada tahun 2006.

Riwayat pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Keuangan adalah dimulai pada saat lulus dari sekolah kedinasan Prodip III Keuangan Jakarta pada tahun 1997 dan mendapat penempatan pertama pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Gunungsitoli, Nias. Selanjutnya pada tahun 2002 dimutasikan pada Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Serang hingga mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan pada MPWK Undip. Pengalaman berkunjung ke luar negeri adalah ke negara Singapura, HongKong dan China.

Pada tanggal 25 Mei 2002 penulis menikah dengan seorang wanita bernama Nur Jannah, S.S. dan dikaruniai seorang anak bernama Naufal Musyaffa Az Zuhair yang lahir pada tanggal 26 Februari 2003.